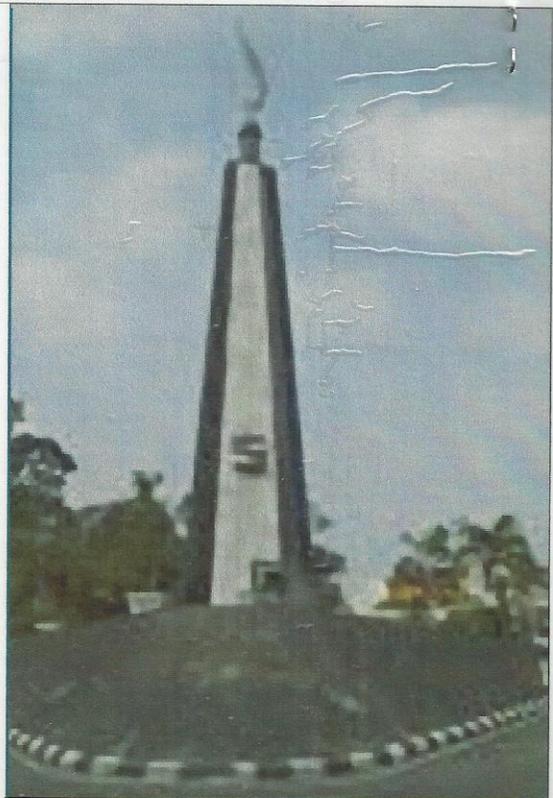


# PROFIL GENDER KOTA BOGOR 2009



Siti Amanah  
Defina  
Ratri Virianita  
Agustina M. Purnomo



Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana  
Kota Bogor dan Divisi Kajian Wanita  
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Pertanian Bogor 2009



**TIM PENYUSUN:**

Ketua:

Dr. Ir. Siti Amanah, MSc

Anggota:

Defina, SS. MSi.

Ratri Virianita, S.Sos, MSi.

Agustina M. Purnomo, SP. MSi.

**Tata Letak dan Desain:**

Ira Rahmatul Umah

**Teknisi:**

Nova Nisa Nindika



## PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan anugerah dan rahmat-Nyalah, Buku Profil Gender Kota Bogor 2009 ini dapat diterbitkan. Kota Bogor, sebagai kota yang sangat pesat perkembangannya dihadapkan pada tantangan untuk mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap penduduknya. Saat ini, penduduk Kota Bogor mendekati 1 juta orang dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Hal ini, menuntut Pemerintah Kota Bogor mampu merancang kebijakan dan strategi pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk itu, Buku Profil Gender Kota Bogor 2009 ini sangat bermanfaat sebagai sumber informasi penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam memahami persoalan gender yang dihadapi masyarakat di Kota Bogor.

Atas tersusunnya Buku Profil Gender Kota Bogor 2009 ini, kami ucapkan terima kasih kepada:

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bogor atas kerjasama dengan Kajian Wanita Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor atas proses-proses administrasi yang telah dilaksanakan.
- Jajaran Pimpinan dan Staf pada Instansi di Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kota Bogor atas kesediaan dalam berbagi data dan informasi terkait bidang kerja masing-masing, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Bogor, Badan



Pusat Statistik Kota Bogor, Departemen Agama, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Agribisnis, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- Para nara sumber pada kegiatan Penyusunan Profil Gender Kota Bogor 2009;
- Anggota Tim Kajian Profil Gender Kota Bogor 2009 atas kerja sama selama ini.

“Tidak ada gading yang tidak retak,” begitu kata pepatah. Buku ini tentu tak luput dari kesilafan. Untuk itu, masukan dan kritik membangun pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi mendatang.

Bogor, 10 Desember 2009

Penyusun



## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Profil Gender Kota Bogor .....	5
1.3 Tujuan Publikasi Profil Gender Kota Bogor .....	5
II. PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER .....	6
2.1 Konsep Gender .....	6
2.2 Pembangunan Berperspektif Gender .....	8
III. LINGKUP KEGIATAN DAN METODE PENYUSUNAN PROFIL GENDER .....	11
3.1 Lingkup Kegiatan .....	11
3.2 Metode Penyusunan Profil Gender .....	13
IV. GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT BOGOR .....	21
4.1 Kondisi Wilayah Kota Bogor .....	21
4.1.1 Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja .....	24
4.1.2 Kondisi Pendidikan dan Permasalahan Sosial .....	26
4.1.3 Kondisi Perekonomian .....	29
V. PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN .....	31
5.1 Partisipasi Sekolah .....	32
5.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan .....	41
5.3 Putus Sekolah .....	43
5.4 Kemampuan Baca Tulis .....	45



	5.5 Pendidikan Non Formal .....	46
VI.	PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN .....	49
	6.1 Kesehatan dan Kualitas Hidup Manusia .....	49
	6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan .....	51
	6.3 Penolong Kelahiran Pertama di Kota Bogor .....	52
	6.4 Angka Kematian Ibu Saat Hamil, Bersalin dan Nifas .....	54
	6.5 Angka kematian Bayi .....	56
VII.	PROFIL GENDER BIDANG SOSIAL, EKONOMI, KETENAGA- KERJAAN, DAN PERTANIAN .....	60
	7.1 Profil Gender Bidang Sosial Ekonomi dan Ketenagakerjaan .....	60
	7.1.1 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	60
	7.1.2 Kondisi Ketenagakerjaan .....	63
	7.2 Profil Gender Bidang Pertanian .....	71
VIII.	PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	76
	8.1. Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik .....	77
	8.1.1 Keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.....	78
	8.2. Partisipasi Perempuan di Pemerintahan .....	81
	8.2.1 Keterlibatan Perempuan dalam Partai Politik dan Organisasi Sosial Masyarakat.....	83
IX.	TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	93
	9.1. Kekerasan Terhadap Perempuan .....	93
	9.2. Kekerasan Terhadap Anak .....	97
	9.3. Jumlah Korban Kekerasan .....	99
X.	KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....	102
	10.1. Status Gizi Kurang dan Buruk .....	103
	10.2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .....	105



	10.3. Jumlah Anak dan Balita Terlantar .....	107
XI	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor .....	110
XII	REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PENUTUP .....	116
	12.1. Rekomendasi Kebijakan .....	116
	12.2. Penutup .....	122
	DAFTAR BACAAN .....	124



## DAFTAR TABEL

3.1	Data dan Sumber Data dalam Penyusunan Profil Gender Kota Bogor 2009 .....	15
4.1	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kota Bogor Tahun 2007.....	24
4.2	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2007 dan 2008 .....	25
4.3	Distribusi Angkatan Kerja di Kota Bogor Tahun 2003 – 2007 .....	26
4.4	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2007 .....	27
4.5	Jumlah Permasalahan Sosial di Kota Bogor Tahun 2007 Menurut jenisnya .....	28
4.6	Jumlah Data Anak Jalanan Empat Tahun Terakhir.....	29
4.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2007.....	30
5.1	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	33
5.2	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kota Bogor Tahun 2007.....	33
5.3	Jumlah Siswa di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	34
5.4	Jumlah Siswa di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor tahun 2008 .....	35



5.5	Jumlah Siswa di sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di kota Bogor Tahun 2008 .....	36
5.6	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2007 .....	39
5.7	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	40
5.8	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis kelamin di Kota Bogor Tahun 2006 .....	42
5.9	Rata-rata Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2004-2007 Menurut Jenis Kelamin .....	42
5.10	Jumlah Penduduk Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008 .....	44
5.11	Angka Buta Huruf dan Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	45
5.12	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008 .....	46
5.13	Jumlah Penduduk Buta Huruf Peserta Keaksaraan Fungsional Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2009 .....	47
5.14	Jumlah Penduduk Peserta Kejar Paket Umum (A,B,dan C) Menurut Jenis kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2009 .....	48
6.1	Persentase Batita yang pernah Disusui Menurut Jenis	



Kelamin dan Masa Menyusui, Tahun 2007-2008 di Kota Bogor .....	50
6.2 Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin dan Usia Perkawinan Pertama Tahun 2007 dan 2008 .....	51
6.3 Sebaran Puskesmas di Tiap Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	51
6.4 Data Fasilitas Kesehatan dan tenaga kesehatan di Kota Bogor Tahun 2007 .....	52
6.5 Penolong Kelahiran pada Dua Tahun Terakhir di Kota Bogor .....	53
6.6 Penolong kelahiran per kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	54
6.7 Angka Kematian Ibu Maternal saat Hamil, Bersalin dan Nifas Dua Tahun Terakhir .....	54
6.8 Kematian Ibu Menurut Penyebab di Kota Bogor Tahun 2001 – 2007 .....	55
6.9 Angka Kematian Bayi dalam Dua Tahun Terakhir (2007–2008) .....	56
6.10 Angka Kematian Bayi 2008 .....	57
6.11 Imunisasi bayi 2008 .....	59
7.1 Distribusi Penduduk Miskin di Kota Bogor Tahun 2007.....	61
7.2 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Bogor, 2007.....	62
7.3 Perkembangan PDRB Kota bogor Tahun 2006-2007.....	63
7.4 Lowongan Pekerjaan Terdaftar dan Terisi Tahun 2002-2007.....	63



7.5	Jumlah Tenaga Kerja dan Pengangguran Tahun 2008.....	64
7.6	Pencari kerja, Lowongan, dan Penempatan di Kota Bogor 2008 .....	64
7.7	Lapangan Usaha Utama dan Lowongan Pekerjaan Terpilah Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008 .....	66
7.8	Lowongan Pekerjaan di Kota Bogor Menurut Pendidikan Terpilah Jenis Kelamin pada Tahun 2008 .....	67
7.9	Lapangan Usaha, Kategori Perusahaan, dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bogor Tahun 2008 .....	68
7.10	Jumlah Perusahaan dan Jumlah tenaga kerja tahun 2008 .....	69
7.11	Penggunaan Jam Kerja .....	70
7.12	Jumlah Kelompok Tani dan Anggotanya Menurut Jenis di Kota Bogor Tahun 2007 .....	75
8.1	Jumlah Pemilih pada Pemilihan legislatif Berdasarkan jenis Kelamin di Kota Bogor, Tahun 2009 .....	78
8.2	Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilu Legislatif Kota Bogor, Tahun 2009 .....	79
8.3	Jumlah Pemilih pada Pilpres Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2009 .....	80
8.4	Pemilih dan Penggunaan Hak pilih berdasarkan Jenis kelamin pada Pemilihan Presiden Kota Bogor Tahun 2009 .....	81
8.5	Nama Partai dan Jenis Kelamin Ketua Partai di Kota Bogor Tahun 2004.....	84
8.6	Nama Partai dan Jenis Kelamin Ketua Partai di Kota Bogor Tahun 2008.....	85



8.7	Nama LSM dan Pengurus Terpilih Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008.....	87
8.8	Nama Organisasi Masyarakat dan Pengurus Terpilih Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008.....	90
9.1	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Bentuk Kekerasan dan kecamatan di Kota Bogor, Tahun 2008 .....	94
9.2	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Bentuk Kekerasan dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2005-2008 .....	95
9.3	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Perilaku Kekerasan dan Waktu Kejadian di Kota Bogor, Tahun 2008 .....	96
9.4	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Bentuk Kekerasan, Jenis kelamin dan kecamatan di Kota Bogor. Tahun 2008 .....	98
9.5	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak Menurut Bentuk Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2005 – 2008 .....	99
9.6	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Perilaku Kekerasan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	100
9.7	Jumlah Korban Perkosaan Menurut Usia dan Waktu Kejadian di Kota Bogor Tahun 2008 .....	100
10.1	Status Gizi Balita Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	104
10.2	Berat Badan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	104
10.3	Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Al Quran Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor. Tahun 2008 .....	105



10.4	Jumlah Siswa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	106
10.5	Jumlah Anak dan Balita Terlantar, serta Anak Berkelakuan Menyimpang Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2007 .....	108
11.1	Indeks Pembangunan manusia, Indeks Pembangunan gender, dan indeks Pemberdayaan gender menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2004-2007.....	110
11.2	Prasyarat PUG .....	112
11.3	Siklus Manajemen Pembangunan gender dan Intervensi Kegiatan .....	113
12.1	Indikator Monitoring dan Evaluasi "Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender" .....	121



## DAFTAR GAMBAR

4.1	Peta Kota Bogor .....	23
5.1	Jumlah Siswa Perempuan di Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	37
5.2	Jumlah Siswa Laki-laki di Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008 .....	37
5.3	Angka Partisipasi Murni Nama Organisasi Masyarakat dan Pengurus Terpilih Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008.....	41
7.1	Perbandingan Target Produksi Tiga Komoditas Utama di Kota Bogor .....	72
7.2	Perbandingan Realisasi Produksi Tiga Komoditas Utama di Kota Bogor.....	73
7.3	Perbandingan Produksi Tiga Komoditas Utama di Kota Bogor .....	74
8.1	Capaian Eselon Pegawai Pemerintah Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin .....	82
8.2	Perbandingan Jumlah Ketua Partai Berjenis Kelamin Laki- laki dan Ketua Partai Berjenis Kelamin Perempuan Tahun 2004 dan Tahun 2008.....	86
8.3	Perbandingan Persentase Pengurus Inti LSM Berdasarkan jenis Kelamin.....	89
8.4	Perbandingan Persentase Pengurus Inti Organisasi Masyarakat Berdasarkan jenis Kelamin .....	91
9.1	Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Bogor 2005-2008 .....	95



9.2	Contoh Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Bogor Tahun 2008 .....	97
12.1	Alur Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.....	120

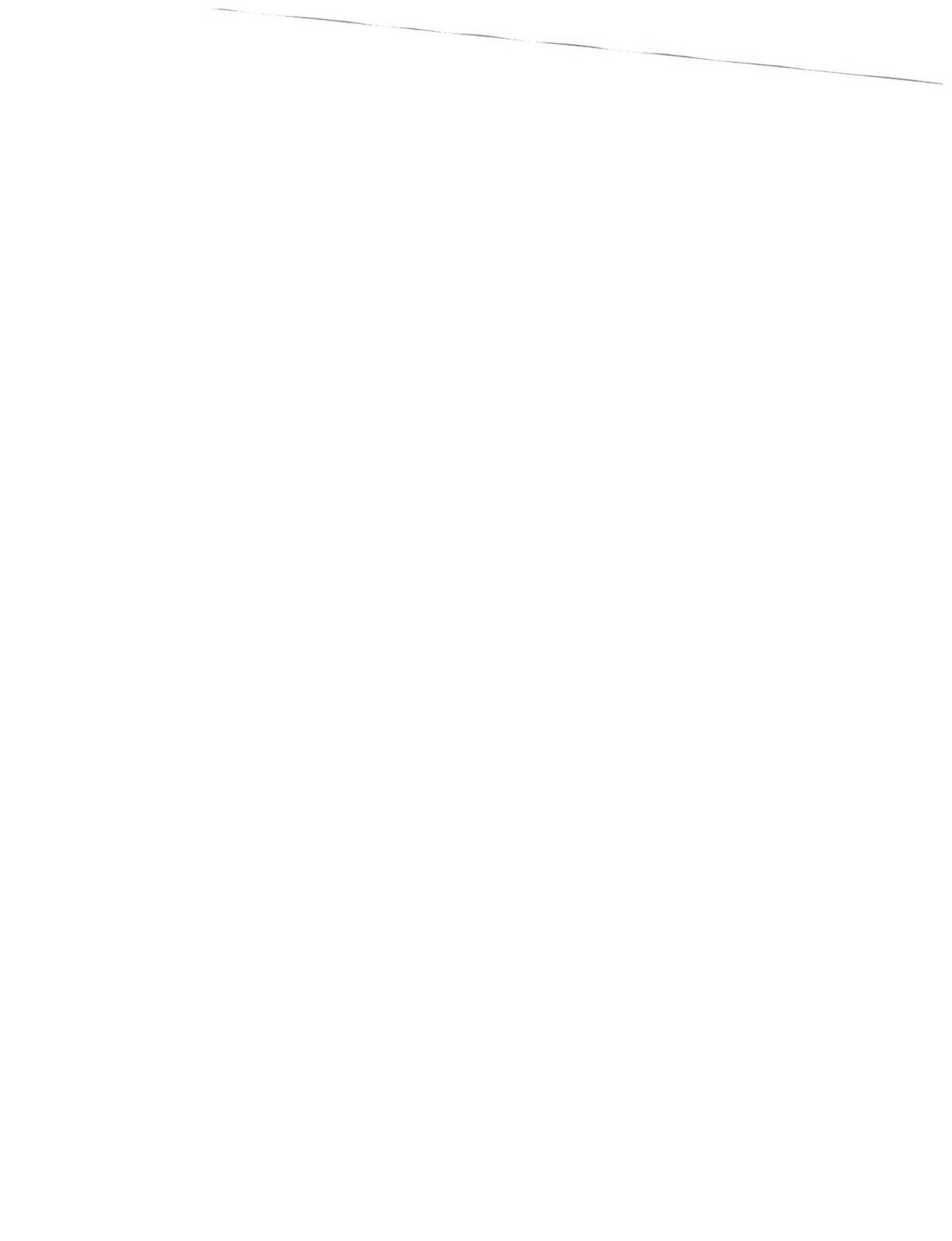


# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara tegas telah dikemukakan cita-cita luhur didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni: "... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat tidak lain ditujukan untuk menyejahterakan seluruh rakyat dengan tanpa membedakan latar belakang, baik suku, agama, ras maupun jenis kelamin.

Tuntutan akan penjaminan mutu kehidupan secara adil dan beradab, baik pada perempuan maupun laki-laki memiliki landasan hukum yang kuat, seperti dikemukakan dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945, Undang-Undang No. 7/1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women* atau disingkat *CEDAW*), Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 43 Tahun 1998 tentang PNS, INPRES No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12/2003 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.



21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

Pada tataran internasional, Pemerintah Indonesia telah menandatangani beberapa kesepakatan tentang kesetaraan dan keadilan gender, hal ini merupakan dasar bagi perluasan komitmen pemerintah untuk tercapainya kualitas hidup perempuan yang lebih baik. Beberapa kesepakatan tersebut di antaranya adalah *Convention on the Political Rights of Women (1952)*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tahun 1979, *International Conference on Population and Development (ICPD)* di tahun 1994, *Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA)* pada 1995 dan *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2001. Dalam pertemuan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)* di Bangkok, pada 7 sampai dengan 10 September 2004 yang dihadiri oleh 48 negara anggotanya, diperoleh gambaran bahwa terdapat kemajuan dalam pelaksanaan BPFA yang dicapai negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut meliputi perbaikan atas 12 masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak di berbagai kawasan, yaitu; (i) perempuan dan kemiskinan, (ii) pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, (iii) perempuan dan kesehatan, (iv) kekerasan terhadap perempuan, (v) perempuan dan konflik bersenjata, (vi) perempuan dan ekonomi, (vii) perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, (viii) mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, (ix) hak-hak asasi perempuan, (x) perempuan dan media, (xi) perempuan dan lingkungan, dan (xii) anak-anak perempuan.



Akan tetapi, belum semua negara mampu keluar dari permasalahan di atas. Indonesia misalnya, hingga saat ini masih dihadapkan pada masalah kemiskinan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi, masalah keterbatasan energi, konflik, dampak bencana alam, masalah kesehatan reproduksi dan HIV-AIDS, gizi buruk, *trafficking*, dan ada beberapa kebijakan yang masih bias gender. Untuk membantu mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi, diperlukan komitmen pemerintah pada seluruh hirarki, terutama pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif gender.

Atas dasar itu, rancang bangun kebijakan, strategi, program, kegiatan pembangunan haruslah mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini hanya dapat terwujud apabila dalam rancang bangun kebijakan tersebut, sejak awal telah didukung oleh data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, dan dilengkapi oleh data-data spesifik berdasarkan, usia, karakteristik geografis, sosio ekonomi, dan budaya. Ketika keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang didukung oleh prosedur perolehan data yang valid dan reliabel, fondasi untuk memenuhi kebutuhan warga negara baik laki-laki maupun perempuan sudah mulai dibangun. Hal ini merupakan bentuk komitmen pembangunan daerah yang responsif gender, sekaligus menindaklanjuti Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.

Hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2009 yang dilaksanakan di Jakarta oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada 18 s.d. 20 Mei 2009 telah menghasilkan kesepakatan dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi melalui pusat studi wanita/gender, untuk melakukan langkah-langkah percepatan PUG.



Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi penyusunan data terpilah, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dukungan peraturan daerah, dan kelembagaan pengarusutamaan gender. Kota Bogor yang terletak lebih kurang 60 km di selatan Ibu kota Indonesia merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, pergeseran budaya masyarakat yang sangat cepat sejalan dengan globalisasi yang merambah hampir di semua dimensi kehidupan. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat ini masih belum optimal.

Kota Bogor dengan luas 11.850 hektar memiliki enam kecamatan yang terdiri atas 68 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 900 ribu jiwa lebih dengan kepadatan penduduk 7638 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS 2008), Kota Bogor hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan masalah sosial ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Dengan populasi penduduk perempuan yang relatif seimbang dengan laki-laki, maka kebijakan pemerintah Kota Bogor senantiasa diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan warganya, secara setara dan adil. Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sangat dibutuhkan untuk membantu para pihak menyusun kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif gender. Melalui ketersediaan dan analisis data terpilah, dapat dihitung Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor. Publikasi ini berupaya menyajikan fakta terkait kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang-bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak, dan keluarga berencana.



## 1.2 Fokus Profil Gender Kota Bogor

Atas dasar kondisi yang saat ini dihadapi di Kota Bogor, fokus analisis dalam profil gender Kota Bogor ini adalah:

- 1) Bagaimanakah data pendidikan, ekonomi dan kesehatan Penduduk Kota Bogor yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia?
- 2) Bagaimanakah status pembangunan gender Kota Bogor, yang dilihat berdasarkan angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita?
- 3) Bagaimanakah status dan capaian pemberdayaan berperspektif gender Kota Bogor yang dilihat berdasarkan peranan perempuan di sektor publik? Capaian pemberdayaan gender dapat dilihat berdasarkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang legislatif, di bidang pemerintahan, dan partisipasi perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi.

## 1.3 Tujuan Publikasi Profil Gender Kota Bogor

- 1) Tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, dan politik;
- 2) Tersedianya hasil analisis pembangunan gender di Kota Bogor, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita; dan
- 3) Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan di Kota Bogor. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam distribusi pendapatan.



## II. PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

Bab ini menguraikan secara ringkas beberapa konsep terkait istilah gender. Prinsip pembangunan berperspektif gender pun perlu menjadi cara pandang bagi para pihak dalam keseluruhan proses pembangunan mulai rancang bangun, pelaksanaan, monitoring-evaluasi sampai dengan tindak lanjut.

### 2.1 Konsep Gender

Istilah "gender" bukan dimaksudkan untuk mendorong perempuan ke luar dari kodratnya. Konsep gender mengacu kepada peran-peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat (KNPP, 2000). Yang termasuk konsep gender adalah harapan-harapan masyarakat mengenai ciri-ciri, sikap, dan perilaku perempuan dan laki-laki. Peran-peran dan harapan-harapan tersebut dapat dipelajari, berubah antarwaktu, dan bervariasi menurut konteks sosio budaya masyarakat. Dalam analisis gender, dapat diketahui ada tidaknya subordinasi perempuan dikonstruksikan oleh budaya, dan dapat diubah melalui transformasi kebijakan dan pembangunan. Konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin. Konsep jenis kelamin merujuk kepada perbedaan biologis perempuan dan laki-laki, tidak dapat diubah, dan sudah merupakan kodrat dari Yang Maha Kuasa.

KPP (2000) memberi batasan bahwa keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke kesetaraan gender. Kesetaraan gender lebih dimaksudkan untuk



memberikan berbagai pilihan alternatif baik bagi laki-laki mau pun perempuan untuk berpartisipasi pada bidang produktif, reproduktif, dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya. Ketimpangan gender terjadi ketika salah satu pihak tersubordinasi, hak-haknya tidak diakui, beban berlebih sehingga upaya-upaya untuk pengembangan diri menjadi terhambat.

Konsep gender lainnya adalah tentang keadilan gender. Keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama, tetapi lebih mementingkan pada kesetaraan sebagai hasilnya. Perlakuan yang tidak sama memerlukan kejujuran dan keadilan dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Konsep keadilan gender mengenali bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan-kebutuhan, kekuasaan yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan ini harus diidentifikasi dan diatasi agar kesetaraan dapat terwujud.

Beberapa istilah lain terkait konsep gender sebagaimana dikemukakan dalam dokumentasi KPP (2000) ada empat, yaitu peran gender, peran reproduktif, peran produktif, dan peran politik di komunitas.

1. **Peran gender** adalah peran-peran dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki karena jenis kelamin mereka berbeda. Apabila individu-individu tidak melaksanakan peran gendernya sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, mereka akan mendapatkan sanksi yang cukup serius. Alokasi tugas-tugas dan nilai-nilai tersebut sangat bervariasi di berbagai budaya, komunitas dan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran gender itu dikonstruksikan oleh budaya yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politiknya.
2. **Peran Reproduksi** meliputi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (memasak, mengambil air, dan kayu bakar, berbelanja, membereskan rumah dan memelihara kesehatan keluarga) yang diperlukan sebagai jaminan pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja, selain juga



pemeliharaan angkatan kerja (suami dan anak-anak yang bekerja) dan angkatan kerja masa depan (anak-anak balita dan anak-anak yang masih sekolah). Peran reproduktif penting untuk keberlangsungan hidup manusia, tetapi jarang dianggap sebagai pekerjaan yang menghasilkan.

3. **Peran Produktif** berkaitan dengan kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berkaitan dengan mata pencaharian, seperti bertani, nelayan, bekerja di pemerintahan atau swasta, yang dilakukan baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Atas jerih payahnya, pekerja memperoleh pembayaran tunai atau natura.
4. **Peran Politik di Komunitas** pada masyarakat tradisional dilakukan terutama oleh laki-laki. Termasuk dalam peran ini adalah pengorganisasian politik formal di tingkat komunitas dalam kerangka politik nasional. Peran ini biasanya dibayar, baik secara langsung maupun tidak melalui status kekuasaan dan pengambilan keputusan.

## 2.2 Pembangunan Berperspektif Gender

Pembangunan yang hanya berorientasi mengejar pertumbuhan semata, berdampak negatif bagi pencapaian kehidupan manusia yang sejahtera dan bermartabat. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2000 di New York telah didiskusikan berbagai permasalahan di dunia, antara lain: (i) setiap tahun, lebih dari 18 juta orang meninggal dunia akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak; (ii) 600 juta anak hidup dalam kemiskinan absolut, (iii) 800 juta orang tertidur dalam kondisi lapar setiap harinya; (iv) hampir separuh dari penduduk dunia hidup kurang dari Rp 20 ribu (kurang dari 2 dollar per hari); (v) lebih dari satu miliar penduduk dunia hidup dengan 1 dollar (Rp 10 ribu) per hari; (vi) setiap tahun, lebih



pengarusutamaan gender dalam keseluruhan tahap penyusunan kebijakan dan implementasi program pembangunan merupakan salah satu penyebab tidak efisiennya pembangunan.

Secara sederhana, pembangunan merupakan upaya memperbaiki kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia. Secara spesifik, pembangunan merupakan upaya multidimensional, mencakup perbaikan politik, budaya, sosial dan ekonomi, bukan semata mengejar pertumbuhan. Pengintegrasian prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan akan mendukung terwujudnya kualitas hidup manusia yang lebih baik. Atas dasar itu, Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender diterbitkan pemerintah. Kebijakan PUG merupakan suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan yang memasukkan pengalaman-pengalaman dan permasalahan-permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender dapat dihilangkan. Hingga 2009 ini, belum semua pemerintah daerah menerapkan kebijakan PUG di semua sektor.

Beberapa ciri pembangunan yang telah berperspektif gender adalah diperhatikannya secara konsisten dan sistematis perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan; adanya komitmen para penyelenggara negara untuk melaksanakan PUG; adanya kerangka kebijakan sebagai wadah pengintegrasian pelaksanaan PUG; struktur kelembagaan yang mendukung PUG; sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan PUG; sistem informasi yang memadai untuk pelaksanaan PUG, adanya sistem informasi dan pendataan terpilah jenis kelamin; adanya dukungan masyarakat.



### III. LINGKUP KEGIATAN DAN METODE PENYUSUNAN PROFIL GENDER

#### 3.1 Lingkup Kegiatan

Upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender lebih mudah dilaksanakan jika diketahui dengan jelas kesenjangan gender yang ada. Untuk mengetahui kesenjangan gender dalam bidang pembangunan tertentu, diperlukan adanya data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dalam beberapa aspek pembangunan, masih ditemui kesenjangan gender. Hal ini dicirikan oleh belum optimalnya akses, peran, partisipasi, serta peluang memonitor dan evaluasi baik laki-laki maupun perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan. Untuk bidang-bidang tertentu, ada indikasi lebih banyak perhatian diberikan kepada penduduk laki-laki, dan sebaliknya. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan berbasis data, fakta, dan masalah yang didasarkan pada kondisi masyarakat mutlak diperlukan.

Profil Gender Kota Bogor Tahun 2009 ini mencakup seluruh wilayah administratif Kota Bogor yang terdiri atas enam wilayah kecamatan. Keenam wilayah kecamatan tersebut meliputi Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Barat, dan Tanah Sereal. Penyusunan profil gender ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai bulan September sampai dengan November 2009. Profil gender yang dianalisis meliputi aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ekonomi dan ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

Langkah-langkah penyusunan profil gender ada lima:

1. Pengumpulan data sekunder terkini, yang terpilah menurut jenis kelamin (*sex-disaggregated data*). Data ini bersumber dari dua bagian, yaitu:



- (i) Lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Bogor, dinas terkait, partai politik, dan organisasi wanita di Kota Bogor. Data tersebut diperoleh melalui DPRD, BAPPEDA, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, serta rumah sakit.
  - (ii) Hasil-hasil studi yang dilakukan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian departemen dan nondepartemen.
2. Diskusi kelompok terfokus (*focused-group discussion*, disingkat FGD) dengan informan kunci antara lain dengan pengambil keputusan untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan bidang terkait dengan kualitas hidup perempuan dan anak. Ada tiga kelompok diskusi.
- (i) Kelompok diskusi pengambil keputusan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam kelompok ini aspek yang didiskusikan meliputi proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan sektoral, dan capaian kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
  - (ii) Kelompok diskusi dengan tenaga pelaksana penyedia layanan kepada masyarakat. Aspek yang didiskusikan dalam kelompok ini adalah program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, keluarga berencana, pertanian, dan ketenagakerjaan; capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.
  - (ii) Kelompok diskusi dengan masyarakat pemanfaat layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, pertanian, dan ketenagakerjaan.



3. Wawancara semiterstruktur dengan representatif: tokoh masyarakat, pegiat Posyandu, Penyuluh Keluarga Berencana, pegiat UKM, pekerja sektor informal, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bogor.
4. Pemilahan, entri, dan analisis data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada telaah kesenjangan gender, yang dilihat dari akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang didapat oleh perempuan dan laki-laki untuk bidang-bidang pembangunan yang dianalisis. Dari analisis tersebut dapat dilihat kondisi faktual profil gender Kota Bogor.
5. Seminar dan lokakarya. Seminar dan Lokakarya dimaksudkan untuk diseminasi hasil penyusunan Profil Gender Kota Bogor 2009, dan memperoleh masukan bagi perbaikan lebih lanjut.

### **3.2 Metode Penyusunan Profil Gender**

Penyusunan Profil Gender Kota Bogor ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deksriptif-analitis yang berfokus penyediaan data terpilah mengenai pelayanan dari berbagai aspek kepada perempuan dan laki-laki. Aspek tersebut adalah pendidikan, kesehatan, dan sektor publik. Studi Profil Gender Kota Bogor 2009 ini mencakup penelusuran data dan informasi yang komprehensif tentang pendidikan, kesehatan, dan sektor publik. Melalui pendekatan penelitian tersebut, hasil studi dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor publik. Apakah terjadi kesenjangan atau keberpihakan kepada salah satu pihak (perempuan atau laki-laki). Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikembangkan oleh pengambil kebijakan mengenai desain rumusan pendidikan, kesehatan dan sektor publik yang responsif gender sesuai kebutuhan masyarakat Kota Bogor.



## (i) Data

### Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi data dalam bentuk teks, image, dan numerik. Data dalam bentuk teks didapat dari laporan, media massa tercetak, dan literatur. Data dalam bentuk numerik berkaitan dengan jumlah tertentu, yakni tentang populasi penduduk perempuan dan laki-laki, angka partisipasi sekolah, angka kelahiran bayi, dan jumlah tenaga kerja. Secara ringkas, data dan sumber perolehannya disajikan pada Tabel 3.1.

Sumber data primer dalam penyusunan profil gender ini adalah pimpinan dan staf pada lembaga pemerintah dan instansi terkait di Kota Bogor. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut meliputi: Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Bogor, Dewan Perwakilan Daerah Kota Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Departemen Agama, Pengadilan Agama, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bogor, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

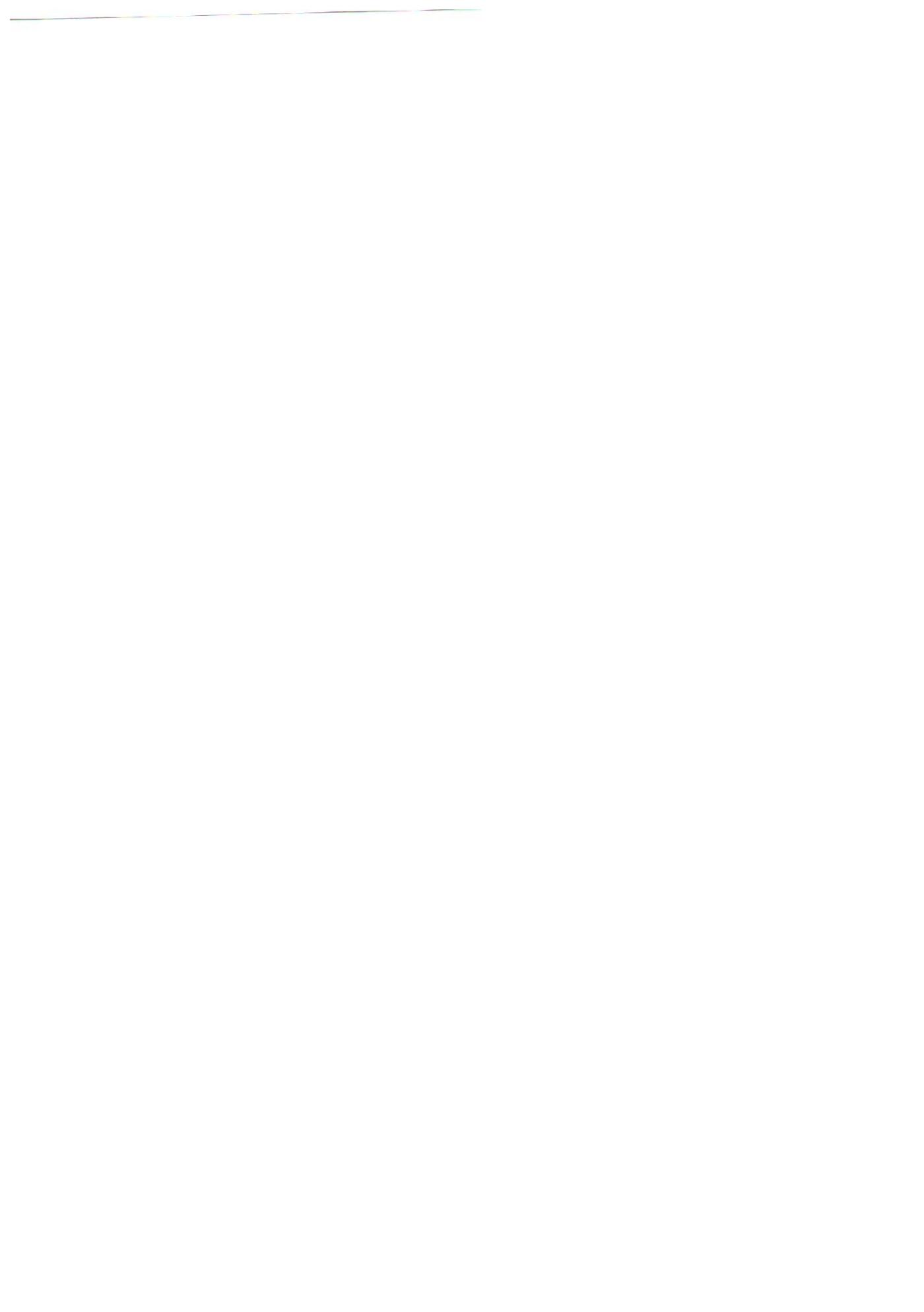


Tabel 3.1 Data dan Sumber Data dalam Penyusunan Profil Gender Kota Bogor, 2009

No	Data	Sumber Data	
		Primer	Sekunder
1	Demografi:	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus dengan nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rasio Jenis Kelamin menurut kelompok umur</li> <li>▪ Struktur Penduduk</li> <li>▪ Formasi Rumahtangga</li> <li>▪ Status Perkawinan dan Pola Umur Perkawinan</li> <li>▪ Tingkat Perceraian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Departemen Agama Kota Bogor</li> <li>▪ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> </ul>
2	Pendidikan:	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus dengan nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPS Kota Bogor</li> <li>▪ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buta huruf</li> <li>▪ Angka Partisipasi Murni</li> <li>▪ Angka Partisipasi Kasar</li> <li>▪ Angka Partisipasi Sekolah</li> <li>▪ Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan/Pencapaian pendidikan menurut ijazah tertinggi</li> <li>▪ Tingkat Pendidikan Non-formal (jika tersedia)</li> </ul>		
3	Kesehatan & KB:	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus dengan nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPMKB Kota Bogor</li> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ Rumah Sakit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas Kesehatan</li> <li>▪ Akses terhadap Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan</li> <li>▪ Pola /Tingkat Morbiditas</li> <li>▪ Imunisasi dan Status Gizi Balita</li> <li>▪ Angka Kematian Bayi</li> <li>▪ Angka Kematian Ibu</li> <li>▪ Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan</li> <li>▪ Partisipasi dalam Keluarga Berencana</li> <li>▪ Fertilitas</li> <li>▪ Pengetahuan tentang HIV/AIDS</li> <li>▪ Tingkat Partisipasi KB</li> </ul>		



No	Data	Sumber Data	
		Primer	Sekunder
4	Sosial, Ekonomi, dan Ketenagakerjaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</li> <li>▪ Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>▪ Perempuan sebagai Kepala Keluarga</li> <li>▪ Perempuan dan Kemiskinan</li> <li>▪ Perempuan Lanjut Usia</li> <li>▪ Partisipasi dan Rasio Bekerja menurut Lapangan dan Jenis Pekerjaan serta Status Bekerja</li> <li>▪ Jam Kerja, Upah dan Gaji menurut pendidikan dan lokasi serta lapangan pekerjaan</li> <li>▪ Perkiraan Pendapatan</li> </ul>	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus dengan nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>▪ PJTKI</li> <li>▪ BPNTKI</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gender dalam Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga</li> <li>▪ Gender dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Besar</li> </ul>	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus dengan nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi</li> <li>▪ LPPM IPB</li> </ul>
6	Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguasaan Aset Produksi/Lahan Pertanian</li> <li>▪ Partisipasi dalam Kelompok Tani dan Koperasi Unit Desa (KUD)</li> <li>▪ Partisipasi dalam Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</li> <li>▪ Partisipasi dalam Beragam Program/Proyek Pertanian</li> <li>▪ Ketahanan Pangan Rumah tangga</li> </ul>	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus dengan nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pertanian</li> <li>▪ L.PPM IPB</li> <li>▪ BIPP</li> </ul>



No	Data	Sumber Data	
		Primer	Sekunder
7	Politik dan Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partisipasi dalam Pemilu</li> <li>▪ Partisipasi dalam Politik dan Legislatif</li> <li>▪ Partisipasi dalam Pemerintahan dan Peradilan</li> <li>▪ Partisipasi dalam Organisasi /Kelembagaan dan Partai Politik menurut jabatan</li> </ul>	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus dengan nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DPRD Kota Bogor</li> </ul>
8	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada Tingkat Keluarga</li> <li>▪ Masyarakat</li> <li>▪ Jumlah Korban Kekerasan</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polres Kota Bogor</li> <li>▪ LSM Pratista Indonesia</li> </ul>
9	Kesejahteraan dan Perlindungan Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk</li> <li>▪ Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>▪ Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Terlantar</li> </ul>	Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ Rumah Sakit</li> <li>▪ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</li> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>

## (ii) Analisis Data

### Analisis Data untuk Profil Gender

Data dianalisis berdasarkan bentuk, masalah, dan tujuan masing-masing indikator gender. Secara umum, data dipilah, dikategorikan, ditabulasi, dan dianalisis sesuai dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Data-data dari instansi terkait, yang belum tersedia dalam bentuk terpilah jenis kelamin dianalisis sesuai ketersediaannya. Di masa yang akan datang, data-data yang belum terpilah berdasarkan



jenis kelamin, dapat ditindaklanjuti oleh sektor terkait dalam bentuk pemutakhiran data terpilah untuk mempermudah para pihak menyusun perencanaan pembangunan berperspektif gender.

### Penghitungan Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender mengukur tingkat pencapaian dalam angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan mempertimbangan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) dan Ukuran Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measure*) merupakan indeks komposit yang terdiri atas sejumlah komponen atau variabel. Dikemukakan dalam Buku penyusunan Analisis Gender di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004, bahwa GDI dan GEM memperhitungkan ekstensi ketidaksamaan aversi yang ditunjukkan oleh parameter  $X_{ede}$ . Untuk menghitung GDI, terlebih dahulu harus dihitung  $X_{ede}$ . Nilai  $X_{ede}$  ini menunjukkan ukuran capaian yang didistribusikan secara sama, dan nilai tersebut merupakan suatu tingkat capaian yang sama antar jenis kelamin dari masing-masing komponen.  $X_{ede}$  dapat dihitung dengan persamaan:

$$X_{ede} = P_f X_f^{(1-\#)} + P_m X_m^{(1-\#)} \text{ dalam hal ini}$$

$X_f$  = menunjukkan capaian perempuan

$X_m$  = menunjukkan capaian laki-laki

$P_f$  = Proporsi penduduk perempuan

$P_m$  = Proporsi penduduk laki-laki

Mengenai indeks distribusi pendapatan, dihitung dengan cara berikut:

Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sektor non pertanian ( $W_f$ ) dan Menghitung upah rata-rata ( $W$ ) dengan rumus



$$W = Aec_r(W_f) + Aec_m \quad (1) \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

Aec<sub>r</sub> : Proporsi tenaga kerja (aktif secara ekonomi) perempuan

Aec<sub>m</sub> : Proporsi tenaga kerja (aktif secara ekonomi) laki-laki

W<sub>f</sub> : rasio upah perempuan di sektor nonpertanian

- Menghitung rasio upah masing-masing jenis kelamin terhadap upah rata-rata (W0 (=R)
- Menghitung sumbangan pendapatan (IncS) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus:
- $IncS = Aec_r(W_f) \cdot R (f/m) \dots\dots\dots (3)$
- Menghitung proporsi sumbangan pendapatan (% IncS) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus:
- $\% IncS = IncS (f/m) / P (f/m) \dots\dots\dots (4)$
- Menghitung X<sub>ede</sub> dari % IncS (=X<sub>ede</sub>(Inc))
- Menghitung indeks distribusi pendapatan (IdisInc) dengan rumus:

$$IdisInc = [ X_{ede}(inc) PPP) - PPP min] / [PPPmaks- PPPmin] \dots\dots\dots (5)$$

Angka GDI dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$GDI = 1/3 [X_{ede}(1) + X_{ede}(2) + IdisInc] \dots\dots\dots (6)$$

Dimana

X<sub>ede</sub>(1) = X<sub>ede</sub> angka harapan hidup

X<sub>ede</sub>(2) = X<sub>ede</sub> pendidikan

IdisInc = Indeks distribusi pendapatan/

Sumber data yang digunakan untuk menghitung GDI adalah sama dengan sumber data HDI. Akan tetapi, data yang ada dinas dan instansi terkait di Kota Bogor belum semua terpilah jenis kelamin sehingga dalam profil gender Kota Bogor 2009 ini yang digunakan adalah data sekunder dari BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

**Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender**



Komponen GEM terdiri atas Indeks Keanggotaan DPE, Indeks Pengambil Keputusan, dan Indeks Distribusi Pendapatan. Perlu dihitung dahulu indeks setiap komponen. Indeks setiap komponen GEM merupakan hasil bagi antara indeks setiap komponen dengan 50. Angka 50 merupakan rasio jenis kelamin yang ideal bagi anggota parlemen, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan (BAPPEDA JABAR, 2005). Penghitungan GEM dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$GEM = 1/3 [Ipar + IPK + IdisInc] \dots (7)$$

Ipar : Indeks keanggotaan di parlemen (DPR)

IPK : Indeks Pengambil Keputusan

Idisinc : Indeks distribusi pendapatan

Penghitungan EDEP Parlemen : [(Proporsi penduduk perempuan) (komposisi perempuan di parlemen)-1 + (proporsi penduduk laki-laki(komposisi laki-laki di parlemen)-1]-1

$$\text{Indeks Parlemen (= Ipar)} = \text{EDEP Parlemen}/50$$

Analog untuk penghitungan indeks pengambil keputusan (IPK), rumusnya:

$$\text{EDEP (PK)} = (\% \text{ tenaga kepemimpinan pr}) (\text{Angka Pr sbg Pemimpin}) + (\% \text{ tenaga pemimpin laki-laki}) (\text{Angka laki-laki di Parlemen})$$

$$IPK = \text{EDEP (PK)}/50$$

Seperti dikemukakan sebelumnya, ketersediaan data terpilah jenis kelamin di Kota Bogor sangat terbatas. Implikasinya, untuk Profil Gender Kota Bogor 2009 ini digunakan IPG yang dipublikasikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI.



## IV. GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT BOGOR

### 4.1 Kondisi Wilayah Kota Bogor

Kota Bogor dengan luas wilayah 11.850 Km<sup>2</sup> secara geografis terletak di antara 106° 43'30" - 160°51'00" BT dan 6° 30'30" - 6° 41'00" LS. Kota Bogor berada kurang lebih 60 km di arah selatan Jakarta dan berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor juga merupakan penyangga bagi Jakarta sebagai tempat pemukiman, pendidikan maupun perdagangan.

Kota Bogor secara umum memiliki suhu udara yang relatif sejuk, suhu rata-rata tiap bulan adalah 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dan suhu tertinggi 30,4° C serta kelembaban udara 70 persen. Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari. Kondisi Kota Bogor nyaman untuk tempat tinggal dan usaha sehingga hal ini menjadi pendorong semakin meningkatnya perumahan, perkantoran, dan pertokoan. Di sisi lain, dengan ketinggian minimum 190 meter dan maksimum 330 m, kemiringan sebagian besar wilayahnya berkisar antara 0 - 15 persen dan lapisan *top soil* tanah *latosil* coklat kemerahan dengan kedalaman efektif 90 cm, Kota Bogor sesuai untuk budi daya pertanian, meskipun saat ini sektor jasa lebih mendominasi. Kawasan Puncak yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor sebagai tempat rekreasi warga Jakarta dan sekitarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi Kota Bogor sebagai salah satu jalur utama menuju kawasan tersebut. Begitu pula dengan keberadaan Kebun Raya Bogor, selain sebagai daya tarik pariwisata juga menjadikan Kota Bogor semakin asri dan memberikan kenyamanan tersendiri bagi warga yang tinggal di wilayah ini maupun penduduk Jakarta dan

sekitarnya yang ingin menikmati hawa yang sejuk tanpa harus ke Puncak. Potensi tersebut merupakan nilai strategis bagi Kota Bogor dan dapat dikembangkan sesuai dengan visi dan misi daerah yaitu:

**Visi Kota Bogor** : "Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah"

### **Misi Kota Bogor**

Misi kota Bogor ada empat, yaitu:

- 1) mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
- 2) mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan;
- 4) mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tahun 1999-2009), fungsi Kota Bogor ditetapkan sebagai berikut: (a) sebagai kota perdagangan, (b) sebagai kota industri, (c) sebagai kota permukiman, (d) wisata ilmiah, dan (e) kota pendidikan.

Secara administratif, Kota Bogor terbagi menjadi enam wilayah kecamatan (Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal). Keenam wilayah kecamatan tersebut melingkupi 68 kelurahan. Peta wilayah Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 4.1. Batas wilayah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| sebelah selatan | : berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor; |
| sebelah timur   | : berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;   |



#### 4.1.1. Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir 2007 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bogor berjumlah 905.132 jiwa yang terdiri atas 457.717 jiwa laki-laki dan 447.415 jiwa perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk produktif (19 - 55 tahun) di Kota Bogor sebanyak 487.571 jiwa (53,87%).

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kota Bogor Tahun 2007

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<1	8.822	7.818	16.640
1-4	34.369	37.321	71.690
5-9	41.03	44.780	85.823
10-14	40.857	42.100	82.957
15-19	42.870	45.127	87.997
20-24	50.208	53.710	103.918
25-29	47.011	46.079	93.090
30-34	44.351	41.131	85.482
35-39	35.279	32.984	68.263
40-44	31.047	27.355	58.402
45-49	25.188	19.928	45.116
50-54	18.366	14.934	33.300
55-59	11.546	9.426	20.972
60-64	10.423	9.013	19.436
65-69	6.426	6.421	12.847
70+	9.911	9.288	19.199
Total	457.717	447.415	905.132

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2008

Komposisi penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Bogor disajikan pada Tabel 4.2. Meskipun penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dalam rancang bangun kebijakan pembangunan, pemerintah Kota Bogor senantiasa berupaya menyusun program pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan gender secara adil.

Tabel 4.2. Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2007 dan 2008

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	2007		2008		Rasio Jenis Kelamin
		L	P	L	P	
Bogor Utara	16	90.116	85.978	83.485	82.760	101
Bogor Selatan	6	45.797	45.812	91.850	87.644	105
Bogor Timur	8	81.134	80.428	47.185	47.144	100
Bogor Barat	11	54.991	54.048	103.874	101.249	103
Bogor Tengah	16	100.408	97.888	56.450	55.502	102
Tanah Sareal	11	85.271	83.261	93.632	91.429	102
Bogor	68	457.717	447.415	476.476	465.728	102

Sumber: BPS Kota Bogor

Jumlah penduduk Kota Bogor pada 2008 tercatat sebanyak 942.204 jiwa terdiri atas laki-laki 476.476 jiwa dan perempuan sebanyak 465.728 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Bogor 7.951 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbesar masih di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 205.123 jiwa (21,77% dari seluruh penduduk), sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bogor Timur sebanyak 94.329 jiwa (10,01%). Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kota Bogor masih tetap 102 yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 102 penduduk laki-laki.

Kota Bogor sebagai daerah *hinterland* bagi Jakarta juga merupakan salah satu sasaran penduduk dari luar kota untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti yang disampaikan dalam rencana tata ruang Kota Bogor, Bogor menempatkan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu fokus pengembangan. Hal ini menjadi penting karena pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan

pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.

Sampai akhir 2007, jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di Kota Bogor dari sektor industri sebanyak 6.068 yang terdiri atas bidang industri, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa-jasa. Namun dari sisi pencari kerja, terdaftar sebanyak 14.162 orang dengan komposisi 9.586 pencari kerja laki-laki dan 4.576 pencari kerja perempuan (Tabel 4.3). Data tersebut belum termasuk para pencari kerja dari luar daerah sehingga persaingan kerja di Kota Bogor juga cukup tinggi, terlebih jika yang dibutuhkan adalah jenis pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan tertentu.

Tabel 4.3 Distribusi Angkatan Kerja di Kota Bogor Tahun 2003-2007

Tahun	Uraian								
	Angkatan Kerja			Yang Bekerja			Pencari Kerja		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
2003	3.439	3.194	6.633	794	911	1.705	2.645	2.283	4.928
2004	7.858	7.040	14.898	2.183	2.647	4.830	5.675	4.857	10.532
2005	20.359	11.052	31.411	1.555	1.149	2.704	18.804	9.903	28.707
2006	17.043	9.253	26.296	1.737	1.386	3.123	15.306	7.867	23.173
2007	10.543	4.770	15.313	957	194	1.151	9.586	4.576	14.162

Sumber: Kota Bogor, 2008

#### 4.1.2. Kondisi Pendidikan dan Permasalahan Sosial

Selain pengembangan sektor industri dan perdagangan, Kota Bogor juga diarahkan sebagai kota pendidikan. Sampai 2007 jumlah sarana pendidikan, baik yang negeri maupun swasta cukup berkembang dengan pesat, tercatat ada 614 lembaga pendidikan formal yang menampung 202.975 siswa. Terkait hal ini, Tabel 4.4. menyajikan jumlah sekolah yang ada di Kota Bogor berdasarkan data 2007 dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Umum.

Selain sekolah dasar dan menengah, Kota Bogor juga menjadi pusat pendidikan tinggi dengan adanya Institut Pertanian Bogor, Universitas Pakuan, Universitas Islam Ibnu Khaldun, Universitas Nusa Bangsa dan Universitas Djuanda, serta beberapa lembaga pendidikan tinggi yang lain. Mahasiswa yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan tinggi tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat Kota Bogor.

Tabel 4.4. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2007

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		Swasta	Negeri	Total
1.	Taman Kanak-kanak	1	153	154
2.	Sekolah Dasar	244	40	294
3.	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	26	89	115
4.	Sekolah Menengah Umum	10	40	50
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	3	8	11
<b>TOTAL</b>		<b>284</b>	<b>330</b>	<b>614</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2008

Meskipun demikian, jumlah pendatang yang tinggi dan Bogor sebagai daerah perkotaan yang padat penduduknya menyebabkan Kota Bogor memiliki berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang harus dihadapi. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kasus yang bertambah setiap tahunnya. Pada 2007 tercatat jumlah narapidana yang dihukum sebanyak 754 orang. Kasus-kasus tersebut terkait dengan permasalahan penipuan, penadahan, kelalaian, narkoba dan psikotropika, kepemilikan senjata, korupsi, perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan sosial tersebut belum lagi terkait dengan masalah pengemis, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

Secara lebih lengkap jumlah permasalahan sosial yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Jumlah Permasalahan Sosial di Kota Bogor menurut Jenisnya, 2007

Jenis Masalah Sosial	Jumlah
Anak terlantar	320
Balita terlantar	99
Lanjut usia terlantar	2.386
Anak nakal	17
Penyandang cacat	831
Eks. penyakit kronis	72
Gelandangan dan pengemis	100
Tuna susila	53
Fakir miskin	7.125
<b>Jumlah</b>	<b>11.003</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2008

Selain masalah sosial di atas, Kota Bogor juga menghadapi permasalahan anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Kota Bogor dalam empat tahun terakhir, ternyata mengalami fluktuasi. Tahun 2006, jumlah anak jalan cukup banyak, tetapi mengalami penurunan tahun 2007. Tahun 2008, jumlah anak jalanan meningkat lagi, tetapi tahun 2009 mengalami penurunan. Dengan demikian, jumlah anak jalanan ini tahun 2010 diperkirakan mengalami peningkatan (Tabel 4.6)

Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah anak jalanan laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak jalanan perempuan. Akan tetapi, jumlah anak jalanan perempuan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mengantisipasi terjadinya *trafficking* dan prostitusi.

Tabel 4.6. Jumlah Data Anak Jalanan Empat Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Anak jalanan		Jumlah (jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
2006	102	16	118
2007	25	12	37
2008	89	20	109
2009	55	25	80
<b>Jumlah</b>	271	73	344

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Bogor 2009

#### 4.1.3. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada periode 2003–2007, PDRB Kota Bogor menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2003-2007 relatif meningkat. Dari data BPS Kota Bogor (2008) PDRB Kota Bogor tahun 2007 adalah sekitar Rp8,6 triliun (tepatnya Rp 8.558.035.700.000,00). Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2006 yang hanya sekitar Rp7,26 triliun (tepatnya Rp 7.257.742.090.000,00). Sumbangan PDRB tertinggi dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp3,4 triliun (tepatnya Rp 3.436.046.880.000,00) dan disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sekitar Rp1,04 triliun (tepatnya sebesar Rp 1.044.468.100.000,00). Secara lebih lengkap PDRB Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Dilihat dari dua sektor yang menyumbangkan PDRB terbesar, kondisi tersebut sesuai dengan arah pengembangan Kota Bogor sebagai kota perdagangan. Melihat perkembangan ke depan, dengan pesatnya pembangunan infrastruktur perdagangan dan perbaikan sistem transportasi memungkinkan sektor perdagangan akan memberikan sumbangan PDRB dengan lebih baik.

Tabel 4.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2007 (Jutaan Rupiah)

Uraian	2003	2004	2005*	2006**	2007**
1. Pertanian	14.407,64	16.082,18	17.822,53	19.149,26	20.646,37
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri dan Pengolahan*	979.238,35	1.159.540,12	1.461.302,82	1.751.094,22	187.527,43
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	111.548,89	126.355,83	143.978,23	164.147,74	187.527,43
5. Bangunan	309.711,26	348.953,92	393.350,16	445.595,77	506.135,84
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.619.113,05	2.285.391,22	2.597.085,00	2.981.610,77	3.436.046,88
7. Pengangkutan dan Komunikasi	412.663,22	504.754,77	641.123,70	815.849,89	1.044.486,10
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	450.062,73	514.521,30	618.496,92	729.621,54	863.501,47
9. Jasa-jasa	268.823,99	290.147,48	318.759,54	350.672,90	386.874,85
<b>PDRB</b>	<b>4.165.569,13</b>	<b>5.245.746,82</b>	<b>6.191.918,90</b>	<b>7.257.742,09</b>	<b>8.558.035,70</b>

Keterangan: \*) angka perbaikan;

\*\*\*) angka sementara

## V. PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar bagi setiap manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembangunan, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang penting karena merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan terutama dalam hal pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang semakin baik tentunya akan semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, bidang pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi pendidikan suatu penduduk yang semakin membaik merupakan gambaran kemajuan pembangunan bidang pendidikan yang dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf dan buta huruf, serta aksesibilitas terhadap media massa. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan juga ditandai oleh aksesibilitas menurut gender dengan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan.

Secara Nasional, dalam bidang pendidikan kaum perempuan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan kaum perempuan dari laki-laki dalam bidang pendidikan disebabkan pandangan yang mendahulukan dan mengutamakan anak laki-laki untuk memperoleh pendidikan. Para orang tua dari keluarga miskin cenderung menanam investasi pendidikan kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dengan harapan setelah menamatkan pendidikan anak laki-laki dapat menjadi tulang punggung keluarga.

Untuk mengetahui apakah masih terdapat kesenjangan gender dalam hal pendidikan di Kota Bogor, berikut ini disajikan profil gender dalam bidang pendidikan dengan menggunakan beberapa indikator sebagaimana dikemukakan di atas.

### 5.1 Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah dapat digunakan pemerintah untuk menilai kesuksesan program wajib belajar. Untuk memperoleh angka partisipasi sekolah diperlukan data berupa jumlah penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan yang masih sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah sesuai usia yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan tertentu. Di dalam dokumen RPJM bidang pendidikan disebutkan tentang beberapa kelompok penduduk menurut usia sekolah antara lain 7-12 tahun adalah usia Sekolah Dasar (SD), 13-15 tahun adalah usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 16-18 tahun adalah usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah di masing-masing kecamatan di Kota Bogor pada 2008. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur sekolah SD (7-12 tahun) dan SLTP (13-15 tahun). Pada kelompok umur sekolah SLTA (16-18 tahun) jumlah penduduk perempuan menurun dan sedikit lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki.

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Usia Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	Usia 7-12		Usia 13-15		Usia 16-18	
	L	P	L	P	L	P
Bogor Utara	9.239	9.762	4.361	4.674	4.634	5.045
Bogor Selatan	10.921	11.148	5.178	4.991	5.308	5.247
Bogor Timur	5.013	5.549	2.517	2.748	2.627	2.826
Bogor Barat	10.651	11.347	5.269	5.440	2.971	3.273
Bogor Tengah	5.012	5.271	2.530	2.802	7.376	6.113
Tanah Sareal	10.467	10.909	5.178	5.365	5.468	5.656
Bogor	51.303	53.986	25.033	26.020	28.384	28.160

Sumber: Diolah dari data BPS Kota Bogor 2008

Angka partisipasi sekolah di Kota Bogor pada 2007 ditunjukkan oleh Tabel 5.2. Tampak bahwa angka partisipasi sekolah 7-12 tahun adalah 99,37. Hal ini menunjukkan terdapat 99,37 persen anak usia 7-12 tahun di Kota Bogor yang masih sekolah, sedangkan 0,63 persen tidak bersekolah lagi. Demikian seterusnya, angka partisipasi sekolah 13-15 tahun, yaitu 88,40 menunjukkan terdapat 88,40 persen anak usia 13-15 tahun di Kota Bogor yang masih sekolah dan 11,60 persen lainnya tidak bersekolah lagi. Di tingkat SLTA, angka partisipasi sekolah 16-18 tahun adalah sebesar 65,39 yang menunjukkan 34,61 persen anak usia 16-18 tahun di Kota Bogor sudah tidak bersekolah lagi.

Tabel 5.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah di Kota Bogor, 2007

Angka Partisipasi Sekolah	Usia Sekolah (tahun)		
	7-12	13-15	16-18
	99.37	88.40	65.39

Sumber: Badan Pusat Statistik Bogor 2008

Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi sekolah penduduk laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bogor pada 2008 digambarkan Tabel 5.3. Jumlah penduduk laki-laki yang bersekolah di SD/MI lebih besar daripada penduduk perempuan, yaitu 61.188

perempuan di kecamatan ini relatif rendah, yaitu 47,97 persen dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bogor.

Tabel 5.4 Jumlah Siswa di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	L	%	P	%	Jumlah	%
Bogor Utara	2.390	49,76	2.413	50,24	4.803	100
Bogor Selatan	4.613	51,12	4.410	48,88	9.023	100
Bogor Timur	1.472	52,03	1.357	47,97	2.829	100
Bogor Barat	4.733	50,89	4.567	49,11	9.300	100
Bogor Tengah	6.362	48,96	6.631	51,04	12.993	100
Tanah Sereal	4.143	50,29	4.095	49,71	8.238	100
Bogor	23.713	50,25	23.473	49,75	47.186	100

Sumber: Disdikpora Kota Bogor, 2009

Pada tingkat pendidikan lanjutan atas, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di Kota Bogor relatif seimbang. Persentase siswa laki-laki lebih tinggi, yaitu 50,29 persen dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 49,71 persen (Tabel 5.3). Secara umum, kesadaran tentang pentingnya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi sudah cukup baik pada masyarakat Kota Bogor. Terutama di Kecamatan Bogor Selatan, partisipasi sekolah penduduk perempuan jauh lebih tinggi, yaitu 62,55 persen dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 37,44 persen.

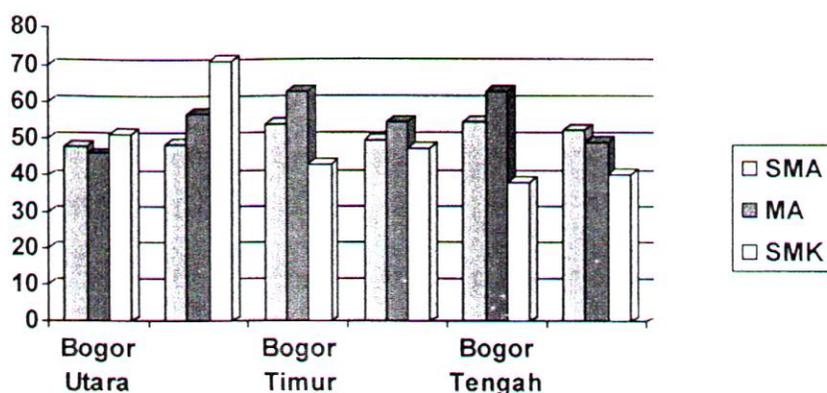
Mengacu pada data pada Tabel 5.5, tampak ada kecenderungan masyarakat mulai memahami arti penting pendidikan lanjut. Akan tetapi, ada dua kecamatan yang persentase siswi bersekolah di SMA/MA/SMK masih lebih rendah daripada siswanya, yakni di Kecamatan Bogor Tengah dan Tanah Sereal. Pada umumnya ada beberapa pendorong siswa berhenti melanjutkan sekolah, yakni karena faktor ekonomi dan motivasi siswa untuk bersekolah. Semakin rendah motivasi siswa bersekolah, maka akan semakin cepat pula mereka meninggalkan bangku sekolah.

Tabel 5.5 Jumlah Siswa di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	L	%	P	%	Jumlah	%
Bogor Utara	5.256	50,26	5.201	49,74	10.457	100
Bogor Selatan	2.623	37,44	4.382	62,56	7.005	100
Bogor Timur	4.155	49,48	4.242	50,52	8.397	100
Bogor Barat	5.742	50,73	5.576	49,27	11.318	100
Bogor Tengah	5.798	54,30	4.879	45,70	10.677	100
Tanah Sareal	5.041	55,76	4.000	44,24	9.041	100
Bogor	28.615	50,29	28.280	49,71	56.895	100

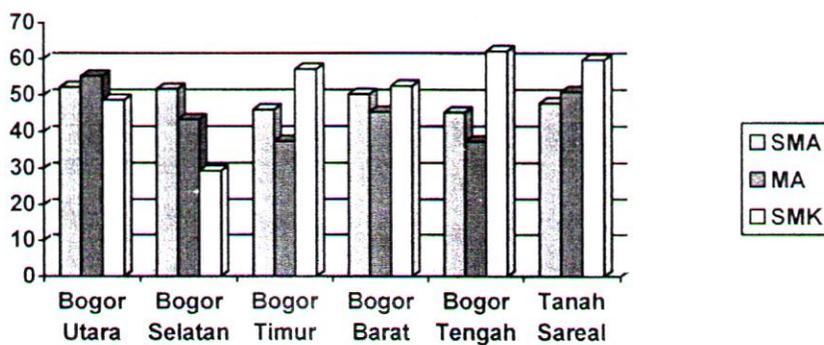
Sumber: Disdikpora Kota Bogor, 2009

Tingginya jumlah siswa perempuan pada pendidikan lanjutan atas di Kecamatan Bogor Selatan disumbang oleh partisipasi sekolah penduduk perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan yang mencapai 70,71 persen. Agaknya, meskipun kesadaran masyarakat mengenai pendidikan lanjutan atas bagi anak perempuan sudah tumbuh, masyarakat cenderung mendorong anak perempuan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang lebih mengasah keterampilan dan kesiapan kerja. Hal ini dimaksudkan agar anak perempuan dapat lebih siap bekerja dan menopang perekonomian keluarga apabila sudah menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, meski partisipasi sekolah penduduk perempuan pada jenjang pendidikan lanjutan atas di Kecamatan Bogor Tengah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan lima kecamatan lainnya, namun tampak bahwa jumlah siswa perempuan pada Madrasah Aliyah cukup tinggi, yaitu sebesar 62,67 persen.



Gambar 5.1 Jumlah Siswa Perempuan di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Sumber: Diolah dari Data Disdikpora Bogor, 2009



Grafik 5.2 Jumlah Siswa Laki-laki di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Sumber: Diolah dari Data Disdikpora Bogor, 2009

Jumlah siswa laki-laki pada pendidikan lanjutan atas di semua kecamatan di Kota Bogor relatif tinggi. Ada kecenderungan Sekolah Menengah Kejuruan lebih diminati. Hal ini tampak jelas di empat kecamatan, yaitu Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Tengah dan Tanah Sareal yang menunjukkan jumlah siswa laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan cukup tinggi, yaitu masing-masing 57,13 persen, 52,55 persen,

62,11 persen dan 56,95 persen. Masyarakat cenderung menyekolahkan anak laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan harapan anak laki-laki dapat menjadi tulang punggung keluarga setelah menyelesaikan pendidikan. Adapun di Kecamatan Bogor Selatan jumlah siswa laki-laki pada pendidikan lanjutan atas jauh lebih rendah dibandingkan lima kecamatan lainnya. Terkait dengan ini perlu ada upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi penduduk laki-laki agar melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan lanjutan atas.

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah, yaitu angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Keduanya mengukur penyerapan pendidikan usia sekolah oleh sistem pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" yang ditetapkan pemerintah dan umum di setiap jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar menggunakan kelompok usia sekolah yang ditetapkan pemerintah, yaitu usia sekolah 7-12 tahun adalah usia Sekolah Dasar (SD), 13-15 tahun adalah usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 16-18 tahun adalah usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Mengacu pada kelompok usia tersebut, maka angka partisipasi kasar SD di Kota Bogor pada 2007 adalah sebesar 109.11. Angka yang melebihi 100 persen ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia di atas 12 tahun yang masih sekolah pada jenjang pendidikan SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia SD menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Tingginya angka ini bisa juga menunjukkan adanya penduduk yang masuk SD pada usia yang lebih muda dibanding usia SD.

Angka partisipasi kasar SMP di Kota Bogor tahun 2007 adalah sebesar 97.53. Artinya, masih terdapat 2,47 persen penduduk usia sekolah 13-14 tahun yang belum terserap oleh sistem pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Angka partisipasi kasar SLTA di Kota Bogor pada 2007 adalah 105.96 yang menunjukkan masih terdapat penduduk usia di

atas 18 tahun yang masih sekolah pada jenjang pendidikan SLTA disebabkan tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Angka yang melewati 100 persen ini juga memperlihatkan adanya penduduk di luar Kota Bogor yang terserap oleh sistem pendidikan di wilayah Kota Bogor. Tabel 5.6 memperlihatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di Kota Bogor pada 2007.

Tabel 5.6 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2007

Kecamatan	SD		SMP		SLTA	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Bogor Utara	80.29	67.64	49.38	37.37	118.63	116.08
Bogor Selatan	221.22	194.59	193.62	136.31	81.94	75.97
Bogor Timur	116.73	98.03	36.30	25.97	133.58	131.18
Bogor Barat	95.59	79.08	86.64	63.49	95.73	94.69
Bogor Tengah	110.99	94.56	157.27	122.12	118.29	112.32
Tanah Sareal	91.61	77.15	84.27	61.42	93.62	92.43
Bogor	109.11	92.58	97.53	72.21	105.96	103.01

Sumber: Disdikpora Kota Bogor 2007

Angka partisipasi kasar SD mengalami peningkatan pada 2008, yaitu 111.71. Angka ini dapat menunjukkan adanya penduduk usia di atas 12 tahun yang masih sekolah pada jenjang pendidikan SD karena kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Dapat juga menunjukkan adanya penduduk usia lebih muda dibanding usia SD yang masuk sekolah. Selain itu, dapat juga diartikan adanya penduduk luar kota Bogor yang bersekolah di wilayah Kota Bogor, sehingga menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk membangun lebih banyak sarana pendidikan yang memadai. Adapun angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan menengah dan lanjutan mengalami penurunan, yaitu 92.43 dan 103.62.

Berdasarkan jenis kelamin, tampak pada Tabel 5.7 bahwa Angka partisipasi kasar penduduk laki-laki dan perempuan pada jenjang Sekolah Dasar relatif seimbang, yaitu 119.27 dan 104.52. Namun, angka partisipasi kasar penduduk perempuan pada jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan

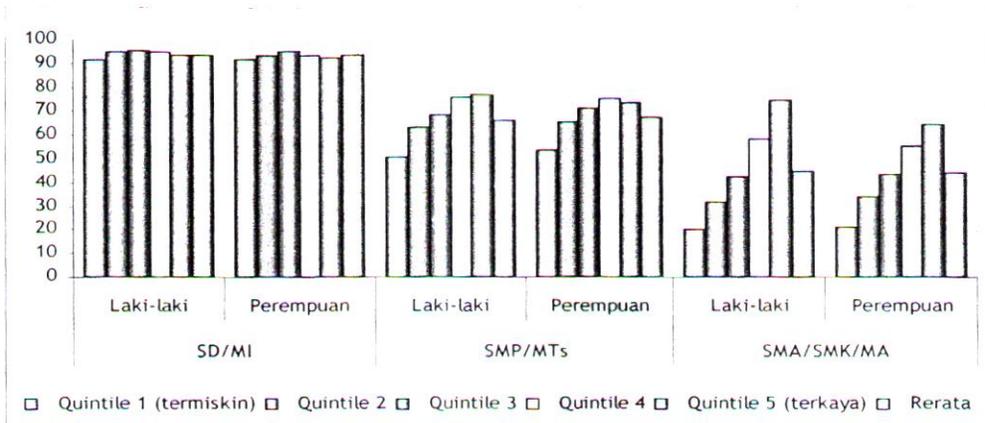
Bogor Utara masih rendah, yaitu 77.99. Artinya, terdapat 22,01 persen penduduk perempuan usia 6-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan dasar. Demikian halnya, pada jenjang pendidikan SMP meski relatif seimbang, namun angka partisipasi kasar penduduk perempuan di Kecamatan Bogor Timur masih sangat rendah, yaitu 49.39. Artinya, 50,61 persen penduduk perempuan yang tidak mengenyam atau terserap oleh sistem pendidikan menengah. Oleh sebab itu, perlunya upaya pemerintah untuk mendorong program wajib belajar 9 tahun bagi penduduk perempuan dan menambah bangunan SMP di wilayah Kecamatan Bogor Timur yang mudah dijangkau.

Tabel 5.7 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	SD		SMP		SLTA	
	L	P	L	P	L	P
Bogor Utara	91.85	77.99	54.80	51.63	113.42	103.09
Bogor Selatan	105.80	91.43	89.09	88.36	49.42	83.51
Bogor Timur	128.21	109.66	58.48	49.38	158.17	154.48
Bogor Barat	115.09	101.03	89.83	83.95	100.07	91.22
Bogor Tengah	212.75	191.18	251.46	263.45	195.15	149.07
Tanah Sareal	112.74	100.79	80.01	76.33	92.19	70.72
Bogor	119.27	104.52	94.73	90.21	106.99	104.3
	111.71		92.43		103.62	

Sumber: Diolah dari data Disidikpora Kota Bogor 2009 dan Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2008

Di tingkat nasional, seperti tampak pada Gambar 5.3, angka partisipasi murni (APM) anak laki-laki dan perempuan sama, tetapi APM kelompok miskin lebih rendah pada tingkat menengah dan atas. Pemerintah perlu merancang sistem pendidikan yang dapat diakses secara merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan harus menjadi prinsip dalam pemenuhan layanan pendidikan termasuk di Kota Bogor.



Gambar 5.3. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK MA, menurut jenis kelamin dan Status Ekonomi, 2007

Sumber: Depdiknas (2009)

## 5.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran keberhasilan pendidikan. Tabel 5.8 berikut menunjukkan tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Bogor. Berdasarkan data tampak bahwa masih terdapat 23,97 persen penduduk perempuan di Kota Bogor yang tidak atau belum pernah sekolah. Terdapat 27,33 persen penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas di Kota Bogor yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki berusia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, yaitu 26,80 persen. Pada jenjang pendidikan SLTP, persentase perempuan berusia 10 tahun ke atas juga lebih tinggi, yaitu 18,77 persen, dibandingkan persentase penduduk laki-laki berusia 10 tahun ke atas, yaitu 17,93.

Tabel 5.8 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2006

Pendidikan Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan
Tidak/Belum SD	18,67	23,97
SD/MI/Sederajat	26,80	27,33
SLTP/MTs/Sederajat	17,93	18,77
SLTA/Sederajat	18,11	15,98
SMK/Kejuruan	9,52	6,35
Diploma 2	1,11	1,35
Diploma 3/Sarmud	2,77	2,12
Diploma IV/S1	4,99	3,95
S2/S3	0,99	0,19

Sumber: Susenas Jawa Barat, 2006

Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tampak pada Tabel 5.8 bahwa persentase penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas semakin menurun. Persentase penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SLTA adalah 15,98 persen lebih rendah dibandingkan persentase penduduk laki-laki berusia 10 tahun ke atas, yaitu 18,11 persen. Demikian seterusnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk perempuan selalu lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar tidak ada permasalahan gender di Kota Bogor, namun semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tampak adanya permasalahan gender.

Tabel 5.9 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2004-2007 menurut Jenis Kelamin

Rata-rata Lama Sekolah	2004		2005		2006		2007	
	L	P	L	P	L	P	L	P
	10	8.5	10.3	8.9	10.3	8.9	10.7	8.8

Sumber: Website Resmi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2009

Dilihat dari rata-rata lama sekolah, tampak pada Tabel 5.9 bahwa sejak 2004 hingga 2007 rata-rata penduduk laki-laki di Kota Bogor menempuh pendidikan formalnya sampai dengan kelas 1 SLTA. Hal ini berbeda dengan penduduk perempuan yang rata-rata mengenyam pendidikan tidak sampai lulus SMP. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan upaya dari pemerintah daerah untuk mendorong penduduk perempuan mengenyam pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun.

### 5.3 Putus Sekolah

Berdasarkan Data BAPPEDA Kota Bogor, pada tahun pelajaran 2004/2005 angka putus sekolah atau *drop out* pada jenjang SD/MI tercatat sejumlah 140 siswa dengan rincian SD sebanyak 69 siswa dan MI sebanyak 71 siswa. Pada jenjang SMP dan yang sederajat tercatat sejumlah 328 siswa dengan rincian SMP negeri sebanyak 49 siswa, SMP swasta sebanyak 208 siswa dan MTs sebanyak 71 siswa. Pada jenjang SLTA dan yang sederajat Angka Putus Sekolah tercatat 455 siswa dengan rincian SMA Negeri sebanyak 1 siswa, SMA swasta sebanyak 119 siswa, SMK swasta sebanyak 298 siswa dan MA sebanyak 37 siswa.

Selama periode empat tahun angka putus sekolah tersebut mengalami penurunan. Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI hanya sebanyak 15 siswa (Tabel 5.10). Pada jenjang SLTP/MTs tercatat 200 siswa yang putus sekolah. Adapun pada jenjang SLTA/MA tercatat sebanyak 248 siswa. Berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa siswa laki-laki lebih banyak yang putus sekolah, yaitu 314 siswa dibandingkan siswa perempuan, yaitu 149 siswa. Siswa perempuan lebih banyak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yaitu 107 siswa.

Tabel 5.10 Jumlah Penduduk Putus Sekolah menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008

Tingkat Pendidikan	2008					
	L	%	P	%	Jumlah	%
SD/MI	7	46,66	8	53,33	15	100
SMP/MTs	93	46,50	107	53,50	200	100
SMA/MA	214	86,29	34	13,70	248	100
Jumlah	314	67,81	149	32,18	463	100

Sumber: Disdikpora Kota Bogor 2009

Pendidikan perempuan sangat penting bagi pengembangan diri dan membebaskan perempuan dari ketertinggalan dan keterbelakangan. Di beberapa wilayah di Kota Bogor, tidak semua perempuan beruntung menikmati pendidikan sampai lulus Sekolah Menengan Atas. Sebagian besar alasan penduduk usia sekolah (7 sampai dengan 24 tahun) putus sekolah adalah karena tidak ada biaya. Alasan lain adalah karena bekerja, menikah, lokasi sekolah jauh, dan faktor lain seperti tidak diterima pada sekolah yang diinginkan.

Situasi dan permasalahan di Kota Bogor yang dijumpai saat ini adalah semakin banyak anak usia sekolah dasar yang turut bekerja mencari dana untuk sekolah. Pekerjaan terbanyak yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah menjual koran, mengumpulkan barang-barang bekas, dan menjadi pengamen. Hasil wawancara mendalam kepada anak-anak tersebut memperlihatkan bahwa kesulitan ekonomi mendorong mereka untuk bekerja meringankan beban ekonomi orang tua. Di sisi lain, ada sebagian orang tua yang bersikap tidak peduli akan kegiatan anaknya di luar sekolah. Kelompok orang tua ini cenderung melimpahkan tanggung jawab kepada sekolah. Pada kenyataannya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh sekolah. Ada peran-peran penting yang tidak dapat diambil alih sekolah, seperti pola asuh primer, pembentukan kepribadian anak, dan kesehatan anak.

Peran Pimpinan Sekolah, Komite Sekolah, Persatuan Orang Tua Murid, dan Dewan Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga sangat diperlukan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan anak sangat menentukan masa depan bangsa.

#### 5.4 Kemampuan Baca Tulis

Kemampuan penduduk Kota Bogor untuk dapat membaca dan menulis ditunjukkan oleh Angka Melek Huruf penduduk Kota Bogor 2008 yang mencapai 98.70 (Badan Pusat Statistik, 2008). Artinya terdapat 98,70 persen diantara penduduk Kota Bogor yang berumur 10 tahun ke atas sudah bisa membaca dan menulis, dan sekitar 1,3 persen saja yang masih buta huruf. Berdasarkan data dari Subdin PLS Dinas Pendidikan Jawa Barat (2008) diketahui bahwa masih terdapat 8.574 jiwa penduduk 15 tahun ke atas yang buta aksara di Kota Bogor.

Tabel 5.11 Angka Buta Huruf dan Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	Angka Buta Huruf		Angka Melek Huruf	
	L	P	L	P
Bogor Utara	1.10	0.04	98.90	99.96
Bogor Selatan	0.31	1.25	99.69	98.47
Bogor Timur	1.02	1.02	98.98	98.98
Bogor Barat	-	0.72	-	99.28
Bogor Tengah	0.05	1.23	99.95	98.77
Tanah Sereal	0.19	0.85	99.81	99.15
Bogor	0.39	0.85	99.61	99.15

Sumber: Diolah dari data Disdikpora, 2009 dan Badan Pusat Statistik 2008

Tabel 5.11 memperlihatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin. Tampak bahwa penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis di Kota Bogor pada 2008 masih sedikit lebih rendah daripada penduduk

laki-laki, yaitu sebesar 99,15 persen, sehingga masih terdapat 0,85 persen atau 2.679 jiwa penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang buta huruf.

Tabel 5.12 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	L	%	P	%	Jumlah	%
Bogor Utara	666	96,94	21	3,05	687	100
Bogor Selatan	197	20,93	744	79,06	941	100
Bogor Timur	352	51,08	337	48,91	889	100
Bogor Barat	-	-	520	100	520	100
Bogor Tengah	20	3,73	515	96,26	535	100
Tanah Sareal	126	23,73	542	81,13	668	100
Bogor	1.361	33,68	2.679	66,31	4.240	100

Sumber: Disdikpora Kota Bogor 2009

Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis lebih banyak terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah, yaitu 1,23 persen atau masing-masing 744 jiwa dan 515 jiwa.

### 5.5 Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan alternatif bagi masyarakat yang menemui kesulitan mengakses layanan pendidikan formal. Pendidikan nonformal ini menurut Depdiknas (2008) merupakan pengganti, penambah, pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Tabel 5.13 Jumlah Penduduk Buta Huruf Peserta Keaksaraan Fungsional menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2009

Kecamatan	L	%	P	%	Jumlah	%
Bogor Utara	3	0,70	427	99,30	430	100
Bogor Selatan	-	0	440	100	440	100
Bogor Timur	16	3,48	444	96,52	460	100
Bogor Barat	-	0	390	100	390	100
Bogor Tengah	-	0	360	100	360	100
Tanah Sareal	-	0	450	100	450	100
Bogor	19	0,75	2.511	99,25	2.530	100

Sumber: Disdikpora Kota Bogor 2009

Upaya pemerintah Kota Bogor dalam memberantas buta aksara dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan nonformal, baik berupa pendidikan keaksaraan fungsional maupun Kejar Paket Umum (A, B dan C). Tampak pada Tabel 5.13 bahwa terdapat 2.530 penduduk Kota Bogor yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional. Di antara jumlah tersebut, pendidikan keaksaraan fungsional sangat dominan diikuti oleh penduduk perempuan, yaitu 2.511 jiwa atau sebesar 99,25 persen.

Warga laki-laki sangat minim mengikuti kegiatan ini, dan hanya ada 19 orang atau 0,75 persen (Tabel 5.11). Kendala yang dihadapi antara lain kesibukan dalam mencari nafkah, motivasi untuk belajar, dan pendekatan pembelajaran yang masih terbatas. Perlu ada inovasi pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik agar animo warga belajar atau calon warga belajar meningkat.

Selain menyelenggarakan keaksaraan fungsional, upaya Pemerintah Kota Bogor memberantas buta aksara adalah dengan mendorong penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket Umum (A, B dan C). Tabel 5.14 menunjukkan bahwa terdapat 5.498 jiwa penduduk yang mengikuti pendidikan Kejar Paket Umum ini. Di antara jumlah tersebut, kepesertaan pendidikan Kejar Paket Umum didominasi oleh penduduk perempuan, yaitu 5.074 jiwa.

Tabel 5.14 Jumlah Penduduk Peserta Kejar Paket Umum (A, B, dan C) menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2009

Kecamatan	Paket A		Paket B		Paket C		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Bogor Utara	3	37	25	193	17	193	468
Bogor Selatan	5	122	50	378	32	694	1.281
Bogor Timur	9	51	31	187	19	207	504
Bogor Barat	3	37	30	134	9	185	398
Bogor Tengah	8	55	39	829	35	769	1.735
Tanah Sareal	15	159	63	400	31	444	1.112
Bogor	43	461	238	2.121	143	2.492	5.498

Sumber: Disdikpora Kota Bogor 2009

## VI. PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN

### 6.1 Kesehatan dan Kualitas Hidup Manusia

Kesehatan merupakan faktor penting dalam penjaminan kualitas hidup manusia. Kualitas kesehatan perempuan, anak, dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara penandatanganan kesepakatan pencapaian tujuan pembangunan millenium pada tahun 2015. Tiga diantara pencapaian tujuan tersebut terkait langsung dengan aspek kesehatan, yaitu mengurangi angka kematian bayi; meningkatkan kesehatan ibu; dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Atas dasar itu, pembangunan kesehatan di Kota Bogor harus mampu mengurangi kematian bayi, peningkatan kesehatan ibu, dicegahnya penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan hidup sehat (BAPPEDA Kota Bogor dan BPS Kota Bogor 2009). Hasil SUSENAS 2007 memperlihatkan bahwa angka kesakitan penduduk Kota Bogor adalah 19,21 persen. Artinya, ada 19 orang diantara 100 orang penduduk yang mengeluh kesehatannya terganggu. Terdapat sekitar 54 persen penduduk Kota Bogor yang mengalami gangguan kesehatan kurang dari tiga hari. Asupan gizi, kondisi air minum, polusi, kondisi psikologis, dan perubahan cuaca yang drastis turut mempengaruhi kesehatan ibu, anak, dan keluarga.

Keterjaminan kesehatan ibu dan ayah, baik lahir maupun batin merupakan faktor penentu tumbuh kembangnya generasi penerus yang berkualitas. Sebagai misal, pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI)

eksklusif pada bayi. Di Kota Bogor, sebagian besar bayi disusui sampai dengan usia dua tahun (52,90%). Sekitar 16,67 persen menyusui sampai usia 1,5 tahun (Tabel 6.1). Tampak bahwa bermakna pemahaman para pihak tentang ASI Eksklusif perlu ditingkatkan. Tempat kerja perlu memberikan kesempatan yang cukup pada perempuan pekerja untuk menyimpan ASI atau penyediaan ruang menyusui. Idealnya, tempat kerja perlu memiliki Unit Pemeliharaan Bayi dan Anak, sehingga orang tua menjadi nyaman dalam bekerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin kesehatan dan keselamatan bayi dan anak.

Tabel 6.1 Persentase Batita yang Pernah Disusui menurut Jenis Kelamin dan Masa Menyusui Tahun 2007 – 2008 di Kota Bogor

Lama Disusui (bulan)	2007		Jumlah	2008		Jumlah
	L	P		L	P	
< 5	3,85	1,96	2,91	5,80	2,90	4,35
6 - 11	5,77	7,84	6,80	5,80	10,14	7,97
12 - 17	23,08	21,57	22,33	24,64	8,70	16,67
18 - 23	11,54	19,61	15,53	15,94	20,29	18,12
24+	55,77	49,02	52,43	47,83	57,97	52,90
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Bogor

Uraian lebih lanjut tentang profil gender bidang kesehatan ini difokuskan pada keselamatan bayi dan ibu saat kelahiran, penjaminan kesehatan ibu, dan upaya-upaya pencegahan penyebaran penyakit menular. Salah satu faktor terkait dengan keselamatan bayi dan ibu saat kelahiran adalah usia menikah pertama kali. Di Kota Bogor, masih ada sekitar 9,79 persen perempuan melangsungkan perkawinan pertama di bawah usia 15 tahun (Tabel 6.2) dan sekitar 45 persen perempuan usia 19 sampai dengan 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama.

Tabel 6.2 Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin dan Usia Perkawinan Pertama Tahun 2007 dan 2008

Usia Perkawinan Pertama (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
< 15	32.078	12,43	25.620	9,79
16	16.412	6,36	16.552	6,33
17-18	56.323	21,82	54.396	20,79
19-24	109.662	42,49	117.823	45,03
25+	43.641	16,91	47.292	18,07
Jumlah	258.116	100	261.683	100

Sumber: BPS Kota Bogor 2008

Memperhatikan data usia perkawinan perempuan di atas, perlu diupayakan kesiapan pasangan menikah. Kesiapan tersebut meliputi kematangan psikologis, kemampuan dalam tata kelola rumah tangga, dan pengetahuan tentang mendidik anak. Bimbingan dan konseling tentang kerumahtanggaan penting harus diikuti calon mempelai sebagai bekal membina rumah tangga.

## 6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Ada 24 buah puskesmas di Kota Bogor. Setiap kecamatan, memiliki paling banyak lima puskesmas, dengan penduduk terbanyak dan daerah terluas adalah Bogor Barat. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas di kecamatan, terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk yang dilayani, luas wilayah, dengan ketersediaan puskesmas.

Tabel 6.3. Sebaran Puskesmas di Tiap Kecamatan di Kota Bogor 2008

No	Kecamatan	Puskesmas (satuan)	Luas (hektar)	Jumlah Kelurahan	Penduduk (jiwa)
1	Bogor Selatan	4	28,61	16	176.094
2	Bogor Timur	2	10,15	6	91.609
3	Bogor Utara	3	17,72	8	161.562
4	Bogor Tengah	5	8,33	11	109.039
5	Bogor Barat	5	32,62	16	198.296
6	Tanah Sareal	5	21,07	11	168.532
Jumlah			118,50	68	905.132

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2007

Tabel 6.4 Data Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2007

Lembaga	Medis	Perawat & Bidan	Farmasi	Gizi	Keteknisan Medis	Sanitasi	Kesinas	Non Kesehatan	Jumlah
Diklat	1	18	0	1	0	0	6	32	58
Puskesmas, Pustu Polindes	109	199	13	24	13	24	3	0	385
Rumah Sakit	290	671	92	35	97	4	32	0	1221
Dinas Kota	14	7	7	1	1	3	17	50	100
Total	414	895	112	61	111	31	58	82	1764

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2007

### 6.3 Penolong Kelahiran Pertama di Kota Bogor

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor (2007) menyebutkan bahwa Angka kesuburan total (*Total Fertility Rate*) Kota Bogor pada tahun 2003 sampai dengan 2006 adalah 1,69 (tahun 2003-2005) dan 1,65 (tahun 2006). Dengan demikian rata-rata perempuan di Kota Bogor melahirkan satu sampai dua anak saja. Dalam kondisi seperti ini, sebuah keluarga dapat mengembangkan anaknya dengan lebih baik.

Pada dua tahun terakhir (2007 dan 2008), jumlah kelahiran dan jumlah kunjungan pertama ibu hamil ke puskesmas di Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 7,17 persen, dari 99,18 persen menjadi 92,01 persen (Tabel 6.5). Penurunan jumlah kunjungan ibu hamil ke puskesmas semakin meningkat pada kunjungan ke-4, dari 96,28 persen menjadi 84,27 persen atau mencapai 12,01 persen. Begitu juga dengan penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis mengalami penurunan, yaitu dari 86,95 persen menjadi 85,26 persen atau sebesar 1,69 persen. Sebaliknya, penolong kelahiran oleh tenaga dukun mengalami kenaikan dari 11,92 persen menjadi 12,05 persen atau sebesar 1,93 persen. Hal ini berkaitan dengan kemudahan ibu hamil mengakses layanan dukun daripada layanan medis. Selain hal tersebut, kemampuan masyarakat "bawah" membiayai kelahiran masih sangat terbatas, sehingga

mereka memilih melahirkan dibantu dukun, dengan biaya yang jauh lebih murah.

Tabel 6.5 Penolong Kelahiran pada Dua Tahun Terakhir di Kota Bogor

Tahun	Ibu Hamil					Penolong Kelahiran				
	Jumlah	K1	%	K4	%	Lahir	Medis	%	Dukun	%
2007	21.975	21.795	99,18	21.158	96,28	20.621	17.930	86,95	2.457	11,92
2008	21.589	19.865	92,01	18.193	84,27	21.587	18.406	85,26	2.601	12,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2008

Melihat kenaikan penolong kelahiran oleh dukun menunjukkan bahwa tenaga dukun masih dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah harus berupaya menurunkan jumlah ini. Sesuai dengan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan, bahwa pada tahun 2010, jumlah ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis harus lebih 85 persen dari jumlah persalinan. Lebih lanjut, pada tahun 2015 semua proses bersalin harus 100 persen ditangani oleh tenaga medis.

Kecamatan Bogor Barat memiliki jumlah ibu hamil jumlah paling banyak (4769 jiwa). Kunjungan pertama ibu hamil di Kecamatan bogor barat perlu ditingkatkan, karena kunjungan ibu hamil pertama kali di kecamatan ini paling rendah. Sebaliknya, Kecamatan Bogor Timur, jumlah ibu hamil paling sedikit (2.168 ibu hamil), tetapi jumlah K1 paling tinggi, yakni 104,06 persen (Tabel 6.6). Melihat persentase kunjungan pertama ibu hamil di Kecamatan Bogor Timur yang lebih dari 100 persen, berarti ada kesadaran masyarakat untuk secara dini memeriksakan kandungan. Selain itu, Puskesmas di Kecamatan Bogor Timur juga dikunjungi oleh ibu hamil yang berdomisili di daerah lain.

Penolong kelahiran pertama oleh dukun sangat tinggi di Kecamatan Bogor Selatan, yaitu dari 4.480 jumlah ibu melahirkan, sebanyak 943 kasus ditolong oleh dukun (21,05%). Dengan demikian, diperlukan

program khusus di Kecamatan Bogor Selatan agar proses persalinan yang dapat dilakukan oleh tenaga medis.

Tabel 6.6 Penolong Kelahiran per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	Ibu Hamil			Penolong Kelahiran		
	Jumlah	K1	K4	Lahir	Medis	Dukun
Bogor Barat	4.769	3.997	3.777	4.765	4.125	323
Bogor Timur	2.168	2.256	1.882	2.168	1.845	211
Bogor Selatan	4.480	3.932	3.618	4.480	3.340	943
Bogor Utara	3.927	3.954	3.766	3.927	3.350	413
Bogor Tengah	2.182	1.906	1.574	2.182	2.008	308
Tanah Sareal	4.063	3.820	3.576	4.065	3.738	403
Bogor	21.589	19.865	18.193	21.587	18.406	2601

K1: Kunjungan pertama, K4: Kunjungan Keempat  
 Sumber: Dinas Kesehatan kota Bogor 2008

### 6.4 Angka Kematian Ibu saat Hamil, Bersalin dan Nifas

Jumlah ibu yang meninggal saat hamil, bersalin, dan nifas dalam dua tahun (2007 dan 2008) mengalami penurunan. Dari 19.335 lahir hidup tahun 2007, sebanyak 7 ibu meninggal saat melahirkan. Angka ini turun menjadi 4 kasus dari 20.919 kelahiran (Tabel 6.7). Kasus ibu meninggal lebih banyak pada masa hamil. Hal ini menunjukkan bahwa ibu berisiko melahirkan tidak dapat pelayanan khusus.

Tabel 6.7 Angka Kematian Ibu Maternal saat Hamil, Bersalin dan Nifas Dua Tahun Terakhir

Kecamatan	Tahun 2007				Tahun 2008			
	Lahir Hidup	Hamil	Bersalin	Nifas	Lahir Hidup	Hamil	Bersalin	Nifas
Bogor Barat	3.493	3	1	0	4.490	0	0	0
Bogor Timur	1.623	1	0	0	2.140	0	1	0
Bogor Selatan	3.289	0	0	0	4.216	0	0	0
Bogor Utara	3.197	0	0	0	3.717	2	0	0
Bogor Tengah	4.283	0	1	0	2.147	0	0	1
Tanah Sareal	3.450	0	0	1	4.209	0	1	0
Bogor	19.335	4	2	1	20.919	2	1	1

Sumber: Data dari bagian perencanaan dan evaluasi Dinas Kesehatan, Oktober 2009

Departemen Kesehatan (2003) menyebutkan ada enam penyebab masih tingginya kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Penyebab tersebut berturut-turut adalah perdarahan (42 %), eklampsia (13 %), aborsi (11 %), infeksi (10 %), partus lama (9 %), dan lain-lain (15 %). Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2007 adalah eklampsia berat dan pendarahan (Tabel 6.8). Dalam kurun waktu enam tahun, mulai tahun 2001-2007, penyebab kematian ibu melahirkan paling banyak adalah eklampsia berat yang mencapai 29 persen. Selain itu, kematian ibu yang tidak diketahui penyebabnya juga tinggi, yakni 14,5 persen dari 69 kasus kematian.

Tabel 6.8 Kematian Ibu menurut Penyebab di Kota Bogor Tahun 2001-2007

Penyebab	Tahun							Jumlah	%
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
Eklampsia berat	4	3	3	1	2	5	2	20	29,0
Pendarahan	0	0	5	1	0	5	2	13	18,8
Ruptura uteri	10	1	1	0	0	0	0	12	17,4
Sakit Jantung	2	0	0	0	0	2	0	4	5,8
Kelainan darah	0	1	0	0	0	0	0	1	1,4
Antonia uteri	0	1	0	0	0	0	0	1	1,4
Partus lama	0	0	0	0	2	0	0	2	2,9
Infeksi	0	0	0	0	2	1	1	4	5,8
Dehidrasi	1	0	0	0	0	0	0	1	1,4
Emboli air Ketuban	0	0	0	0	0	1	0	1	1,4
Tidak Diketahui	5	1	0	0	4	0	0	10	14,5
Jumlah	22	7	9	2	10	14	5	69	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2008

Merujuk Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang Nomor 7/1984, khususnya Pasal 12 tentang Hak Kesehatan

Pemahaman masyarakat akan perawatan ibu hamil dan bayi baru lahir sudah cukup baik, namun kondisi sanitasi dan higienitas lingkungan sekitar masih belum terjaga dengan baik. Hal ini berdampak pada masih adanya kasus kematian bayi. Penyebab kematian bayi cukup beragam, mulai dari Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), gizi buruk, kelainan, dan terkena infeksi penyakit.

Tabel 6.10 Angka Kematian Bayi 2008

Kecamatan	Jumlah bayi		
	Lahir Hidup	Lahir Mati	Lahir+Mati
Bogor Barat	4.490	4	4.494
Bogor Timur	2.140	0	2.140
Bogor Selatan	4.216	1	4.217
Bogor Utara	3.717	6	3.723
Bogor Tengah	2.147	4	2.151
Tanah Sareal	4.209	2	4.211
Bogor	20.919	17	20.936

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2008

Terkait penjaminan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak (KIA), Departemen Kesehatan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota/ Pasal 2 SK Menkes tersebut menyatakan bahwa: (i) Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal; dan (ii) SPM pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan serta indikator kinerja dan target tahun 2010. Untuk mencapai target MDGs 2015, Departemen Kesehatan menetapkan akan menurunkan AKI sebanyak  $\frac{3}{4}$  dari kondisi tahun 1990 yaitu 100 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam pelayanan KIA, pemerintah daerah harus dapat mencapai indikator berikut:

- (a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (95%)

- (b) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan (90%)
- (c) Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100%)
- (d) Cakupan kunjungan neonatus (90%)
- (e) Cakupan kunjungan bayi (90%)
- (f) Cakupan BBLR yang ditangani (100%)

Untuk mengatasi kekurangan gizi pada bayi, indikator yang harus dicapai adalah (i) cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin (100%) dan (ii) Balita gizi buruk mendapat perawatan (100%).

Imunisasi bayi sangat penting untuk meningkatkan daya tahan bayi. Enam kecamatan di Kota Bogor telah memberikan enam jenis imunisasi (BCG, DPT1+HB1, DPT3+HB3, polio, campak, dan hepatitis). Dari jumlah bayi yang ada di Kota Bogor, pemberian imunisasi belum mencapai 100persen. Pencapaian imunisasi paling tinggi adalah imunisasi DPT1+HB1, yakni 93,83 persen. Pencapaian imunisasi paling rendah adalah hepatitis, yakni 73,68 persen. Imunisasi hepatitis di setiap kecamatan tidak lebih 87,64 persen, bahkan ada dua kecamatan (Bogor Selatan dan Bogor Tengah) pemberian imunisasi hepatitis kurang dari 60 persen. Ini artinya, perlu upaya lebih keras agar bayi lebih banyak yang mendapatkan imunisasi hepatitis. Perlu dikaji penyebab masih belum semua bayi mendapat imunisasi hepatitis. Pencapaian jumlah bayi yang diimunisasi per kecamatan dan per jenis imunisasi berbeda-beda. Bahkan, ada imunisasi pada satu kecamatan yang pencapaiannya lebih dari 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa yang diimunisasi di kecamatan itu tidak hanya bayi di sana, tetapi juga bayi dari daerah lain.

Tabel 6.11. Imunisasi Bayi 2008

Kecamatan	Jumlah Bayi		Imunisasi											
	BCG	%	DPT1+HB1	%	DPT3+HB3	%	Polio 4	%	Campak	%	Hepatitis	%		
Bogor Barat	4.290	93,92	4.059	94,61	3.759	87,62	3.596	83,82	3.912	91,19	3.416	79,63		
Bogor Timur	1.982	97,23	2.014	101,61	1.812	91,42	1.688	85,17	1.810	91,32	1.257	63,42		
Bogor Selatan	4.155	87,39	3.728	89,72	3.707	89,22	3.632	87,41	3.685	88,69	2.270	54,63		
Bogor Utara	3.593	96,80	3.533	98,33	3.293	91,65	3.259	90,70	3.436	95,63	3.149	87,64		
Bogor Tengah	1.961	88,37	1.705	86,95	1.632	83,22	1.517	77,36	1.662	84,75	1.123	57,27		
Tanah Sareal	3.814	91,45	3.535	92,69	3.310	86,79	3.277	85,72	3.481	91,27	3.369	88,33		
Bogor	19.795	92,38	18.574	93,83	17.513	88,47	16.969	85,72	17.986	91,27	14.584	73,68		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2008

## VII. PROFIL GENDER BIDANG SOSIAL, EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN PERTANIAN

### 7.1 Profil Gender Bidang Sosial Ekonomi dan Ketenagakerjaan

#### 7.1.1 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kota Bogor mayoritas penduduknya adalah suku Sunda, meskipun pada 20 tahun terakhir ada perubahan sosial budaya dengan semakin meningkatnya migrasi ke wilayah ini. Hingga saat ini, di kalangan masyarakat, masih berkembang stereotipe bahwa peran perempuan adalah di sektor domestik dan laki-laki berkiprah di sektor produktif (ekonomi). Perempuan lebih banyak dipandang sebagai subordinat kaum laki-laki, kompetensinya dalam memimpin cenderung dipertanyakan, dan dianggap lebih pas bergerak dalam kegiatan sosial, reproduktif, dan yang beresiko rendah.

Penghapusan stereotipe tentang peran gender dapat dilakukan melalui proses-proses pendidikan, sosial, dan politik. Pemerintah Kota Bogor, pegiat studi wanita di perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat menempuh pendekatan pendidikan dan sosial dalam upaya penghapusan stereotipe tersebut. Oleh PSW IPB misalnya, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sejak awal tahun 1980-an melalui berbagai kajian aksi dalam pemberdayaan perempuan. Saat ini, peran perempuan di Kota Bogor di bidang sosial ekonomi sangat berkembang.

Beberapa persoalan sosial ekonomi yang dibahas di sini adalah keluarga miskin, anak jalanan, dan ketenagakerjaan. Proporsi penduduk miskin terbanyak dijumpai di Kecamatan Bogor Utara, disusul Bogor

Selatan dan Tanah Sereal (Tabel 7.1). Pemerintah Kota Bogor sudah mengupayakan beberapa program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan, Pos Pemberdayaan Keluarga, Program Pemberdayaan Kelurahan dan sebagainya. Dari 905.132 jiwa penduduk Kota Bogor, terdapat 16,7 persen penduduk miskin (194.357 jiwa) pada tiap kecamatan. Jumlah Gakin terendah terdapat di Kecamatan Bogor Timur dengan proporsi 11,9 persen, dengan demikian penduduk miskin terendah juga terdapat di Kecamatan Bogor Timur dengan proporsi 10,4 persen. Perlu pengembangan kesadaran masyarakat untuk berbenah diri, mengupayakan kemandirian ekonomi, dan mengorganisasikan kelompok kesawadayaan untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas.

Tabel 7.1 Distribusi Penduduk Miskin di Kota Bogor Tahun 2007

Kecamatan	KK Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	KK Seluruhnya	Penduduk Seluruhnya	Proporsi %	
					Gakin	Penduduk Miskin
Bogor Selatan	7.197	31.004	35.517	163.266	20.6	19
Bogor Timur	5.284	22.448	35.187	151.562	15.0	14.6
Bogor Utara	11.016	45.399	41.753	198.296	26.3	23.2
Bogor Tengah	5.284	22.448	39.050	176.094	13.5	13.1
Bogor Barat	2.214	9.304	18.594	91.609	11.9	10.4
Tanah Sareal	3.659	16.536	24.256	109.039	15.9	15.6
Jumlah	41.398	173.968	194.357	905.132	21.3	16.7

Sumber: Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tahun 2007

Masalah anak jalanan di Kota Bogor juga memerlukan perhatian. Jumlah anak jalanan pada tahun 2002 hingga 2006 mengalami fluktuasi dan ada penurunan jumlah yang signifikan terjadi pada tahun 2004. Program penanganan anak jalanan pada tahun 2007 lebih difokuskan pada 241 anak yang tersebar di dua Rumah Perlindungan Anak Jalanan (RPAJ) yaitu Gesang dan Titian Mandiri. Untuk itu perlu ditingkatkan penanganan secara menyeluruh dari lintas sektor terkait.

Angka ketergantungan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2007 adalah 46,89 (Tabel 7.2). Berarti setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 47 penduduk tidak produktif (di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun). Dengan kata lain, dua orang berusia produktif menanggung satu orang yang tidak produktif.

Tabel 7.2 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Bogor, 2007

No	Kecamatan	Rasio Ketergantungan	Rasio Ketergantungan Penduduk Muda	Rasio Ketergantungan Penduduk Tua
1	Bogor Selatan	52,49	44,50	3,76
2	Bogor Timur	46,89	39,62	4,88
3	Bogor Utara	45,02	40,47	2,78
4	Bogor Tengah	40,31	31,00	5,33
5	Bogor Barat	45,25	38,25	3,61
6	Tanah Sareal	48,81	41,77	3,45
	Jumlah	46,94	39,68	3,67

Sumber: BPS Kota Bogor 2008

Secara umum kondisi pembangunan manusia di Kota Bogor pada tahun 2007, memperlihatkan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Melek Huruf (AMH) yang sudah cukup baik yaitu 68,6 tahun untuk AHH dan 98,7 untuk AMH. Yang masih perlu ditingkatkan adalah lama sekolah dan daya beli masyarakat. Rata-rata lama sekolah baru 9,6 tahun dan daya beli masyarakat sebesar Rp638 ribu. Dengan daya beli sebesar Rp638 ribu, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya secara memadai.

Di bidang ekonomi, indikator makro perekonomian diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jutaan rupiah. Terjadi peningkatan nilai PDRB Kota Bogor tahun 2007 dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2006 sebagaimana tersaji pada Tabel 7.3. Pendapatan per

kapita masyarakat Kota Bogor berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.945,50 dan berdasarkan harga konstan sebesar Rp.443,33.

Tabel 7.3 Perkembangan PDRB Kota Bogor Tahun 2006-2007

Tahun	Nilai PDRB (Rupiah)	
	Atas dasar harga yang berlaku	Atas dasar harga konstan
2006	7.257.742,09	3.782.273,71
2007	8.558.035,70	4.012.743,18

Sumber: BAPPEDA Kota Bogor dan BPS Kota Bogor, 2008

### 7.1.2 Ketenagakerjaan

Perbandingan antara lapangan pekerjaan yang terisi dibandingkan dengan yang terdaftar setiap tahun terjadi fluktuasi (Tabel 7.4) Persentase tertinggi lapangan pekerjaan yang terisi dibandingkan dengan yang terdaftar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 85,8 persen dan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 48,2 persen. Di sisi lain jumlah pengangguran di Kota Bogor pada tahun 2007 adalah sebanyak 34.466 orang. Hal ini memerlukan ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan beragam.

Tabel 7.4. Lowongan Pekerjaan Terdaftar dan Terisi Tahun 2002-2007

Tahun	Terdaftar			Terisi			%
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
2002	863	1072	1935	363	570	933	48.2
2003	1134	1396	2530	794	911	1705	67.4
2004	2438	3189	5627	2183	2647	4830	85.8
2005	1840	1759	3599	1555	1148	2703	75.1
2006	2425	3784	6209	1737	1386	3123	50.3
2007	1104	1444	2548	779	634	1413	55.5

Sumber: Disnaker Kota Bogor 2007

Ada sekitar 17288 pencari kerja dan 37 persennya adalah pencari kerja perempuan. Jumlah pengangguran laki-laki hampir dua kali lipat daripada pengangguran perempuan (Tabel 7.5) Hal ini berarti di Kota Bogor lapangan kerja terbatas dan perlu ada terobosan inovatif untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Persoalan pengangguran yang parah dapat berdampak pada timbulnya permasalahan sosial di Kota Bogor, seperti kriminalitas, *trafficking*, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 7.5: Jumlah Tenaga kerja dan Pengangguran di Kota Bogor Tahun 2008

Uraian	L	%	P	%	Jumlah
Pencari kerja	10780	62,36	6508	37,64	17288
Pengangguran	27633	61,30	17450	38,70	45083

Sumber: Dinas Sosial dan Tenagakerja Kota Bogor, 2009

Pencari kerja dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 hingga 2008 mengalami kenaikan (Tabel 7.6). Lowongan dari tahun 2005 ke 2006 dan 2007 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2008 mengalami penurunan. Dari jumlah lowongan yang ada tahun 2008, hanya 58,10% yang baru ditempatkan. Kalau dibandingkan antara pencari kerja tahun 2008 dengan penempatan, dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang terserap masih sedikit, yaitu baru 27,30%.

Tabel 7.6 Pencari kerja, Lowongan, dan Penempatan di Kota Bogor 2008

Data	Tahun			
	2005	2006	2007	2008
Pencari Kerja	9643	8865	7981	10709
Lowongan	3253	6209	6255	5033
Penempatan	2404	3120	3561	2924

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bogor 2008

Data pada Tabel 7.7 menunjukkan bahwa pencari kerja di bidang pertambangan hanya berjenis kelamin laki-laki. Namun, pada bidang pertanian dan kehutanan, pencari kerja lebih banyak perempuan dengan perbedaaan 0,3% dari laki-laki yang mencapai 49,7%. Jenis pekerjaan yang banyak diminati oleh pencari kerja adalah bidang pedagang besar dan eceran.

Pencari kerja berdasarkan pendidikan lebih banyak banyak lulusan SLTA, yaitu mencapai 2.572 orang (Tabel 7.8). Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,62% berjenis kelamin laki-laki. Dari jenjang pendidikan SD hingga Strata Dua, jumlah pencari kerja lebih banyak laki-laki, yakni rata-rata lebih dari 50%.

Tabel 7.7 Lapangan Usaha Utama dan Lowongan Pekerjaan Terpilah Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008

Lapangan Pekerjaan Utama	Terdaftar			Lowongan pekerjaan			Terpenuhi		
	L	%	P	Jumlah	L	%	P	%	Jumlah
Pertanian, kehutanan, Pertambangan dan penggalian	91	49,7	92	183	36	33,33	72	66,67	108
Industri pengolahan Listrik, gas dan air	174	51,63	163	337	150	82,87	31	17,13	181
Bangunan/konstruksi	0		0	0	0	0	0	0	0
Pedangan besar, enceran, Angkutan, pengudangan, dan komunikasi	1,240	50,47	1,217	2,457	887	49,11	919	50,89	1,806
Keuangan, asuransi, usaha, Jasa kemasyarakatan	220	64,52	121	341	90	77,59	26	22,41	116
	1,201	57,35	893	2,094	157	47,58	173	52,42	330
	940	51,25	894	1,834	415	48,82	435	51,18	850
<b>Jumlah</b>	<b>4,044</b>	<b>53,96</b>	<b>3,451</b>	<b>7,495</b>	<b>1,897</b>	<b>54,14</b>	<b>1,697</b>	<b>48,43</b>	<b>3,504</b>

Tabel 7.8 Lowongan Pekerjaan di Kota Bogor menurut Pendidikan Terpilih Jenis Kelamin pada Tahun 2008

Lulusan	Lowongan pekerjaan									
	Terdaftar			Terpenuhi						
	L	%	P	Jumlah	L	%	P	%	Jumlah	
Tidak tamat SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sekolah Dasar	20	62,50	12	37,50	32	18	47,37	20	52,63	38
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	360	62,72	214	37,28	574	115	60,53	75	39,47	190
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1302	50,62	1270	49,38	2572	573	50,53	561	49,47	1134
Diploma 1/ Diploma 2:	471	50,54	461	49,46	932	373	50,75	362	49,25	735
Diploma 3	899	57,22	672	42,78	1,571	379	49,87	381	50,13	760
Strata 1	960	54,48	802	45,52	1762	345	53,82	296	46,18	641
Strata 2	32	61,54	20	38,46	52	4	66,67	2	33,33	6
Strata 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4,044	53,96	3,451	46,04	7,495	1,807	51,57	1,697	48,43	3,504

Tabel 7.9 Lapangan Usaha, Kategori perusahaan, dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bogor Tahun 2008

KLUI	Jumlah Tenaga Kerja										Kategori Perusahaan																			
	Jumlah					Besar >100					Sedang (50-99)					Menengah (25-49)					Kecil (10-14)					Sangat Kecil (1-9)				
	Perusahaan	L	WNI	WNA	Jumlah	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK	Pers	TK					
Pertanian	6	141	205	0	346	1	238	1	83	0	0	1	12	3	13															
Pertambangan	5	21	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24															
Industri olah	162	1188	9780	10	10978	37	8830	10	503	29	776	53	716	33	153															
Listrik	9	1671	203	0	1874	5	539	3	224	0	0	1	11	0	0															
Bangunan	19	663	480	1	1144	3	549	4	264	6	233	5	76	1	22															
Perdagangan	400	7587	3936	36	11559	22	4341	38	2139	83	2189	133	2373	124	817															
Angkutan	25	965	128	0	1093	3	767	4	261	4	111	13	198	1	56															
Keuangan	99	4693	653	45	5391	16	3683	16	1229	12	368	22	335	33	276															
Jasa	133	3712	1983	36	5731	17	3285	10	721	23	739	47	710	36	276															
<b>Jumlah</b>	<b>858</b>	<b>20641</b>	<b>17371</b>	<b>128</b>	<b>38140</b>	<b>104</b>	<b>22232</b>	<b>86</b>	<b>5424</b>	<b>157</b>	<b>4416</b>	<b>275</b>	<b>4431</b>	<b>236</b>	<b>1637</b>															

Jenis perusahaan yang paling banyak di Bogor adalah perdagangan, yaitu 400 dari 858 usaha yang ada (Tabel 7.9). Jenis usaha yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah industri olah, yakni mencapai 89,09%. Sementara itu, jenis usaha yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki adalah perdagangan. Dari 400 usaha dan 11.559 orang tenaga kerja, sebanyak 65,64% adalah laki-laki.

Tabel 7.10 Jumlah Perusahaan dan jumlah tenaga kerja tahun 2008

Bulan	Jenis Usaha				Tenaga kerja				Jumlah	
	<25	25-49	50-99	>100	L		P		WNI	WNA
					WNI	WNA	WNI	WNA		
Januari	520	163	87	104	20894	108	17433	21	38327	129
Februari	520	162	87	104	20880	108	17425	21	38305	129
Maret	520	162	87	104	20880	108	17425	21	38305	129
April	520	162	87	104	20880	108	17425	21	38305	129
Mei	520	162	87	104	20880	108	17425	21	38305	129
Juni	520	162	87	104	20880	108	17425	21	38305	129
Juli	520	162	87	104	20880	108	17425	21	38305	129
Agustus	520	160	87	104	20836	108	17407	21	38243	129
September	520	159	87	104	20808	108	17397	21	38205	129
Oktober	514	157	86	104	20664	108	17372	21	38036	129
November	511	157	86	104	20641	107	17371	21	38012	128
Desember	511	157	86	104	20641	107	17371	21	38012	128

Jenis usaha paling banyak adalah usaha kecil, yakni 511 buah (Tabel 7.10). Jumlah ini mengalami penurunan dari 520 pada bulan Januari-Agustus dan menjadi 514 buah pada bulan November. Penurunan jumlah jenis usaha ini juga dialami oleh jenis usaha menengah dan sedang, yaitu dari 163 pada bulan Januari, pada bulan Desember menjadi 157 buah. Jumlah usaha besar tidak mengalami perubahan, jumlahnya dari Januari-Desember 2008 sebanyak 104 buah. Jumlah tenaga kerja yang terserap lebih banyak berjenis kelamin laki-laki ( 54,51%.)

### Jam Kerja di Perusahaan

Curahan jam kerja pekerja di perusahaan berkisar antara 7 sampai dengan 8 jam, tidak ada jam kerja yang melebihi 12 jam dalam sehari (Tabel 7.11). Upah yang diberikan kepada pekerja harus di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL Kota Bogor tahun 2009 adalah Rp893468/bulan dan tahun 2010 adalah Rp902720/bulan. Upah Minimum Kota Bogor tahun 2010 adalah Rp971200/bulan.

Tabel 7. 11 Penggunaan Jam Kerja

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah perusahaan	Tenaga kerja					Jumlah Jam Kerja		
		L	P	WNA	Anak	Jumlah	7	8	12
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	6	141	205	0	0	346	35	37	0
Pertambangan dan penggalian	5	21	3	0	0	24	25	20	0
Industri pengolahan	166	1,244	9,800	10	0	11,054	69	72	0
Listrik, gas, air	9	1,671	203	0	0	1,874	52	45	0
Bangunan/Konstruksi	17	655	465	1	0	1,121	52	35	0
Pedangan besar, enceran, rumah makan dan hotel	410	7,694	3,962	37	0	11,693	79	70	0
Angkutan, penggudangan, dan komunikasi	25	965	128	0	0	1,093	40	35	0
Keuangan, asuransi, usaha, persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	102	4,769	669	45	0	5,483	45	28	0
Jasa kemasyarakatan	133	3,712	1,983	36	0	5,731	71	65	0
Jumlah	873	20,872	17,418	129	0	38,419	875	407	0

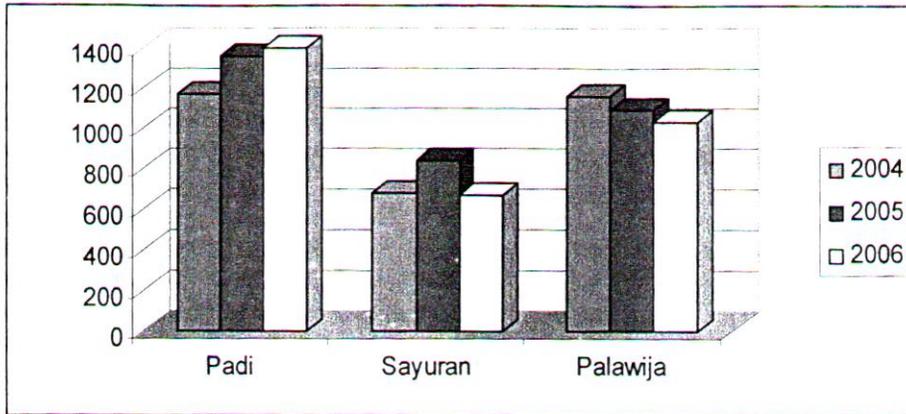
### 7.2 Profil Gender Bidang Pertanian

Sektor pertanian di Kota Bogor meliputi sub sektor tanaman Bahan Makanan (Tabama), sub sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan. Pertanian tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan,

sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman bahan makanan terdiri dari jenis padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Pembangunan sub sektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka usaha memperbaiki gizi masyarakat. Disamping itu juga untuk meningkatkan pendapatan peternak dan menciptakan komoditi yang baik bagi perkembangan industri ternak.

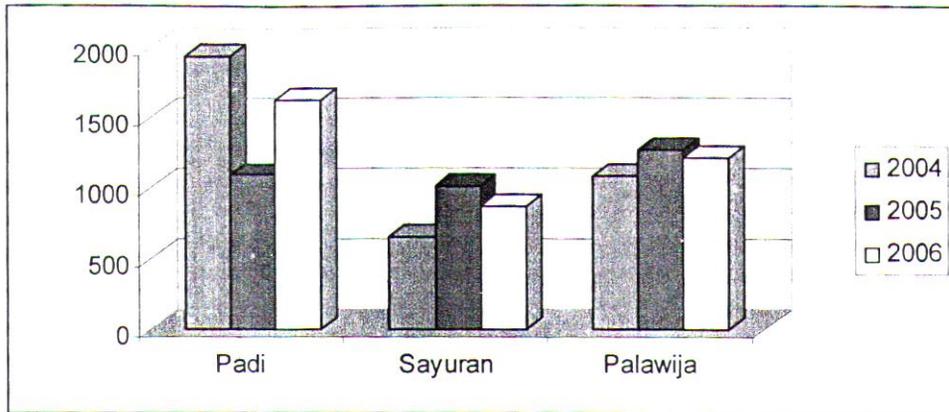
Produksi tanaman pangan di Kota Bogor semuanya termasuk supra insus dengan produksi 15.364,20 ton per tahun (Kota Bogor dalam Angka, 2008). Secara umum, baik tanaman bahan makanan, sayur-sayuran, dan palawija tidak mengalami peningkatan target, realisasi dan produksi yang cukup banyak. Ini berkaitan dengan wilayah sebagian besar Kota Bogor yang bukan merupakan wilayah produksi pertanian berbeda dengan wilayah kabupaten Bogor.

Target produksi padi dan sayuran 2005 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target produksi tahun 2004, sedangkan target produksi palawija mengalami penurunan. Penurunan target produksi sayuran terus terjadi sampai tahun 2006. Penurunan yang sama juga dialami oleh komoditas sayuran pada tahun 2006. penurunan target produksi pada sayuran dan palawija diikuti oleh penurunan realisasi dan pada akhirnya penurunan produksi riil. Berikut perbandingan target produksi padi, sayuran dan palawija di Kota Bogor tahun 2004, 2005, dan 2006.



Gambar 7.1. Perbandingan target produksi Tiga Komoditas Utama di Kota Bogor. Sumber: Kota Bogor dalam Angka, 2008

Target produksi tiga komoditas pertanian utama di Kota Bogor tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi. Pada tahun 2004 terjadi kenaikan dari target produksi padi pada realisasi produksi, namun terjadi penurunan dari target ke realisasi produksi sayuran dan palawija. Peristiwa sebaliknya terjadi pada tahun 2005. Penurunan realisasi dari target terjadi pada komoditas padi dan kenaikan terjadi pada komoditas sayuran dan palawija. Kenaikan realisasi dari target pada semua komoditas terjadi pada tahun 2006. Ini dapat terjadi ketika kenaikan realisasi dari target terjadi merata pada semua komoditas secara bersamaan tanpa adanya kenaikan yang sangat tinggi pada satu komoditas. Ini menunjukkan realisasi target produksi satu komoditas pertanian di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh realisasi komoditas yang lain. Realisasi yang sangat tinggi pada satu komoditas akan mengurangi realisasi komoditas lain. Gambaran realisasi produksi tiga komoditas utama di Kota Bogor dapat diamati pada Gambar 7.2.



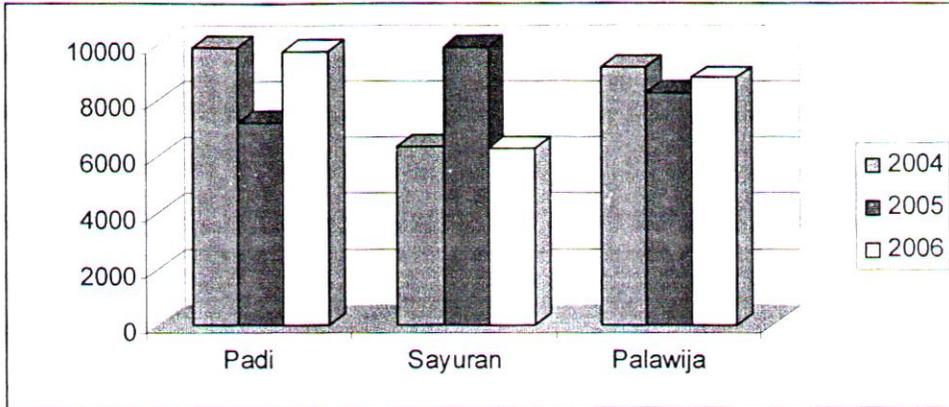
Gambar 7.2. Perbandingan Realisasi Produksi Tiga Komoditas Utama di Kota Bogor

Sumber: Kota Bogor dalam Angka, 2008

Produksi padi rata-rata di Kota Bogor tahun 2004, 2005 dan 2006 adalah 8975,3 ton per tahun. Jumlah ini dipengaruhi oleh penurunan produksi pada tahun 2005 yang cukup besar. Sejalan dengan fenomena pada hubungan target dan realisasi, penurunan produksi padi pada tahun 2005 disertai dengan kenaikan produksi sayuran yang cukup tinggi pada tahun 2005. Penurunan produksi padi ini sejalan dengan penurunan realisasi padi yang bertentangan dengan kenaikan target yang ditetapkan pada tahun 2005. Produksi yang cukup merata terjadi pada komoditas palawija. Fluktuasi target dan realisasi yang tidak terlalu menyebabkan produksi palawija di Kota Bogor relatif tidak fluktuatif. Gambaran produksi tiga komoditas utama di Kota Bogor dapat diamati pada Gambar 7.3.

Pembangunan sektor pertanian yang salah satunya meliputi peningkatan produksi komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor memerlukan tenaga-tenaga yang handal untuk menjalankan sektor pertanian. Kota Bogor telah memiliki kelompok tani yang terdiri dari kelompok wanita tani, kelompok tani dewasa dan kelompok taruna tani. Berdasarkan jumlah anggota, kelompok taruna tani merupakan

kelompok tani dengan jumlah anggota paling sedikit. Hanya ada dua kelompok taruna tani di Kota Bogor dengan anggota 40 orang.



Gambar 7.3 Perbandingan Produksi Tiga Komoditas Utama di Kota Bogor  
 Sumber: Kota Bogor dalam Angka, 2008

Peranan perempuan di sektor pertanian salah satunya dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam kelompok tani. Keterlibatan perempuan dalam kelompok tani menyebabkan perempuan dapat memperoleh akses pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan lahan yang juga diperoleh laki-laki melalui kelompok tani dewasa. Seperti yang lazim terjadi, perempuan banyak terlibat dalam sektor pertanian sebagai tenaga kerja pertanian untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan waktu yang banyak namun jarang terlibat dalam pengelolaan usaha tani secara utuh. Keterlibatan perempuan dalam kelompok tani membuka peluang perempuan untuk dapat mengelola usaha taninya sendiri.

Jumlah perempuan anggota kelompok wanita tani masih jauh di bawah jumlah laki-laki anggota kelompok tani dewasa (Tabel 7.12). Ini sejalan dengan jumlah kelompok wanita tani yang hanya 15 persen dari jumlah kelompok tani dewasa. Jumlah yang tidak berimbang ini terjadi pada hampir semua kecamatan di Kota Bogor, kecuali Bogor Tengah. Ada

tiga kelompok wanita tani di Bogor Tengah dengan 69 anggota dan hanya ada satu kelompok tani dewasa dengan 20 orang anggota.

Tabel 7.12. Jumlah Kelompok Tani dan Anggotanya menurut Jenis di Kota Bogor Tahun 2007

Kecamatan	Wanita Tani		Tani Dewasa		Taruna Tani	
	Kel.		Kel.		Kel.	
	Tani	Anggota	Tani	Anggota	Tani	Anggota
Bogor Selatan	10	230	45	1166	2	40
Bogor Timur	2	44	8	193	0	0
Bogor Utara	5	79	18	414	0	0
Bogor Tengah	3	69	1	20	0	0
Bogor Barat	3	60	60	1219	0	0
Tanah Sareal	4	110	39	996	0	0
<b>Kota Bogor</b>	<b>27</b>	<b>592</b>	<b>171</b>	<b>4008</b>	<b>2</b>	<b>40</b>

Sumber: Kota Bogor dalam Angka, 2008

Masih kurangnya jumlah kelompok wanita tani perlu mendapat perhatian dari Dinas Pertanian Kota Bogor. Luas lahan yang direalisasikan menjadi area pertanian untuk padi, palawija dan sayuran di Kota Bogor hanya 4301 ha dan produksi total 30.542,58 ton. Jumlah ini tentunya tidak cukup mendatangkan hasil yang memadai bagi rumah tangga tani jika dijual dalam bentuk bahan mentah. Pengembangan kelompok wanita tani terutama dalam pengolahan pasca panen sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

## VIII. PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan merupakan indikasi semakin luasnya ruang partisipasi perempuan dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Partisipasi perempuan di bidang politik terus ditingkatkan untuk mendorong perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik ini telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia dan dunia Internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1979 dengan mengesahkan Undang-undang No. 7/1984. Pasal 7 Undang-Undang No.7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW mewajibkan negara untuk melakukan langkah-langkah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik dan publik, pengakuan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam politik.

Implikasi dari implementasi Undang-undang No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW tersebut adalah menegaskan hak dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam setiap bidang pembangunan termasuk politik dan pemerintahan. Diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin merupakan pelanggaran hak asasi yang harus dihapuskan.

Khusus di bidang politik, telah ditetapkan pula UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mensyaratkan keterwakilan perempuan di DPR sampai

30 persen. Ini diharapkan dapat membuka kesempatan keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan.

Selaras dengan upaya peningkatan partisipasi di bidang politik, peningkatan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan terus diupayakan. Di tingkat presiden, Indonesia pernah satu kali dipimpin oleh presiden perempuan dari enam presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Di tingkat menteri, jumlah menteri perempuan di kabinet terus meningkat setiap periode. Jumlah menteri perempuan di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014 merupakan jumlah terbanyak dengan empat menteri perempuan. Hal ini seharusnya diikuti dengan peningkatan jumlah perempuan yang menjadi pejabat di tingkat eselon 1 dan 2.

### **8.1 Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik**

Indonesia pada tahun 2008 merupakan negara dengan nilai *Gender Empowerment Measure* (GEM) termasuk kategori menengah. Ini berarti masih banyak diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang-bidang publik termasuk dalam bidang politik. Salah satu indikator GEM adalah jumlah perempuan yang duduk di kursi DPR. Pada tahun 2008, 11,3 persen perempuan menduduki kursi di DPR/MPR. Ini masih jauh di bawah tuntutan undang-undang yang mensyaratkan 30 persen jumlah perempuan di DPR/MPR.

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Bogor pada periode 2009-2014 adalah 8 orang dari 45 orang anggota DPRD atau 17,8 persen dari seluruh anggota DPRD. Angka ini di atas angka rata-rata nasional meskipun masih di bawah 30 persen.

### 8.1.1 Keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden

Jumlah perempuan yang dapat menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan jumlah pemilih. Pada pemilu legislatif (Pileg) tahun 2009, jumlah pemilih perempuan di Kota Bogor berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki. Ini menunjukkan masih kurangnya kecenderungan pemilih perempuan untuk memilih perempuan sebagai wakilnya di DPRD.

Tabel 8.1 Jumlah Pemilih pada Pemilihan Legislatif Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bogor, 2009

Kecamatan	Jumlah Pemilih Terdaftar (jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bogor Utara	52.090	52.548	104.638
Bogor Selatan	59.570	56.893	116.463
Bogor Timur	32.359	32.051	64.410
Bogor Barat	68.457	67.941	136.398
Bogor Tengah	37.924	36.306	74.230
Tanah Sereal	62.005	60.778	122.783
<b>Jumlah</b>	<b>312.405</b>	<b>306.517</b>	<b>618.922</b>

Sumber: KPU Kota Bogor, 2009

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan berimbang di seluruh wilayah kecamatan di Kota Bogor. Ini menunjukkan pemilih di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) memiliki komposisi pemilih laki-laki dan perempuan yang hampir sama. Akan tetapi di Kecamatan Tanah Sereal, Bogor Barat, dan Bogor Selatan, jumlah pemilih perempuan yang terdaftar lebih rendah daripada pemilih terdaftar laki-laki.

Dari sisi kesadaran untuk memilih, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Data Pemilu Legislatif menunjukkan, jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih berimbang antara laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan lebih memiliki kesadaran untuk menggunakan hak suara. Perempuan yang menggunakan hak pilih tercatat 50,5 persen atau 0,5 persen lebih banyak daripada laki-laki yang menggunakan hak pilih. Begitupula dengan jumlah pemilih perempuan terdaftar di DPT yang tidak menggunakan hak pilih. Pemilih laki-laki yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 53,6 persen atau 7,2 persen lebih tinggi daripada jumlah pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak suara.

Tabel 8.2 Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilu Legislatif Kota Bogor 2009

Uraian	Jumlah Pemilih					
	L	%	P	%	Jumlah	%
Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih	312,35	50,47	306,57	49,53	618,92	100
Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih	232,95	49,49	237,74	50,51	470,69	100
Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	79,40	53,57	68,83	46,43	148,24	100

Sumber: Diolah dari Data KPU Kota Bogor, 2009

Data yang sama terjadi untuk pemilu pemilihan presiden (Pilpres). Jumlah pemilih perempuan hampir berimbang dengan pemilih laki-laki dengan perbedaan jumlah pemilih perempuan lebih kecil 0,4 persen dari pemilih laki-laki.

Tabel 8.3 Jumlah Pemilih pada Pemilihan Presiden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bogor, 2009

Kecamatan	Jumlah Pemilih		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bogor Utara	55.460	56.149	111.609
Bogor Selatan	61.767	59.391	121.158
Bogor Timur	33.740	33.066	66.806
Bogor Barat	72.423	71.809	144.232
Bogor Tengah	39.522	37.852	77.374
Tanah Sereal	63.733	62.639	126.372
<b>Jumlah</b>	<b>326.645</b>	<b>320.906</b>	<b>647.551</b>

Sumber: KPU Kota Bogor, 2009

Kesadaran untuk memilih dalam Pilpres sama dengan Pileg. Pemilih perempuan lebih banyak menggunakan hak pilih daripada pemilih laki-laki. Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih 50,6 persen atau 0,6 persen lebih tinggi daripada pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilih. Begitupula dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Jumlah pemilih laki-laki yang tidak menggunakan hak pilih ada 55,6 persen dari seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau 11,2 persen lebih banyak daripada jumlah pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak pilih.

Tabel 8.4 Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih berdasarkan jenis Kelamin pada Pemilihan Presiden Kota Bogor 2009

Uraian	Jumlah Pemilih					
	L	%	P	%	Jumlah	%
Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap	326.645	50,44	320.906	49,56	647.551	100
Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih	263.081	49,34	270.103	50,66	533.184	100
Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	63.564	55,58	50.803	44,42	114.367	100

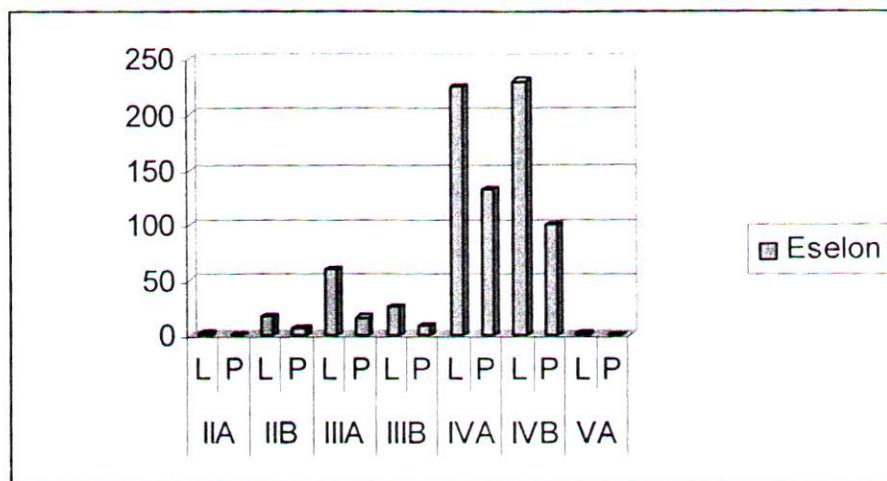
Sumber: Diolah dari KPU Kota Bogor 2009

Data-data yang ada menunjukkan partisipasi politik perempuan sebagai pemilih telah tinggi namun belum diimbangi dengan partisipasi politik perempuan sebagai anggota DPRD. Persentase jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD dapat ditingkatkan terutama dengan besarnya jumlah pemilih perempuan. Ini menuntut kesadaran bersama bagi perempuan pemilih untuk mendorong peran perempuan lain dalam perumusan kebijakan di Kota Bogor.

## 8.2 Partisipasi Perempuan di Pemerintahan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bogor berimbang antara PNS laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2009 tercatat ada 4777 orang PNS laki-laki atau 51,4 persen dan 4520 PNS perempuan atau 48,6 persen. Jumlah ini menunjukkan dari jumlah keseluruhan PNS, tidak ada diskriminasi peluang antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi PNS di pemerintahan daerah Kota Bogor. Namun, jumlah ini tidak merepresentasikan keseimbangan jumlah laki-laki

dan perempuan yang bisa masuk dalam eselon. Gambar di bawah ini menunjukkan jumlah perempuan yang dapat masuk menjadi pejabat eselon tidak sebanding dengan jumlah laki-laki yang masuk menjadi pejabat eselon.



Gambar 8.1 Capaian Eselon Pegawai Pemerintah Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data kepegawaian Pemerintah kota Bogor per 1 Oktober 2009

Tercatat tidak ada perempuan yang menjadi pejabat eselon IIB atau Sekertaris Daerah dan hanya enam perempuan yang menjadi pejabat eselon II B atau setingkat kepala Dinas, Kepala Badan dan asisten. Sementara itu, ada 17 laki-laki yang menjadi pejabat eselon IIB. Hal sama juga terdapat pada pejabat eselon III A atau setingkat camat, kepala kantor, kepala bagian dan sekretaris bagian dan III B atau setingkat Kepala Bidang dan Sekretaris Camat. Terdapat 60 orang PNS laki-laki dan 16 PNS perempuan yang dapat menjadi pejabat eselon III A dan 25 laki-laki serta 8 perempuan yang menjadi pejabat eselon III B.

Pada pejabat setingkat IV A atau Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi di kecamatan dan lurah ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan juga terjadi. Dari 358 pejabat eselon IV A, 225 di antaranya adalah laki-laki dan hanya 133 orang

perempuan. Komposisi yang sama juga terjadi pada pejabat eselon IV B. Pada pejabat setingkat sekretaris lurah dan kepala seksi di kelurahan tersebut, perempuan hanya ada 100 orang dari 330 orang pejabat.

Data pejabat eselon di atas menunjukkan kurang dari 32 persen pejabat eselon di Kota Bogor adalah perempuan. Jumlah tersebut hanya meliputi 5,8 persen dari jumlah PNS perempuan di Kota Bogor. Bandingkan dengan PNS laki-laki yang 11,7 persen dari keseluruhan PNS dapat menjadi pejabat eselon. Ini menunjukkan peluang laki-laki untuk menjadi pejabat eselon lebih besar dari pada peluang perempuan untuk menjadi pejabat eselon.

Hal yang menarik dari Gambar 8.1, yaitu pada setiap jenjang eselon, rata-rata jumlah pejabat perempuan setengah dari jumlah pejabat laki-laki. Pada eselon-eselon tertentu yang hanya diduduki oleh satu orang pejabat seperti pejabat eselon II A dan V A, pejabat yang mendudukinya adalah laki-laki. Ini menunjukkan pada setiap jenjang jabatan, peluang perempuan untuk menjadi pejabat sama sulitnya.

### **8.2.1 Keterlibatan Perempuan dalam Partai Politik dan Organisasi Sosial Masyarakat**

Keterlibatan perempuan di dalam partai politik dan organisasi masyarakat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi ketua dan pengurus inti dari partai politik, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan organisasi masyarakat di Kota Bogor. Data tentang kepemimpinan partai politik, LSM dan organisasi masyarakat diperoleh dari Kantor Kesbanglinmas Kota Bogor.

Keterlibatan perempuan dalam partai politik belum menunjukkan peran yang penting. Berdasarkan data partai yang

terdaftar secara resmi di Kantor Kesbanglinmas Kota Bogor, dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004 hanya dua partai politik yang diketuai oleh perempuan. Begitu pula pada tahun 2008, dari 38 partai politik yang terdaftar hanya tiga partai politik yang diketuai oleh perempuan.

Tabel 8.5. Nama Partai dan Jenis Kelamin Ketua Partai di Kota Bogor Tahun 2004

No	Nama Partai	Jenis Kelamin Ketua Partai
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	P
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	L
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	L
4	Partai Merdeka	L
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	L
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)	P
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)	L
8	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK)	L
9	Partai Demokrat	L
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP)	L
11	Partai Penegak Indonesia	L
12	Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNU)	L
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	L
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	L
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	L
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	L
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	L
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	L
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	L
20	Partai Golongan Karya (Golkar)	L
21	Partai Patriot Pancasila	L
22	Partai Sarikat Indonesia	L
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	L
24	Partai Pelopor	L

Sumber: Kesbanglinmas Kota Bogor, 2010

Tabel 8.5. menunjukkan hanya Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang diketuai oleh perempuan. Hal yang hampir sama terjadi pada tahun 2008 (Tabel 8.6). Hanya Partai Bela Negara (PBN), Partai

Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Pembaruan yang diketuai oleh perempuan. Dua partai yang pada tahun 2004 diketuai oleh perempuan tidak terdaftar lagi dalam daftar partai politik peserta pemilu di Kota Bogor.

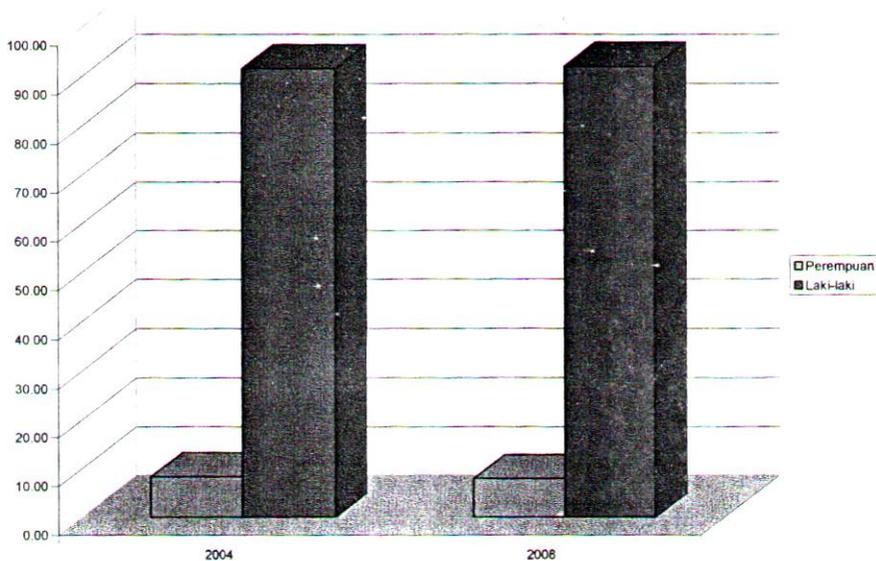
Data pada Tabel 8.5 dan 8.6 tidak menunjukkan perubahan keterlibatan perempuan sebagai ketua partai politik di Kota Bogor. Gambaran lebih jelas dapat diamati pada Gambar 8.2. Pada Gambar tersebut tampak tidak ada perubahan perbandingan jumlah ketua partai berjenis kelamin laki-laki dan ketua partai berjenis kelamin perempuan antara tahun 2004 dan tahun 2008.

Tabel 8.6. Nama Partai dan Jenis Kelamin Ketua Partai di Kota Bogor Tahun 2008

No	Nama Partai	Jenis Kelamin Ketua Partai
1	DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	L
2	DPC Partai Bela Negara (PBN)	P
3	DPD Partai Karya Pembangunan Bangsa (PKPB)	L
4	DPC Partai Bulan Bintang (PBB)	L
5	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	P
6	DPC Partai Indonesia Sejahtera	L
7	DPC Partai Bhakti Putra Nusantara (BHARATA)	L
8	DPC Partai Kedaulatan (PK)	L
9	DPD Partai Parade Nusantara	L
10	DPD Partai Kerakyatan Nasional (PKN)	L
11	DPC Partai Kemakmuran Rakyat	L
12	DPC Partai Patriot	L
13	DPC Partai persatuan Nasional (PPN)	L
14	DPK Partai Perserikatan rakyat (PPR)	L
15	DPC partai gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	L
16	DPC Partai nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)	L
17	DPC Partai Syarikat Islam Indonesia	L
18	DPK Partai Solidaritas Nasional	L
19	Partai Matahari Bangsa	L
20	DPD Partai Pemersatu Bangsa (PPB)	L
21	DPC Partai Penyelamat Anak Bangsa (PPAB)	L
22	DPC Partai Persatuan Daerah	L
23	Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR)	L

No	Nama Partai	Jenis Kelamin Ketua Partai
24	Partai Barisan Nasional	L
25	DPD Partai Reformasi	L
26	Partai Persatuan Serikat Indonesia (PPSI)	P
27	Partai Demokrasi Pembaruan	L
28	DPK Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	L
29	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	L
30	DPD Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA)	L
31	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)	L
32	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	L
33	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	L
34	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	L
35	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	L
36	DPD Partai Demokrat	L
37	DPC Partai Damai Sejahtera (PDS)	L
38	DPC Partai Buruh	L

Sumber: Kesbanglinmas Kota Bogor, 2010



Gambar 8.2 Perbandingan Jumlah Ketua Partai Berjenis Kelamin Laki-laki dan Ketua Partai Berjenis Kelamin Perempuan Tahun 2004 dan Tahun 2008

Sumber: Kesbanglinmas Kota Bogor, 2009

Hal yang sama juga terjadi pada peranan perempuan dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dari 41 LSM yang ada di Kota Bogor, hanya empat yang menempatkan perempuan sebagai ketua.

Posisi sekretaris yang biasanya dipersepsikan sebagai pekerjaan perempuan pun hanya terdapat di tujuh LSM dan hanya bendahara yang mencapai 16 LSM.

Tabel 8.7. Nama LSM dan Pengurus Terpilih Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008

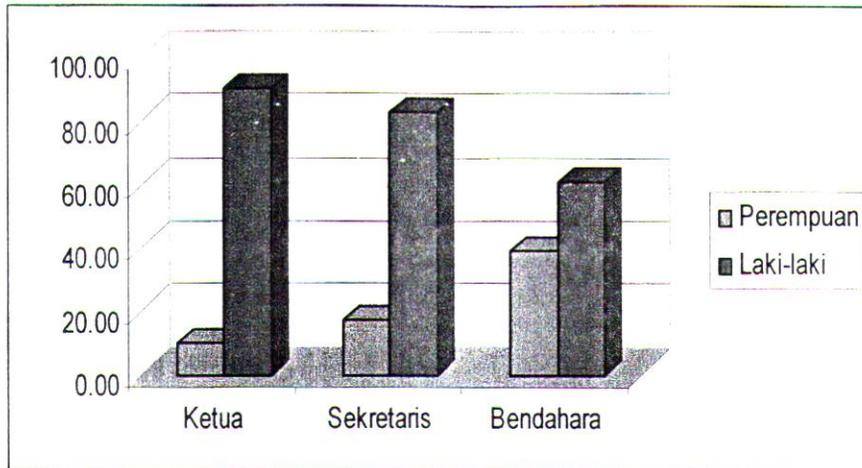
No	Nama LSM	Pengurus Berdasarkan Jenis Kelamin		
		Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	LSM lembaga bersama untuk Membangun Indonesia (BUMI)	L	L	L
2	LSM PRATISTA	P	P	P
3	LSM Lembaga Komunikasi Pengembangan Masyarakat (LKPM)	L	L	L
4	LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan aplikasi teknologi CREATE	L	L	L
5	LSM Forum Keluarga Peduli Bogor (FKPB)	L	L	P
6	LSM Lembaga Koordinasi Pemberantasan Penanggulangan Pencegahan Narkotika	L	P	L
7	LSM The Indonesian Resource Institut (INDRI)	P	P	L
8	LSM Rikan Subaya	L	L	L
9	LSM Tahisane Media Watch	L	L	P
10	LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	P	L	P
11	LSM Riambauan Mandiri	L	L	L
12	LSM Lembaga Metropol Indonesia (LMI)	L	L	P
13	LSM Komite Pemantau Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah (KOMPTRAS)	L	L	L
14	LSM Bina Sarana Mandiri (BISMA)	L	L	L
15	LSM Paguyuban Pasundan Cab. Kota Bogor	L	L	P
16	LSM Komunitas Pemuda Peduli dan Kreatifitas (KOMPPAS)	L	L	L
17	LSM Lembaga Kajian Ekonomi dan Politik (LKEP)	L	P	L
18	LSM Badan Sosial Lintas Agama (BASOLIA)	L	L	L
19	LSM Komunitas Perlindungan Pendidikan Anak Yatim dan Kaum Duafa Nasional (KOMPAKNAS)	L	L	P
20	LSM Oi Crisis Center	L	L	L
21	LSM Lembaga Analisis, Studi dan Kajian Publik (LANSKIP)	L	L	P
23	LSM Barisan Rakyat Bogor (BARAK-B)	L	L	L
22	LSM Konsorsium Peduli Bogor (KPB)	L	L	L

No	Nama LSM	Pengurus Berdasarkan Jenis Kelamin		
		Ketua	Sekretaris	Bendahara
21	LSM Lembaga Analisis, Studi dan Kajian Publik (LANSKIP)	L	L	P
23	LSM Barisan Rakyat Bogor (BARAK-B)	L	L	L
22	LSM Konsorsium Peduli Bogor (KPB)	L	L	L
24	LSM lembaga Penguatan Masyarakat Madani	L	L	L
25	LSM Aliansi Organik Indonesia	L	P	P
26	LSM Center Development For Indonesian People (CENDEVIP)	P	L	L
27	Lembaga Kajian Masyarakat (LEKAT)	L	L	P
28	Pengurus Daerah Dewan Nasional '66	L	L	P
29	LSM Swadya Masyarakat Inayatullah	L	L	L
30	LSM Bogor Raya Institut	L	L	L
31	LSM Komunitas Perlindungan Pendidikan Anak Yatim dan Kaum Duafa Nasional (KOMPAKNAS)	L	L	L
32	LSM Perhimpunan Masyarakat Demokrasi Indonesia Mandiri (Permadi-M)	L	P	L
33	LSM Lembaga Pengkajian Pemantapan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan (LPSPMP)	L	P	P
34	LSM Perkumpulan Matoes Albaris	L	L	P
35	Lembaga Studi dan Pengembangan Ketenagakerjaan "EKISIS"	L	L	L
36	LSM Komunitas Persada Etnika	L	L	P
37	LSM Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia (IPPKIndo)	L	L	L
38	LSM Jaringan Insan Mandiri (JIM)	L	L	L
39	LSM Paguyuban Anak Guru (PAGU)	L	L	L
40	LSM Peduli Mutu Kesehatan Bogor Raya (PMKBR)	L	L	P
41	Asosiasi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN)	L	L	P

Sumber: Kesbanglinmas Kota Bogor, 2009

Perbandingan yang lebih jelas terhadap pengurus inti LSM berdasarkan jenis kelamin dapat diamati pada Gambar 8.3. Gambar tersebut menunjukkan laki-laki masih lebih banyak dipilih sebagai ketua, sekretaris dan bendahara daripada perempuan. Perbedaan

yang sangat mencolok ini menunjukkan perempuan masih kurang dipercaya untuk menduduki posisi penting di LSM.



Gambar 8.3 Perbandingan Persentase Pengurus Inti LSM Berdasarkan jenis Kelamin

Sumber: Kesbanglinmas Kota Bogor, 2009

Bendahara merupakan posisi yang paling banyak diduduki oleh perempuan. Ada 39,02 persen LSM yang mempercayakan posisi bendahara pada perempuan. Posisi bendahara ini lebih tinggi daripada posisi sekretaris yang hanya 17,07 persen.

Mengacu pada data di Tabel 8.7 hanya LSM Pratista yang seluruh pengurus inti LSM berjenis kelamin perempuan. LSM Pratista adalah LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Ini menunjukkan baru LSM yang khusus bergerak untuk perempuan yang memiliki pengurus inti perempuan semua.

Namun, tiga dari empat LSM yang memiliki ketua berjenis kelamin perempuan hanya LSM Pratista yang khusus bergerak dalam bidang perlindungan perempuan. Tiga LSM lain merupakan LSM yang bergerak dalam bidang umum seperti LSM The Indonesian Resource Institute (INDRI), LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT),

dan LSM Center Development for Indonesian People (CENDEVIP). Ini menunjukkan pada beberapa LSM perempuan dipercaya menjadi pemimpin meskipun bukan pada bidang yang khusus menangani masalah-masalah perempuan.

Hal yang hampir sama terdapat pada keterlibatan perempuan dalam organisasi masyarakat. Dari 36 organisasi masyarakat yang ada di Kota Bogor, hanya empat yang memiliki ketua berjenis kelamin perempuan, tujuh organisasi dengan sekretaris perempuan dan 11 dengan bendahara perempuan.

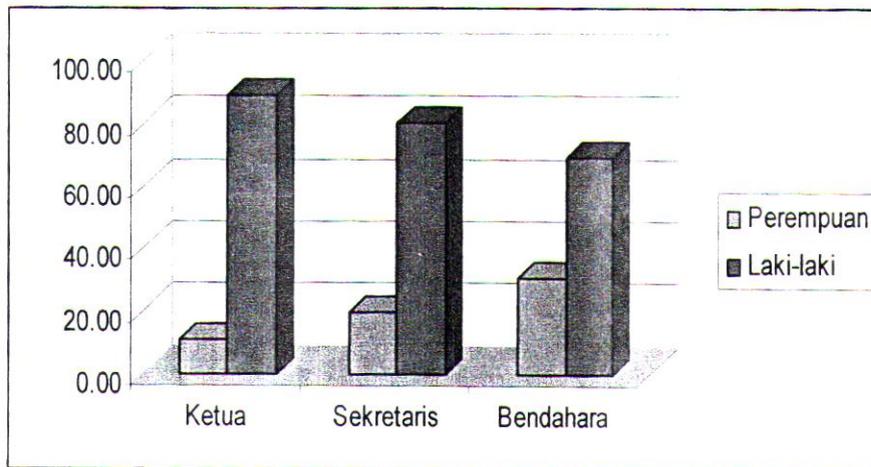
Tabel 8.8 Nama Organisasi Masyarakat dan Pengurus Terpilah Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2008

No	Nama Organisasi Masyarakat	Pengurus Berdasarkan Jenis Kelamin		
		Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	Mahasiswa Pancasila Kota Bogor	L	P	P
2	Banteng Pajajaran	L	L	L
3	Paguyuban Klub Motor Bogor (PAKEMB)	L	L	L
4	Kedung Halang Scooter Club Bogor	L	L	L
5	Masyarakat Anti Prostitusi, Perjudian dan dan Narkotika (MAPPAN)	L	L	P
6	Paguyuban Pensiunan Pegawai Pemerintah Kota Bogor (P4KB)	L	L	L
7	Paguyuban Sunda Bogor Raya (PSBR)	L	L	L
8	Soka GAKKAI Indonesia Kota Bogor	P	P	P
9	Pejuang Siliwangi Bogor	L	L	L
10	Persatuan Guru dan Dosen Swasta Republik (PGSRI)	L	P	P
11	Benteng Bogor Raya (BBR)	L	L	L
12	Forum Masyarakat hative Ambon	L	L	P
13	Gerakan manusa Pancasila	L	P	L
14	Family Thunder Bogor (FATHER)	L	L	L
15	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO)	L	L	P
16	Harakah Sunniah untuk Masyarakat Islam HASMI)	L	L	L
17	BANSISKOM KAMTIBMAS	L	L	L
18	Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada dan Pemilu (GMPP)	L	L	L
19	Barisan Indonesia Kota Bogor (BARINDO)	P	L	L
20	DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (SPPSI) Kota Bogor	L	L	L
21	Saksi-saksi Yehuwa Indonesia (SSYI)	L	L	L
22	Komunitas Pasir Kuda-Pasir Jaya-Pasir Mulya (KOMPPASS)	L	L	L
23	Perkumpulan Keluarga Besar Warga Bogor (P-KBWB)	L	L	L

No	Nama Organisasi Masyarakat	Pengurus Berdasarkan Jenis Kelamin		
		Ketua	Sekretaris	Bendahara
24	Keluarga Besar Putra-putri Polri (KBPPP)	L	L	L
25	Perempuan Peduli Bangsa (P2B)	P	P	P
26	Angkatan Muda Nasional Indonesia (AMNI)	L	L	L
27	Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PPPOLRI) Cabang Kedung Halang	L	L	P
28	Benteng Bogor Raya (BBR)	L	L	P
29	Serikat Pekerja Listrik Indonesia (SPLI) DPW Kota-Kabupaten Bogor	L	L	L
30	Gerakan nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (GAPENTA)	L	L	L
31	Perhimpunan Inti (Perhimpunan Indonesia Tionghoa)	L	L	L
32	Paguyban Warga Banten di Bogor (Pawarten Bogor)	L	L	P
33	Ikatan Guru Raudhatul Athfal	P	P	P
34	Persaudaraan Wartawan (PEWARTA)	L	L	L
35	Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)	L	P	L
36	Laskar Ampera Arief Rahman Hakim Angkatan 66 DPD Kota Bogor	L	L	L

Sumber: Kesbanglinmas Kota Bogor, 2009

Gambar 8.4 Perbandingan Persentase Pengurus Inti Organisasi Masyarakat Berdasarkan jenis Kelamin



Sumber: Kesbanglinmas Kota Bogor, 2009

Perbandingan jumlah pengurus yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki lebih jelas dapat diamati pada Gambar 8.4. Gambar ini memiliki pola yang sama dengan Gambar 8.3. Ini

menunjukkan keterlibatan perempuan yang sama dalam LSM maupun dalam organisasi masyarakat.

Data pada Tabel 8.7 menunjukkan ada tiga organisasi masyarakat yang memiliki ketua, sekretaris dan bendahara perempuan. Ketiga organisasi masyarakat tersebut adalah Ikatan Guru Raudhatul Athfal, Perempuan Peduli Bangsa (P2B) dan Soka Gakkai Indonesia Kota Bogor. Kecuali organisasi P2B, Ikatan Guru Raudhatul Athfal dan Soka Gakkai Indonesia merupakan organisasi yang tidak secara khusus menangani masalah-masalah seputar perempuan. Ini berbeda dengan data LSM dan hanya LSM yang khusus membidangi perlindungan perempuan yang memiliki pengurus inti perempuan semua.

Berdasarkan data-data kepengurusan di partai politik, LSM dan organisasi masyarakat, keterlibatan perempuan sebagai pengurus inti masih jauh di bawah laki-laki. Posisi ketua paling sedikit diduduki oleh perempuan disusul oleh posisi sekretaris dan bendahara. Ini menunjukkan masih diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik, LSM, dan organisasi masyarakat.

## IX. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

### 9.1 Kekerasan terhadap Perempuan

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Dalam setiap kasus kekerasan, seringkali tidak hanya berdampak secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi pada perempuan, namun juga keutuhan martabat perempuan sebagai manusia telah terampas. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Deklarasi PBB tentang Anti Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 1983 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun mental/psikologis. Termasuk dalam pengertian kekerasan adalah ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan pada perempuan umumnya terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki. Relasi gender yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, baik di dalam keluarga maupun masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan berbasis gender.

Saat ini masalah kekerasan terhadap perempuan dapat disejajarkan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti minuman keras, perjudian, dan prostitusi yang hingga kini sulit dihilangkan. Hal ini dibuktikan oleh data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi

ekonomi ditengarai memiliki korelasi dengan kekerasan terhadap perempuan. Dari data terungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan seringkali disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan kemiskinan.

Pada sub-bab ini berikut disajikan gambaran tindak kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat di Kota Bogor.

Tabel 9.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan menurut Bentuk Kekerasan dan Kecamatan di Kota Bogor, 2008

Kecamatan	Bentuk Kekerasan						Jumlah
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Berkonflik dengan Hukum	Lainnya	
Bogor Utara	2	1	0	0	0	0	3
Bogor Selatan	1	0	0	0	0	0	1
Bogor Timur	0	0	0	0	0	0	0
Bogor Barat	1	0	0	1	0	0	2
Bogor Tengah	1	0	0	0	0	0	1
Tanah Sareal	3	2	0	0	0	0	5
Bogor	8	3	0	1	0	0	12

Sumber: Pratista Indonesia, 2009

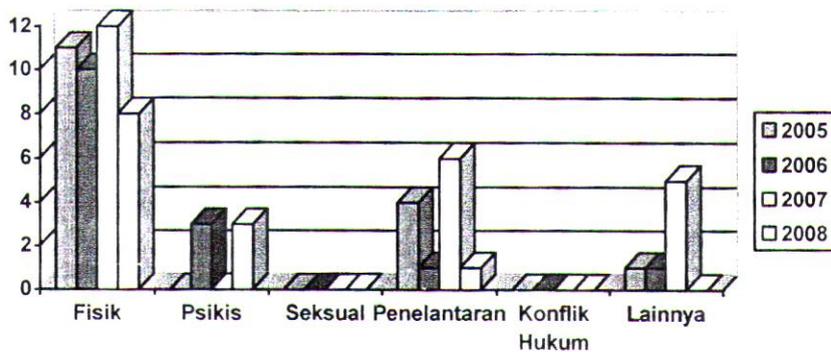
Tabel 9.1 menunjukkan bahwa sepanjang 2008 tercatat 12 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bogor. Adapun delapan kasus diantaranya berbentuk kekerasan fisik. Demikian halnya Tabel 9.1 memperlihatkan bahwa diantara 66 kasus kekerasan terhadap perempuan yang muncul sepanjang 2005-2008 di Kota Bogor, bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan fisik, yaitu sebanyak 41 kasus. Hal ini menunjukkan betapa rentannya perempuan yang oleh masyarakat seringkali dianggap sebagai kaum lemah, namun pada kenyataannya malahan mendapat perlakuan kasar dan tindakan yang semena-mena di lingkungannya. Selain kekerasan fisik, Gambar 9.1 memperlihatkan perempuan di Kota Bogor mengalami kekerasan psikis, penelantaran dan lainnya.

Tabel 9.2. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan menurut Bentuk Kekerasan dan Kecamatan di Kota Bogor, Tahun 2005-2008

Kecamatan	Bentuk Kekerasan						Jumlah
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Berkonflik dengan Hukum	Lainnya	
Bogor Utara	7	2	0	1	0	0	10
Bogor Selatan	3	0	0	3	0	1	7
Bogor Timur	0	0	0	1	0	0	1
Bogor Barat	9	1	0	1	0	1	12
Bogor Tengah	2	1	0	1	0	1	5
Tanah Sareal	20	2	0	5	0	4	31
Bogor	41	6	0	12	0	7	66

Sumber: Pratista Indonesia, 2009

Data pada tabel di atas dapat lebih jelas digambarkan oleh grafik pada Gambar 9.1. Grafik tersebut menunjukkan kasus kekerasan fisik merupakan kasus terbanyak sedangkan kasus kekerasan seksual merupakan kasus paling sedikit terjadi pada kurun waktu 2005-2008. Kasus lainnya yang banyak terjadi di Kota Bogor adalah kasus penelantaran. Data ini belum sepenuhnya menggambarkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bogor karena belum semua kasus dapat terdata.



Gambar 9.1 Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Bogor 2005-2008  
 Sumber: Pratista Indonesia, 2009

Kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2005-2008 di Kota Bogor menurut wilayah kejadian, seperti tampak pada Tabel 9.2

memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan lebih dominan terjadi di Kecamatan Tanah Sareal, yaitu 31 kasus dengan bentuk kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Berdasarkan data Reskrim Bogor (2008), kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2008 (bulan Januari – Desember 2008) adalah sebanyak 67 kasus. Diantara jumlah kasus tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu sebanyak 43 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan terjadi di Kota Bogor selama tahun 2008.

Tabel 9.3. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan menurut Perilaku Kekerasan dan Waktu Kejadian di Kota Bogor, Tahun 2008

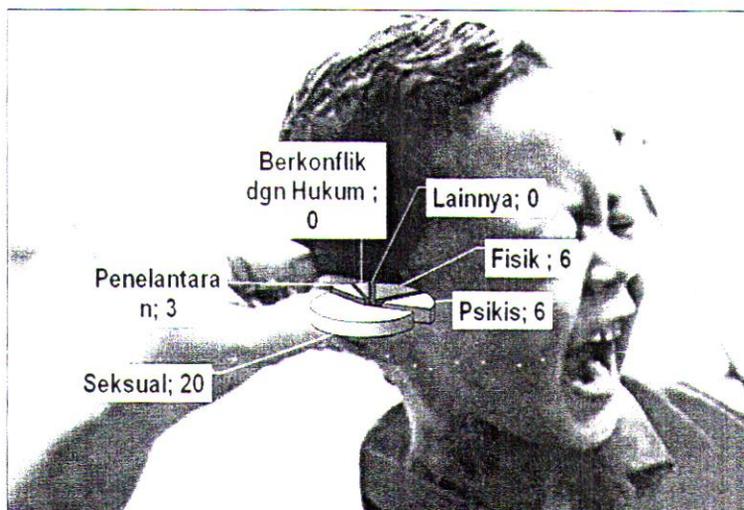
Bulan	Perilaku Kekerasan					Jumlah
	Perdagangan Perempuan	Pencabulan	Perkosaan	KDRT	Pelindungan Anak	
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	1	0	1	0	2
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	4	5	9
Juni	0	0	1	4	0	5
Juli	0	3	0	8	0	11
Agustus	0	4	0	4	0	8
September	0	0	0	2	0	2
Oktober	0	1	2	4	2	9
November	0	0	3	5	0	8
Desember	0	0	0	11	2	13
Jumlah	0	9	6	43	9	67

Sumber: Reskrim Bogor, 2008

Apabila ditelusuri menurut waktu kejadian, tampaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak muncul di bulan Juli, yaitu 11 kasus dan Desember sebanyak 13 kasus. Tabel 9.3 juga memperlihatkan bahwa perempuan di Kota Bogor mengalami kekerasan seksual, seperti pencabulan dan perkosaan.

## 9.2 Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak di wilayah Bogor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sangat signifikan. Pada Tabel 9.3 tampak bahwa diantara kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2008 terdapat sembilan kasus kekerasan yang melibatkan anak perempuan sehingga dikategorikan sebagai kasus Perlindungan Anak. Bahkan, berdasarkan data sebuah lembaga perlindungan anak dan perempuan di Bogor, Pratista Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2009 meningkat 60 persen dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2008 kekerasan terhadap anak di Kota Bogor mencapai 35 kasus. Sementara pada tahun 2009 saja (dalam kurun lima bulan, Januari hingga Mei), jumlah kasus kekerasan terhadap anak sudah mencapai 20 kasus. Jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada rentang waktu ini cukup banyak. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak, baik pada 2008 maupun 2009, yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual yang mencapai lebih dari 50%. (Gambar 9.2 dan Tabel 9.4).



Gambar 9.2 Contoh Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Bogor Tahun 2008  
 Sumber: Pratista Indonesia, 2009

Ini menunjukkan bahwa lemahnya posisi anak dapat menyebabkan anak (terutama anak perempuan) rentan terhadap tindak kekerasan. Anak yang dalam hal ini dianggap berada dalam posisi subordinat, acapkali menjadi sasaran kekerasan orang dewasa, baik itu kekerasan fisik, psikis atau seksual. Bahkan, kekerasan seksual acapkali dilakukan oleh ayah kandung, kakak kandung atau orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Hal ini menunjukkan betapa keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak, justru menjadi tempat anak mendapatkan tindak kekerasan. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan umum, menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Tampak pada Tabel 9.4 bahwa diantara 35 kasus kekerasan terhadap anak di kota Bogor selama tahun 2008 terdapat 28 kasus kekerasan yang korbannya adalah anak perempuan. Tampak pula bahwa bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang lebih dominan adalah kekerasan seksual, yaitu sebanyak 19 kasus. Berdasarkan wilayah kejadian, kasus kekerasan terhadap anak lebih marak terjadi di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, yaitu 18 kasus.

Tabel 9.4. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Menurut Bentuk Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	Bentuk Kekerasan												Jumlah	
	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Berkonflik dengan Hukum		Lainnya			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Bogor Utara	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
Bogor Selatan	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	5
Bogor Timur	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bogor Barat	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Bogor Tengah	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Tanah Sareal	0	0	4	2	0	9	1	2	0	0	0	0	0	18
Jumlah	1	5	4	2	1	19	1	2	0	0	0	0	0	35

Sumber: Pratista Indonesia, 2009

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bogor sepanjang 2005-2008 mencapai 69 kasus dimana 52 kasus diantaranya melibatkan korban anak perempuan (Tabel 9.5). Berdasarkan wilayah kejadian, 24 kasus kekerasan terjadi di wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Tingginya angka kekerasan yang dialami anak perempuan membuktikan lemahnya perlindungan bagi anak perempuan, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

Diperlukan langkah-langkah strategis Pemerintah Kota Bogor untuk memprioritaskan kebijakan bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Jika hal ini tidak segera ditangani, akan menimbulkan trauma dan gangguan mental, fisik, dan psikis pada korban. Dalam jangka panjang, anak-anak akan terhambat perkembangan dirinya.

Tabel 9.5. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak menurut Bentuk Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2005-2008

Bentuk Kekerasan	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Berkonflik dengan Hukum		Lainnya		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Bogor Utara	1	3	3	1	0	3	1	0	1	0	0	
Bogor Selatan	0	1	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	12
Bogor Timur	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Bogor Barat	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9
Bogor Tengah	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
Tanah Sareal	1	1	4	2	1	11	1	3	0	0	0	0	24
Bogor	5	7	7	3	1	39	2	3	2	0	0	0	69

Sumber: Pratista Indonesia, 2009

### 9.3 Jumlah Korban Kekerasan

Kasus kekerasan di Kota Bogor sepanjang tahun 2008 adalah sebanyak 102 kasus dan korban kekerasan lebih dominan adalah perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, yaitu: masing-masing 53 perempuan dewasa dan 44 anak perempuan.

Tabel 9.6. Jumlah Korban Kekerasan menurut Perilaku Kekerasan di Kota Bogor, Tahun 2008

Perilaku Kekerasan	Korban Kekerasan				Jumlah
	Dewasa		Anak-Anak		
	L	P	L	P	
Perdagangan Perempuan	0	3	0	2	5
Pencabulan	0	0	0	17	17
Perkosaan	0	6	0	21	27
Kekerasan terhadap Perempuan	3	44	0	0	47
Pelanggaran thd Perlindungan Anak	0	0	2	4	6
Jumlah	3	53	2	44	102

Sumber: Reskrim Bogor, 2008

Di antara 53 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan tersebut terdapat 44 korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tercatat 44 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan, dari jumlah tersebut, 21 anak merupakan korban perkosaan dan 17 korban pencabulan. Tabel 9.6 juga memperlihatkan bahwa laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak turut menjadi korban kekerasan, namun dalam jumlah yang sangat kecil.

Tabel 9.7. Jumlah Korban Perkosaan Menurut Usia dan Waktu Kejadian di Kota Bogor, Tahun 2008

Bulan	Usia (tahun)			Jumlah
	< 10	11-19	20-29	
Januari	0	2	0	2
Februari	0	0	1	1
Maret	1	2	1	4
April	0	0	0	0
Mei	0	2	0	2
Juni	0	2	1	3
Juli	1	4	0	5
Agustus	0	0	0	0
September	0	2	0	2
Oktober	0	0	0	0
November	0	2	1	3
Desember	1	2	2	5
Jumlah	3	18	6	27

Sumber: Reskrim Bogor, 2008

Bentuk kekerasan seksual khususnya kasus perkosaan di Kota Bogor selama tahun 2008 cukup besar, seperti disajikan pada Tabel 9.7 terdapat 27 kasus, dengan 18 kasus di antaranya merupakan korban perempuan berusia 11-19 tahun, yang dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Tampak pula bahwa kasus perkosaan umumnya terjadi pada bulan Juli dan Desember saat anak-anak sedang liburan sekolah.

## X. KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan anak saat ini. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak dan kesejahteraan, baik secara lahir, batin maupun sosial. Adanya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 44/23, Tahun 1989, menunjukkan kesadaran masyarakat dunia bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini. Tiga hak anak perlu menjadi komitmen semua pihak: (i) hak untuk kelangsungan hidup, (ii) hak perlindungan dari pengabaian, penelantaran, perlakuan salah, penganiayaan eksploitasi, dan (iii) hak untuk berpartisipasi demi mencapai masa depan yang lebih baik.

Di Indonesia, hak anak tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dilandasi kesadaran bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, hak-hak sipil, serta kebebasan anak. Oleh karena itu, penghargaan terhadap hak-hak yang melekat pada anak harus selalu dikedepankan.

Perhatian dan komitmen terhadap hak anak harus terwujud dalam tindakan nyata, mulai di tingkat individu, kelompok, masyarakat, sampai lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data resmi statistik menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak. Situasi umum menunjukkan bahwa

tindakan nyata yang dikerahkan oleh masyarakat dan negara masih belum cukup efektif untuk menciptakan dukungan kehidupan dan lingkungan ramah anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Sebagai manusia yang rentan dan masih dalam masa pertumbuhan, anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik secara fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial. Akan tetapi, dalam situasi yang nyata, kondisi anak masih sarat dengan berbagai persoalan. Anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih, dengan tujuan akhir agar anak sebagai individu bisa memainkan peran yang konstruktif di masyarakat.

### **10.1 Status Gizi Kurang dan Buruk**

Jumlah balita di Kota Bogor adalah 88.328 jiwa (Tabel 10.1). Dari jumlah tersebut, sekitar 65.225 balita yang ditimbang dan terlihat bahwa masih ada 23.103 balita yang belum ditimbang. Dengan demikian, perlu peningkatan pelayanan yang lebih mudah diakses agar semua balita dapat ditimbang.

Dari jumlah balita yang ditimbang tercatat sebanyak 53.628 jiwa yang memiliki status gizi buruk. Balita dengan status gizi kurang di Kota Bogor masih cukup tinggi, yaitu sebesar 8,15 persen dan status gizi buruk sebesar 0,43 persen. Tidak ada kecamatan di Kota Bogor yang dikategorikan sebagai kecamatan rawan gizi, namun Kecamatan Bogor Timur merupakan kecamatan yang menempati urutan teratas dalam jumlah balita terbanyak dengan status gizi kurang, yaitu 665 jiwa atau 8,82 persen. Jumlah balita dengan status gizi buruk yang terbanyak berdomisili di Kecamatan Bogor Selatan, yaitu 94 jiwa atau 0,83 persen.

Tabel 10.1 Status Gizi Balita Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	Balita yang Ada	Balita yang Ditimbang					
		Gizi Baik	%	Gizi Kurang	%	Gizi Buruk	%
Bogor Utara	15.960	10.551	91,01	1.000	8,63	42	0,36
Bogor Selatan	18.561	10.164	89,96	1.040	9,21	94	0,83
Bogor Timur	8.849	6.860	91,01	665	8,82	13	0,17
Bogor Barat	19.158	14.390	91,35	1.297	8,23	65	0,41
Bogor Tengah	8.756	6.206	91,10	562	8,25	44	0,65
Tanah Sareal	17.044	11.457	93,66	755	6,17	20	0,16
Bogor	88.328	59.628	91,42	5.319	8,15	278	0,43

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2008

Dilihat dari berat badan balita, Tabel 10.2 memperlihatkan bahwa sejumlah 13.201 balita atau 26,37 persen balita di Kota Bogor memiliki berat badan di bawah standar. Adapun 19,58 persen balita di antaranya merupakan balita yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bogor Barat.

Untuk meningkatkan status kesehatan balita, peran orang tua dan posyandu perlu ditingkatkan lagi. Promosi kesehatan balita harus terus dilakukan dengan beragam strategi yang menarik minat dan partisipasi masyarakat. Pelatihan mengenai pemberian makanan tambahan yang murah, sehat, dan bergizi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Peran kader posyandu dan bidan di kelurahan juga sangat penting ditingkatkan melalui penyegaran, motivasi, dan pendanaan kegiatan yang mencukupi.

Tabel 10.2 Berat Badan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	Balita yang Ditimbang			
	Berat Badan Naik	%	Bawah Garis Merah	%
Bogor Utara	6.785	90,62	702	9,38
Bogor Selatan	8.177	87,44	1.175	12,56
Bogor Timur	4.449	90,63	460	9,37
Bogor Barat	6.795	80,42	1.654	19,58
Bogor Tengah	3.486	89,38	414	10,62
Tanah Sareal	7.172	92,48	583	7,52
Bogor	36.864	73,63	13.201	26,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2008

## 10.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Anak usia dini, yaitu 2,5 sampai 6 tahun, berada dalam masa keemasan perkembangan seorang anak. Periode ini menentukan sekali perkembangan kepribadian, keterampilan, minat, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini sangat penting dan mendasari seluruh rangkaian pendidikan dan perkembangan seorang manusia. Umumnya pendidikan anak di usia dini menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya, namun sayangnya, justru masih banyak para orang tua yang tidak berkesadaran atau tidak punya waktu atau tidak mampu mengemban tanggung jawab pendidikan anak usia dini tersebut.

Tampak pada Tabel 10.3 bahwa jumlah anak yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini cukup besar, yaitu 5.798 jiwa. Selain berpartisipasi dalam PAUD, terdapat 1.266 anak yang mengikuti pendidikan di kelompok bermain dan TPA. Yang tidak kalah pentingnya dari PAUD adalah kelompok bermain dan TPA juga berperan dalam mengasah perkembangan kepribadian dan keterampilan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tabel 10.3. Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Al Quran menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogo Tahun 2008

Kecamatan	PAUD		Kelompok Bermain		TPA		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Bogor Utara	373	412	8	24	17	5	839
Bogor Selatan	323	337	198	237	-	-	1.095
Bogor Timur	240	352	31	40	-	-	663
Bogor Barat	199	214	157	158	29	32	789
Bogor Tengah	693	1.017	136	139	-	-	1.985
Tanah Sareal	735	903	23	32	-	-	1.693
Bogor	2.563	3.235	553	630	46	37	7.064

Sumber: Disdikpora Kota Bogor 2009

Tabel 10.3 juga memperlihatkan adanya sedikit perbedaan antara partisipasi anak laki-laki dan perempuan, baik dalam Pendidikan Anak Usia Dini, kelompok bermain maupun TPA. Bahkan, partisipasi anak perempuan relatif sedikit di atas anak laki-laki. Hal ini menunjukkan kesempatan anak

laki-laki dan anak perempuan dalam Pendidikan Anak Usia Dini, kelompok bermain dan TPA relatif seimbang. Jumlah anak yang berpartisipasi dalam pendidikan taman kanak-kanak di Kota Bogor cukup besar, yaitu 9.053 jiwa. Tabel 10.4 memperlihatkan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara partisipasi sekolah anak laki-laki dan perempuan pada pendidikan taman kanak-kanak. Partisipasi anak perempuan sedikit lebih tinggi, yaitu 58,89 persen dibandingkan partisipasi anak laki-laki, yaitu 41,11 persen. Hal ini juga menunjukkan kesempatan yang relatif seimbang pada pendidikan taman kanak-kanak bagi anak laki-laki dan perempuan.

Kesempatan memperoleh pendidikan taman kanak-kanak pada anak perempuan di Kota Bogor sudah cukup baik. Bahkan, tampak pada Tabel 10.4 bahwa partisipasi sekolah anak perempuan di Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan jauh lebih tinggi dibanding partisipasi anak laki-laki. Partisipasi anak perempuan di Kecamatan Bogor Timur adalah 73,30 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan partisipasi anak laki-laki sebesar 26,69 persen. Demikian halnya, partisipasi anak perempuan di Kecamatan Bogor Selatan sebesar 66,37 persen adalah dua kali lebih tinggi dari partisipasi anak laki-laki, yaitu 33,62 persen.

Tabel 10.4. Jumlah Siswa Pendidikan Taman Kanak-Kanak menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2008

Kecamatan	L	%	P	%	Jumlah	%
Bogor Utara	509	44.57	633	55.42	1.142	100
Bogor Selatan	681	33.62	1.344	66.37	2.025	100
Bogor Timur	260	26.69	714	73.30	974	100
Bogor Barat	958	48.38	1.022	51.61	1.980	100
Bogor Tengah	488	40.33	722	59.66	1.210	100
Tanah Sareal	826	47.96	896	52.03	1.722	100
Bogor	3.722	41.11	5.331	58.89	9.053	100

Sumber: Disdikpora Kota Bogor 2009

### **10.3 Jumlah Anak dan Balita Terlantar**

Perlindungan bagi anak telah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, di Kota Bogor masih terdapat 436 anak yang menyanggah masalah sosial (Tabel 10.5). Di antara 436 anak tersebut terdapat 320 anak dan 99 balita yang terlantar. Jumlah anak yang terlantar lebih banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat, yaitu 101 anak. Adapun jumlah balita yang terlantar lebih banyak terdapat di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur, yaitu masing-masing 28 dan 27 anak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Bogor untuk melindungi anak-anak belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan melibatkan segenap elemen masyarakat, dimulai dari tingkat rumah tangga.

Tidak ada data yang menunjukkan kepemilikan akte kelahiran bagi anak dan balita terlantar tersebut sehingga belum dapat diketahui terpenuhi atau tidaknya hak anak terhadap identitas. Penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor didasarkan kewarganegaraan dan tidak merinci lebih lanjut mengenai status terlantar, atau bahkan memilah berdasarkan gender.

Tidak adanya kepemilikan akta kelahiran pada anak terlantar dapat menyebabkan ketidakjelasan identitas anak yang berakibat pada sejumlah implikasi, seperti berpeluang mengalami diskriminasi, tidak memiliki akses pada pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta rentan untuk diperdagangkan dan dieksploitasi. Meskipun pengurusan akta kelahiran di setiap kelurahan di Kota Bogor tidak dipungut biaya atau gratis, namun perlu upaya dari pemerintah Kota Bogor agar setiap anak dan balita terlantar dapat memiliki akte kelahiran sehingga sejumlah implikasi negatif akibat ketidakadaan akta kelahiran pada anak dan balita terlantar dapat dihindari.

Tabel 10.5 Jumlah Anak dan Balita Terlantar, serta Anak Berkelakuan Menyimpang menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2007

Kecamatan	Anak Terlantar	Balita Terlantar	Anak Berkelakuan Menyimpang	Jumlah
Bogor Utara	19	21	1	41
Bogor Selatan	29	8	3	40
Bogor Timur	11	27	1	39
Bogor Barat	101	15	3	119
Bogor Tengah	95	28	6	129
Tanah Sareal	65	-	3	68
Bogor	320	99	17	436

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2008

Penanganan anak dengan perilaku menyimpang juga memerlukan perhatian serius dari para pihak. Anak terlahir dalam keadaan bersih, orang tua dan lingkungan turut membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, dalam membina anak, peran orang tua, sekolah, dan dinas sosial perlu lebih intensif. Pengembangan kepribadian positif tidak dapat dilakukan secara instan. Kegiatan-kegiatan positif perlu disesuaikan dengan sifat-sifat anak yang suka akan pola hiburan. Anak perlu dibina melalui organisasi sosial yang mampu mengembangkan wawasan pengetahuan, keterampilan hidup, dan keterampilan berinteraksi sosial. Pramuka, olah raga, pengembangan sains anak, dan aktivitas yang mampu menyalurkan talenta anak dapat dikembangkan di sekolah. Orang tua dan para pihak harus menghindari sikap otoriter dalam mendidik anak. Mari dicermati pernyataan Nolte (1982) tentang anak sebagai berikut:

- Bila anak hidup dengan kritikan, ia belajar untuk mengutuk;
- Bila anak hidup dengan permusuhan, ia belajar untuk melawan;
- Bila anak hidup dengan ejekan, ia belajar menjadi pemalu;
- Bila anak hidup dengan rasa malu, ia belajar untuk merasa bersalah;
- Bila anak hidup dengan toleransi, ia belajar menjadi sabar;
- Bila anak hidup dengan penuh dukungan, ia belajar untuk percaya diri;
- Bila anak hidup dengan pujian, ia belajar untuk menghargai;

Bila anak hidup dengan keadilan, ia belajar untuk menghargai;  
Bila anak hidup dengan keadilan, ia belajar menjadi adil;  
Bila anak hidup dengan rasa aman, ia belajar untuk mempunyai keyakinan;  
Bila anak hidup dengan pengakuan, ia belajar untuk menyukai dirinya;  
Bila anak hidup dengan kejujuran, ia belajar kebenaran;  
Bila anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia belajar menemukan rasa kasih sayang di dunia.

Diperlukan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara untuk membina anak. Anak bukanlah orang dewasa dalam tubuh kecil. Anak memiliki kebutuhan dan harapan yang spesifik, berbeda dengan remaja dan orang dewasa. Anak tidak semata membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik berupa materi, tetapi mereka sangat membutuhkan pemenuhan kebutuhan psikis, spiritual, mental, dan sosial. Terlebih pada anak berusia 0-3 tahun yang dikenal dengan *golden years*, perhatian orang tua baik fisik maupun nonfisik sangat menentukan keberhasilan kehidupan anak selanjutnya. Pada masa tersebut, sangat penting orang tua dan keluarga menanamkan nilai-nilai kehidupan, kasih sayang, pemenuhan gizi, dan kesehatan anak untuk memungkinkan perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal.

## XI. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KOTA BOGOR

Data-data dasar untuk menghitung indeks pembangunan gender (GDI) dan indeks pemberdayaan gender (GEI) belum tersedia dalam bentuk data terpilah jenis kelamin. Penghitungan kedua indeks tersebut belum dapat dilakukan sampai ke tingkat kecamatan. Agar penghitungan indeks dapat dilakukan sampai di tingkat kecamatan, seluruh data yang dimiliki oleh instansi dinas dan lembaga pemerintahan di Kota Bogor harus terpilah berdasarkan jenis kelamin. BPS dan kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2007) mempublikasikan kedua indeks (Tabel 11.1).

Tabel 11.1 Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2004-2007

Propinsi Kabupaten/Kota	HDI				GDI				GEM			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Jawa Barat	69,1	69,9	70,3	70,7	58,2	59,8	60,8	61,4	49,2	53,0	54,4	55,3
Bogor	68,3	69,2	69,7	70,08	52,9	54,0	58,6	60,7	37,7	41,7	47,3	49,3
Sukabumi	67,9	68,7	68,9	69,21	52,9	54,5	56,0	58,5	51,9	53,6	55,4	58,1
Cianjur	66,1	66,8	67,1	67,65	44,0	45,4	49,0	50,1	41,6	48,2	51,6	51,8
Bandung	70,7	72,4	72,6	72,97	59,9	61,2	65,6	66,5	38,6	44,6	49,9	50,9
Garut	67,3	68,7	69,5	69,99	56,1	56,5	61,5	61,8	40,7	43,3	47,8	47,9
Tasikmalaya	69,1	70,4	70,9	71,24	52,9	54,1	55,0	57,8	45,0	50,5	51,4	51,6
Ciamis	67,8	69,3	69,8	70,14	60,0	60,6	63,3	64,1	50,0	49,3	51,9	53,0
Kuningan	67,7	68,5	69,2	69,70	54,7	56,4	56,9	59,0	42,3	46,5	47,6	49,9
Cirebon	65,1	66,0	66,3	67,30	50,8	50,9	54,1	55,5	45,6	50,5	54,0	55,1
Majalengka	66,1	66,9	68,4	68,94	49,7	51,2	53,3	55,4	41,4	43,0	45,0	47,1
Sumedang	69,7	70,2	70,6	71,30	61,6	63,0	64,3	64,9	56,0	58,5	60,1	60,4
Indramayu	62,0	63,0	65,3	66,22	45,2	45,4	46,5	47,3	52,4	51,6	52,9	54,0
Subang	67,3	68,2	69,9	70,03	55,3	57,0	57,4	60,5	54,0	53,6	54,5	56,7
Purwakarta	67,7	68,6	68,9	69,88	53,8	55,4	58,1	60,7	48,5	56,0	59,1	61,4
Karawang	65,6	66,4	66,9	68,45	55,0	56,0	57,9	58,3	43,7	50,5	52,9	52,9
Bekasi	69,6	70,4	70,7	71,55	53,6	54,1	54,6	57,0	42,5	46,6	48,5	50,4
Bandung Barat			72,3	72,29			65,7	67,0			43,4	45,0
Kota Bogor	74,0	74,3	74,6	74,73	60,2	61,2	63,7	65,3	47,1	51,1	55,0	55,3
Kota Sukabumi	71,8	72,4	73,0	73,66	57,9	59,4	60,1	61,7	46,6	48,6	49,5	50,5
Kota Bandung	73,9	74,3	74,5	74,86	66,4	66,6	67,3	67,9	56,8	57,0	58,0	59,8
Kota Cirebon	73,3	73,7	73,8	73,87	60,7	61,9	63,7	65,8	43,4	48,5	51,6	53,7
Kota Bekasi	74,2	74,6	74,8	75,31	58,4	60,2	62,0	64,4	42,9	45,3	48,1	48,9
Kota Depok	76,8	77,1	77,7	77,89	67,0	68,6	70,4	71,4	55,7	60,0	61,9	63,4
Kota Cimahi	72,4	73,1	73,3	74,42	63,9	64,2	65,3	65,6	45,2	44,3	46,5	46,9
Kota Tasikmalaya	71,5	72,1	72,3	72,75	60,4	61,6	64,0	66,3	43,0	41,3	44,5	46,9
Kota Banjar	68,4	69,4	69,6	70,17	52,2	53,6	55,1	57,4	41,9	45,9	47,9	49,9

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006, Kerjasama BPS dengan Kementerian Negara Perempuan

Angka-angka indeks pada Tabel 11.1 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender Kota Bogor berada di atas nilai indeks Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, dari sisi indeks pemberdayaan gender, kondisi Kota Bogor pada tahun 2004 dan 2005 berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pada tahun 2006 dan 2007, indeks pemberdayaan gender Kota Bogor meningkat dan menyamai indeks yang dicapai Provinsi Jawa Barat.

Capaian angka-angka indeks tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah. Kebijakan pembangunan yang memerhatikan kebutuhan masyarakat secara spesifik, mempertimbangkan kebutuhan gender strategis dan kebutuhan gender praktis, memprioritaskan kaum marjinal, dan mengeliminasi diskriminasi di seluruh bidang pembangunan akan berkontribusi terhadap efektivitas pemberdayaan perempuan. Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu digalang terus, sampai unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

Di Kota Bogor, aspek terlemah yang dicapai oleh kaum perempuan adalah di bidang pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan persoalan klasik yang dihadapi perempuan, yakni kepercayaan diri, dukungan keluarga, dan kepercayaan masyarakat. Peluang perempuan untuk berkiprah di sektor publik perlu memperoleh dukungan keluarga dan pengakuan masyarakat akan kompetensi perempuan. Dukungan-dukungan tersebut merupakan faktor penguat bagi perempuan untuk turut berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, setiap elemen pemerintahan di berbagai aras harus mengintegrasikan pengalaman dan aspirasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. PUG dalam Inpres

itu diartikan sebagai: "suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan publik. PUG merupakan suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan yang memasukkan pengalaman-pengalaman dan permasalahan-permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan". Tujuan PUG adalah untuk memastikan perempuan dan laki-laki menikmati manfaat pembangunan secara adil dan merata.

Melalui implementasi PUG diharapkan keterlibatan laki-laki dan perempuan sudah mulai tampak saat menentukan tujuan program, menganalisis data terpilah gender sebagai pembuka wawasan, menentukan langkah-langkah program, menyusun indikator sukses, melakukan monitoring dan evaluasi, serta upaya tindak lanjut kegiatan. Perlu dilakukan penelusuran tentang kondisi awal, dan komponen kunci PUG sebagaimana ditampilkan pada Tabel 11.2 berikut.

Tabel 11.2 Prasyarat PUG

Kondisi Awal	Komponen Kunci PUG
(a) Komitmen politik	Peraturan perundang-undangan
(b) Kerangka kebijakan	Tindak lanjut atas ratifikasi, konvensi internasional, penyusunan sistem sistem dan mekanisme akuntabilitas yang responsif gender, dan pelembagaan institusi PUG
(c) Struktur dan mekanisme pemerintah	Unit PUG, Focal point, Pokja dan berbagai Forum
(d) Sumberdaya	Sumberdaya manusia dan sumber dana
(e) Sistem informasi dan data	Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin
(f) Alat analisis	Analisis gender
(g) Masyarakat madani	Mekanisme dialog dan proses yang partisipatif

Sumber: INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional dan Panduan Pelaksanaannya

Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender memerlukan tersedianya anggaran dan terciptanya infrastruktur birokrasi yang memungkinkan kebijakan ini secara mekanistik dapat diselenggarakan. Pemahaman tentang siklus manajemen dan intervensi program gender sangat penting agar kegiatan dapat berjalan benar. Tabel 11.3 menunjukkan tujuh tahap keterlibatan berbagai aktivitas pada siklus manajemen pembangunan berperspektif gender.

Tabel 11.3 Siklus Manajemen Pembangunan Gender dan Intervensi Kegiatan

No	Tahap	Intervensi kegiatan
1	Identifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah kebijakan</li> <li>- Identifikasi kebijakan perempuan di dalam pembangunan, dan gender dan pembangunan</li> <li>- Target PUG</li> </ul>
2	Persiapan: (a) definisi kelompok target (b) identifikasi tujuan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnosis gender</li> <li>- Identifikasi peran gender</li> <li>- Penilaian kebutuhan gender</li> </ul>
3	Desain (a) keterlibatan individu (b) <i>feasibility</i> studi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan gender pada staf</li> <li>- TOR responsif gender (staf dan konsultan)</li> <li>- Mekanisme untuk menjamin terlibatnya organisasi sadar gender dalam proses perencanaan</li> <li>- Data terpilah tentang alokasi dan kontrol sumberdaya</li> </ul>
4	Penilaian (a) misi individu (b) studi penilaian desain kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TOR konsultan responsif gender</li> <li>- Keterlibatan ahli gender</li> <li>- Pelatihan gender staf</li> <li>- Analisis B/C gender yang melibatkan perempuan dalam kegiatan tak terbayar</li> <li>- Keterlibatan perempuan dalam pelatihan gender</li> </ul>
5	Ratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Entry point</i></li> <li>- Pelatihan staf dalam isu tentang kesadaran gender</li> </ul>
6	Implementasi (a) dinas dan staf (b) populasi target	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan perencanaan gender staf</li> <li>- TOR gender untuk staf</li> <li>- Komposisi lembaga responsif gender</li> <li>- Klarifikasi peran perempuan dalam proyek</li> </ul>
7	Monitoring dan evaluasi, dan tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TOR konsultan gender</li> <li>- Pelatihan gender staf</li> </ul>

- Komposisi tim
- Upaya tindak lanjut

Diadaptasi dari Moser, 1993

Agar PUG berhasil dalam pelaksanaan, diperlukan pelaksana PUG yang berkompeten, terutama dalam penyusunan perangkat analisis, pemantauan, dan evaluasi PUG. Diperlukan pengaturan pelaksanaan PUG melalui forum-forum komunikasi atau kelompok kerja yang disepakati oleh lembaga. Forum atau pokja dapat berperan sebagai komite yang menjamin arah PUG sehingga mampu mencapai tujuan pelaksanaan PUG itu sendiri. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan responsif gender perlu menerapkan prinsip umum dalam monitoring dan evaluasi yaitu dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, tidak berbelit-belit, transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.

Pemantauan PUG (INPRES No. 9 Tahun 2000) meliputi: (a) mengukur prakondisi dan komponen kunci PUG dimiliki oleh lembaga, (b) menilai sejauh mana akses dan kontrol perempuan dan laki-laki atas sumber daya-sumber daya dan fasilitas-fasilitas serta layanan kebijakan, program dan kegiatan, (c) mengukur derajat partisipasi staf, mitra kerja, dan kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan tugas-tugas, dan (d) mengetahui kinerja staf yang responsif gender. Kegiatan monitoring dilakukan secara rutin pada implementasi aksi, dengan kurun waktu bulanan, triwulan, tengah tahun, dan tahunan. Hasil monitoring didokumentasikan dalam bentuk laporan. Pelaku monitoring adalah setiap lembaga yang terlibat langsung dengan PUG. Hasil monitoring akan dapat mengukur pencapaian pelaksanaan PUG pada berbagai tahap, dan untuk merevisi kesalahan pada perencanaan dan implementasi.

Pencapaian tujuan pembangunan gender dan pemberdayaan gender membutuhkan kerja keras semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Pelaksanaan pembangunan hendaknya tidak semata menghasilkan hal-hal yang bersifat fisik, namun harus pula menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila perempuan Kota Bogor berkualitas dan dengan relasi gender yang harmonis, akan dapat dihasilkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Kendala-kendala yang ditemui baik kendala struktural maupun nonstruktural dapat diatasi melalui advokasi, konsultasi, penguatan, dan kerja sama antarpihak dan lintas pihak.

## XII. REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PENUTUP

### 12.1 Rekomendasi Kebijakan

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 adalah terwujudnya masyarakat yang adil, maju, mandiri, dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut, misi RPJN 2005-2025 meliputi delapan aspek yaitu (i) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab; (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (iii) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (iv) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, (v) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, (vi) mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (vii) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (viii) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2010 adalah "Dengan Iman dan Takwa Jawa Barat sebagai Provinsi termaju di Indonesia dan Mitra terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010". Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan lima misi yang harus dicapai yaitu:

- 1) peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia;
- 2) pengembangan struktur perekonomian daerah yang tangguh;
- 3) pemantapan kinerja pemerintah daerah;
- 4) peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan;
- 5) peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah.

Sejalan dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat di atas, misi Kota Bogor seperti telah dikemukakan pada Bab IV di depan meliputi

mengembangkan perekonomian masyarakat, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan, dan mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, pembangunan di Kota Bogor dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus diintegrasikan dalam seluruh tahap pembangunan.

Beragam isu kesenjangan gender di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, politik, dan pemerintahan harus ditangani melalui proses-proses sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral. Setiap pengambil kebijakan perlu memahami adanya perbedaan kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut juga berkaitan dengan usia, latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, terdapat kendala-kendala struktural dan nonstruktural dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan minimnya pemahaman akan kebutuhan gender, pengambilan keputusan yang bias gender, analisis gender belum dilakukan secara tepat, dan penganggaran pembangunan yang belum responsif gender.

Kendala struktural dan nonstruktural ini dapat diatasi apabila pemerintah senantiasa meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan akan peran strategis pemberdayaan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda sehingga program pembangunan pun harus dirancang spesifik. Hal utama yang diperlukan adalah tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk setiap bidang.

Di Kota Bogor sendiri, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia sangat terbatas. Hal ini pada gilirannya mempersulit lembaga pemerintah untuk merancang program pembangunan yang responsif gender. Selain persoalan data, para pengambil kebijakan di lembaga eksekutif, legislatif harus menerapkan anggaran pembangunan yang responsif gender. Diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan; memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data; meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan data dan fakta di Kota Bogor, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi prioritas pemerintah. Dengan kehidupan perempuan dan anak yang semakin berkualitas, dapat ditingkatkan daya saing dan munculnya generasi penerus yang handal.

Beberapa bidang yang terkait dengan kualitas hidup dan perlindungan perempuan meliputi:

- 1) pendidikan,
- 2) kesehatan,
- 3) ekonomi,
- 4) hukum,
- 5) lingkungan dan sosial budaya,
- 6) tenaga Kerja,
- 7) lansia dan penyandang cacat,
- 8) perlindungan di daerah bencana dan konflik, dan
- 9) perlindungan remaja putri.

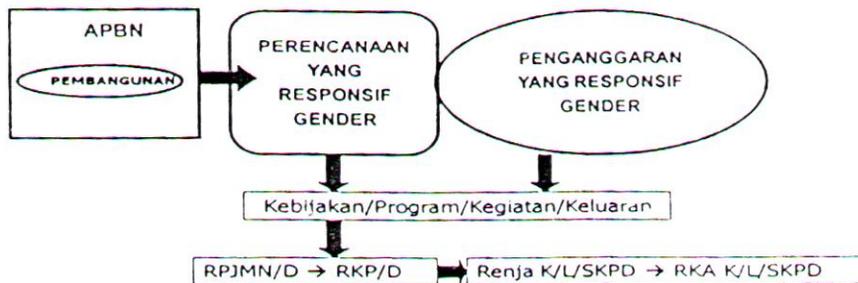
Dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, para pengambil kebijakan harus mampu merancang kebijakan dan strategi, program kerja dan kegiatan yang menjamin anak memperoleh

hak-haknya untuk hidup dan berkembang secara wajar. Hal ini meliputi dijaminnya kesejahteraan dan perlindungan anak pada delapan bidang, yaitu:

- 1) tumbuh kembang anak,
- 2) kelangsungan hidup anak,
- 3) perlindungan anak,
- 4) partisipasi anak,
- 5) hak sipil dan kebebasan,
- 6) kelembagaan anak,
- 7) kebijakan peduli anak,
- 8) penciptaan lingkungan yang ramah anak.

Untuk merancang dan melaksanakan pembangunan responsif gender di Kota Bogor diperlukan adanya anggaran yang memadai. Untuk itu, pemerintah perlu merencanakan dan menganggarkan program pembangunan yang responsif gender. Anggaran responsif gender (ARG) merupakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki secara adil. ARG merupakan strategi mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan. ARG sekaligus merupakan instrumen analisis, proses, dan politik yang berperspektif gender. Melalui ARG, dapat dinilai dampak belanja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan gender. ARG sekaligus berkaitan dengan realokasi anggaran dalam mencapai MDG's. Secara skematis ARG diilustrasikan pada Gambar 12.1

## Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota



Gambar 12.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
Sumber: Sarjunani, 2009

Dalam proses penganggaran harus pula dilakukan monitoring dan evaluasi. Beberapa indikator untuk mengukur proses penganggaran mulai penyusunan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi penganggaran responsif gender disajikan pada Tabel 12. 1. ARG dapat mengurangi ineficiency pembangunan. Untuk itu, direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB), Bagian Keuangan, DPRD Kota Bogor, Dinas terkait (Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pertanian dan lainnya), bersinergi dengan perguruan tinggi serta elemen masyarakat untuk bersinergi merancang ARG.

Tabel 12.1 Indikator Monitoring dan Evaluasi “Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender”

Proses Penganggaran	Aspek-aspek yang dimonitor dan yang dievaluasi
Tahap Penyusunan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana <i>tingkat keterlibatan</i> laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan Musrenbang</li> <li>2) Bagaimana <i>peran</i> laki-laki dan perempuan ( keaktifan, jumlah usulan program, masalah yang dihadapi )</li> <li>3) Bagaimana <i>bentuk</i> program yang dihasilkan (kebutuhan, masalah yang dihadapi, keberpihakan pada yang termarginalisasi.</li> <li>4) Bagaimana tingkat keterbukaan dan keterjangkauan informasi bagi laki-laki dan perempuan (luas publikasi, kalangan yang diundang)</li> </ol>
Tahap Pembahasan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana keterwakilan laki-laki dan perempuan dari setiap elemen-elemen masyarakat .</li> <li>2) Bagaimana peran elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>3) Bagaimana program yang dihasilkan untuk masyarakat</li> <li>4) Bagaimana keterbukaan proses pembahasan (ada akses, pengumuman jadwal dan hasil pembahasan).</li> </ol>
Tahap Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki) dalam pelaksanaan tender proyek.</li> <li>2) Bagaimana keterbukaan pelaksanaan tender:</li> <li>3) Bagaimana keterlibatan elemen-elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam proyek pembangunan:</li> <li>4) Bagaimana dampak dilaksanakannya proyek-proyek pembangunan.</li> </ol>
Tahap Pengawasan atau Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengawasan dan evaluasi.</li> <li>2) Bagaimana efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek</li> </ol>

Sumber: Supiandi, 2009

“Isu gender” mengacu pada perbedaan peran dan relasi antara perempuan dan laki-laki yang menghasilkan ketidaksetaraan atau

perbedaan perlakuan. Misalnya, ketidaksetaraan dalam distribusi *resources*; manfaat, kesempatan, mengambil keputusan, dan kemiskinan berwajah “perempuan”. Kebijakan anggaran yang ‘buta gender’ dan ‘netral gender’ tidak dapat mengalokasikan anggaran tepat sasaran. Kebijakan pembangunan yang buta gender dan netral gender cenderung menyamaratakan sasaran, mengabaikan isu gender, dan memperkuat ketidaksetaraan. Lebih jauh, kebijakan yang nonresponsif gender, fokus sasaran tidak spesifik, terkait distribusi, dan penetapan indikator untuk menghapus dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

## 12.2. Penutup

Populasi kaum perempuan di Kota Bogor mencapai separuh dari penduduk Kota Bogor. Kaum perempuan ini memiliki peran strategis dalam menentukan corak kehidupan. Bahkan, maju mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari mutu kaum perempuannya. Selama ini orientasi pembangunan belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan spesifik kaum perempuan. Umumnya dalam perspektif awam, kebutuhan setiap individu cenderung dianggap sama. Padahal, antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan berbeda. Perbedaan tu dapat dilihat berdasarkan usia, latar belakang sosial, ekonomi, orientasi nilai, dan aspek budaya.

Di sisi lain, kesejahteraan dan perlindungan anak perlu memperoleh perhatian. Anak bukanlah orang dewasa dalam tubuh kecil. Kebijakan pemenuhan hak-hak anak harus segera dirancang untuk perlindungan dan penjaminan tumbuh kembang anak secara mantap. Peran orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk mengembangkan potensi anak.

Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan setara, antara laki-laki dan perempuan dan juga anak, diperlukan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Ke depan

seluruh elemen pemerintahan Kota Bogor, diharapkan dapat mendorong instansi kerja di lingkungannya mampu menyediakan data terpilah tersebut. Dengan adanya data terpilah yang akurat, akan dapat dirancang program pembangunan responsif gender dan dapat dihindari terjadinya *ineficiency* pembangunan.

Melalui profil gender yang disusun ini diharapkan para pihak di Kota Bogor dapat mendorong dirancang dan dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang responsif gender. implementasi kebijakan pembangunan yang responsif gender perlu memperoleh prioritas untuk mendorong terwujudnya tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu, segenap jajaran pemerintahan di Kota Bogor harus mampu menyediakan data terpilah jenis kelamin sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan. Sinergisitas dalam penyediaan data yang akurat dan valid untuk rancang bangun kebijakan pembangunan responsif gender di berbagai bidang akan mengurangi kesenjangan gender.

Lebih lanjut, kerja sama antara pemerintah, sektor bisnis, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat diperlukan. Melalui sinergitas dan digalangnya proses-proses komunikasi yang dialogis dalam berbagai aras, Kota Bogor akan mampu mewujudkan visi pembangunannya, termasuk meningkatnya kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

## DAFTAR BACAAN

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2008. Jawa Barat dalam Angka 2007. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2009. Kota Bogor dalam Angka 2008. Bogor: BPS Kota Bogor
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Index Pembangunan Manusia Kota Bogor 2008. Bogor: BAPPEDA Kota Bogor dan BPS Kota Bogor.
- Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bogor. 2008. Profil Statistik Pendidikan Kota Bogor Tahun 2007/2008. Bogor: Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Bogor.
- Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor. 2008. Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2007. Bogor: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2007. Profil Gender Nasional Tahun 2006. Jakarta: KNPP.
- \_\_\_\_\_, 2007. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006. Jakarta: KNPP RI bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.
- Nolte, Dorothy Low. 1982. Anak-anak Belajar dari Apa yang Mereka Alami. Iklan Layanan Masyarakat. Terjemahan. Jakarta: IDI, PT. Abbott Indonesia, PediaSure, Gain.
- Reskrim Polresta, Bogor, 2008. Makalah Kekerasan terhadap Perempuan.
- Pratista, 2009. Perlindungan Anak. Makalah pada Seminar Perlindungan Anak Pemkab Bogor.
- PSW PSP3 LPPM IPB. 2008. Laporan Jaringan PSW/G melalui Internet. Bogor: PSW PSP3 LPPM IPB.
- PSW PSP3 LPPM IPB. 2008. Implementasi Program Keluarga Berencana di Era Otonomi Daerah. Bogor: PSW PSP3 LPPM IPB.
- Sadli, Saparinah, Rahman Anita, Habsyah Atashendartini. 2006. Implementasi Pasal 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984:

---

Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Pasca Persalinan. Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch Universitas Indonesia.

Sardjunani, Nina. 2009. Peran Pusat Studi Wanita dalam Mendukung Penerapan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan Pusat Studi Wanita. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 17 Desember 2009

Supiandi, Yusuf. 2009. Anggaran yang Responsif Gender (ARG): Suatu Tinjauan Praktis. Makalah pada “ Forum Fasilitasi PSW/PSG “. Depok, 16-17 Februari 2009.

